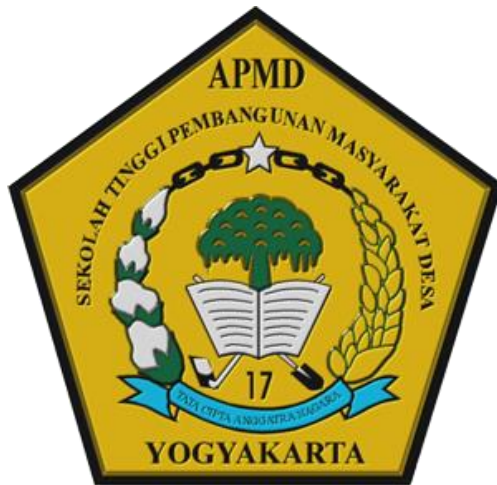


**PEMERINTAHAN BERBASIS KEADILAN DAN
KEBENARAN UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT**

(Studi Pemikiran Mohammad Hatta)

TESIS



**disusun oleh:
SYAIFUL BAHRI
23610009**

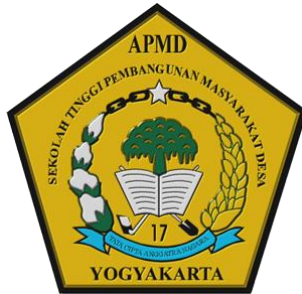
**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

**PEMERINTAHAN BERBASIS KEADILAN DAN
KEBENARAN UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT**

(Studi Pemikiran Mohammad Hatta)

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh :

SYAIFUL BAHRI

23610009

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

PEMERINTAHAN BERBASIS KEADILAN DAN KEBENARAN UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT
(Studi Pemikiran Mohammad Hatta)

Disusun Oleh
SYAIFUL BAHRI
23610009

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Pada tanggal 20 Desember 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

Ketua/Pembimbing



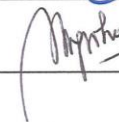
2. Dr. Sri Widayanti

Penguji Samping I

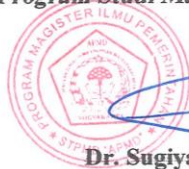


3. Dr. E. W. Tri Nugroho

Penguji Samping II



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan




Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.
NIDN: 0510096701

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

PEMERINTAHAN BERBASIS KEADILAN DAN KEBENARAN UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT

(Studi Pemikiran Mohammad Hatta)

Disusun oleh:

Syaiful Bahri

23610009

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 6 Januari 2025

Susunan Tim Penguji

Nama

1. Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

Ketua/Pembimbing

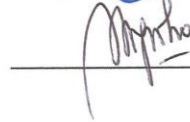
2. Dr. Sri Widayanti

Penguji Samping I

3. Dr. E. W. Tri Nugroho

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

NIDN: 0510096701

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syaiful Bahri

NIM : 23610009

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul PEMERINTAHAN BERBASIS Keadilan dan Kebenaran untuk Kemakmuran Rakyat (Studi Pemikiran Mohammad Hatta) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature over it. The signature is in black ink and appears to be 'Syaiful'. The banknote is yellow and green, with the number '10000' clearly visible. The signature is written over the central part of the note, partially covering the Garuda emblem and the word 'SERATUS'. The serial number '8B5D6ALX261185339' is visible at the bottom of the note.

SYAIFUL BAHRI

HALAMAN MOTTO

Motto kami yaitu, “Ilmu adalah batu loncatan meraih ilmu yang lebih tinggi. Hidupnya ilmu adalah yang berlandaskan niat ibadah. Mencintai ilmu adalah jalan kebaikan dan kebahagiaan”.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kami dedikasikan untuk Nabi Muhammad SAW, orang tua kandung, mertua, istri, guru dan dosen, anak keturunan kami, serta bangsa dan negara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas selesainya tugas tesis berjudul, “Pemerintahan Berbasis Keadilan Dan Kebenaran Untuk Kemakmuran Rakyat (Studi Pemikiran Mohammad Hatta)”. Sholawat dan Salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, keturunan, dan pengikutnya. *Aamiin*. Tesis ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Perguruan Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Tesis ini untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan teori-teori dari Mohammad Hatta terkait pemerintahan yang berkeadilan dan berkedaulatan yang berada dalam karyanya saat beliau ada di Belanda sampai dengan pulanginya ke tanah air hingga beliau dibuang ke Digul oleh pemerintah kolonial Belanda. Karya tersebut berupa Daulat Ra’jat dari tahun 1931 sampai dengan 1934. Teori-teori tersebut bermanfaat untuk mengupayakan penguatan efektifitas perbuatan pemerintahan untuk pemakmuran bersama bagi rakyat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M. sebagai Dosen Pembimbing, juga kepada Dr. Sri Widayanti dan Dr. E. W. Tri Nugroho selaku Dosen Penguji, serta semua dosen di Perguruan Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada istri tercinta Dr. Sri Wahyuni. Kami juga menyampaikan

terima kasih kepada seluruh jajaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, terkhusus kepada Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” beserta kawan-kawan Angkatan 31 MIP. Atas dukungan dan perhatiannya, kami dapat menyelesaikan studi magister. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kemajuan Ilmu Pemerintahan khususnya dan kemajuan pengetahuan di Indonesia pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Peneliti

SYAIFUL BAHRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
INTISARI	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur	10
C. Fokus Penelitian.....	17
D. Rumusan Masalah.....	17
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	18
F. Kerangka Konseptual.....	19
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Sumber Data.	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29

E.	Teknik Pemilihan Informan	31
F.	Teknik Validasi Data	31
G.	Teknik Analisis Data.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		33
A.	Proses Digitalisasi Daulat Ra'jat	33
B.	Struktur Daulat Ra'jat	44
C.	Biografi Mohammad Hatta	73
D.	Mohammad Hatta Dan Daulat Ra'jat	76
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		85
A.	Pentingnya Bidang Pemerintahan Berbasis Keadilan Dan Kebenaran.....	85
B.	Pemerintahan Sendiri Dan Daulat Rakyat	99
C.	Indigenisasi dan Rekonstitusi Pemerintahan	113
D.	Ideologi Pemerintahan Dunia	115
1.	Feodalisme	116
2.	Liberalisme.....	126
3.	Sosialisme	130
E.	Kedaulatan Rakyat dan Koperasi.....	143
1.	<i>Politiestaat</i>	145
2.	<i>“Rechts”-Staat</i>	150
3.	<i>Rechtstaat</i>	155
4.	Kedaulatan Rakyat Dalam <i>Rechtstaat</i>	158
BAB V PENUTUP		168
A.	Kesimpulan	168
B.	Saran	169
C.	Keterbatasan Penelitian.....	170

DAFTAR PUSTAKA.....	172
LAMPIRAN-LAMPIRAN	186
1. Ijin Penelitian.....	186
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	188

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1. Artikel Tentang Mohammad Hatta	11
Tabel III. 1. Struktur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia .	35
Tabel III. 2. Proses Digitalisasi Daulat Ra'jat	37
Tabel III. 3. Keutuhan Edisi Daulat Ra'jat.....	46
Tabel III. 4. Tulisan Berlabel Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat	77
Tabel IV. 1. Informasi Tentang Mohammad Hatta Oleh Dr. Jalaluddin Abdul Malek.....	85
Tabel IV. 2. Artikel Krisis Doenia dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan).....	88
Tabel IV. 3. Artikel Menempoeh Zaman Perpisahan.....	92
Tabel IV. 4. Artikel Demokrasi Asli Indonesia.....	95
Tabel IV. 5. Sedikit Pemandangan tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka <i>Volksraad</i>	100
Tabel IV. 6. Artikel Pengaroeh <i>Koloniaal Kapitaal</i> Di Indonesia	104
Tabel IV. 7. Artikel Tjatoer Politik Di Keliling Medja Boendar .	108
Tabel IV. 8. Artikel Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta	116
Tabel IV. 9. Artikel Kedaulatan Ra'jat Boekan <i>Anarchie</i>	124
Tabel IV. 10. Artikel Nasib Kaoem Dagang Ketjil Di Indonesia Dan Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia.....	131
Tabel IV. 11. Artikel Ekonomi Ra'jat	138
Tabel IV. 12. Artikel <i>Gilden-Socialisme</i>	141
Tabel IV. 13. Artikel Djalan Sempit.....	145

Tabel IV. 14. Artikel <i>Koloniale Politiek</i> : Dari <i>Politiestaat</i> ke “ <i>Rechts</i> ”- <i>Staat</i> dan Kembali Lagi Ke <i>Politiestaat</i>	147
Tabel IV. 15. Artikel <i>Non-Cooperation</i> : 1: <i>Non-Cooperation</i> -PNI	151
Tabel IV. 16. Artikel <i>Associatie-Politiek</i> Lagi?	153
Tabel IV. 17. Artikel Pemoeda Dalam Krisis.....	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1. Keseluruhan Edisi Daulat Ra'jat	41
Gambar III. 2. Kumpulan <i>Softfile</i> Daulat Ra'jat Dalam INLIS.....	42
Gambar III. 3. Mikro Film Positif Daulat Ra'jat.....	43
Gambar III. 4. Muka Daulat Ra'jat Tahoen Ke-IV Nomor 86 Tanggal 30 Januari 1934	73
Gambar IV. 1. Bagan Koperasi Sebagai Motor Ekonomi Kedaulatan Rakyat.....	163

INTISARI

Banyak orang belum mengetahui pemikiran Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat secara langsung. Bahkan, teori beliau tentang koperasi untuk pemakmuran bersama belum sepenuhnya dipahami penggerak koperasi. Padahal koperasi seharusnya menjadi motor kemakmuran dalam pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, penting membahas pemikiran Mohammad Hatta terkait pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran dalam Daulat Ra'jat. Rumusan masalah yang didapat: (1) apa saja prinsip teori pemerintahan menurut Mohammad Hatta? dan (2) apa saja manfaat teori pemerintahan tersebut? Untuk menjawab, maka peneliti menggunakan metode penelitian pustaka untuk mengisi kesenjangan tulisan yang belum mengungkap teori Mohammad Hatta dari Daulat Ra'jat secara langsung. Tujuan penelitian pustaka yaitu mengetahui prinsip dan manfaat teori pemerintahan menurut Mohammad Hatta. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa literatur atau dokumen digital "Daulat Ra'jat" dalam website Khastara milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Validitas data membandingkan keutuhan data primer terhadap buku cetak berjudul, "Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932" dan "Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934" dari Yayasan Hatta tahun 2002. Lokasi penelitian pada arena teksual dokumen digital dan *hardfile* Daulat Ra'jat. Metode pengumpulan data melalui cara mencari, mengumpulkan, membaca, menganalisa, dan mensintesa, serta menyimpulkan data yang ada dalam Daulat Ra'jat sesuai topik. Analisa dilakukan dengan cara, peneliti menambahkan, mengurangi, dan menggabungkan data yang didapatkan dengan pemahaman peneliti mengenai berbagai teori, konsep, dan perspektif dari berbagai literatur terkait topik. Hasil penelitian berupa koperasi harus bercirikan mampu menentukan harga, memberikan aksesibilitas, mengelola oportunitas pada arena produksi sampai konsumsi, dan berbagi hasil melalui donasi, investasi, dan kredit. Prinsip utama pemerintahan menurut Mohammad Hatta, yaitu pemerintahan: (1) berbasis keadilan dan kebenaran, (2) berdaulat rakyatku bukan daulat tuanku, dan (3) yang *indigeneous* dan konstitusional. Manfaatnya, yaitu: (1)

kemakmuran bersama, (2) penguatan ekonomi rakyat, dan (3) pemerintahan menjadi pemimpin sebagai aktor pertahanan rakyat dan rakyat sebagai penguasa.

Kata kunci: keadilan; kedaulatan rakyat; kemakmuran bersama; mohammad hatta; pemerintahan.

ABSTRACT

Many people do not yet know about Mohammad Hatta's Thought in Daulat Ra'jat, directly. Then, his theory about cooperation for people prosperity is not yet fully understood by cooperation agencies. Whereas, cooperation should become as a driver for prosperity in the government based on justice and truth. Therefore, we must discuss about Mohammad Hatta's Thought related to the government based on justice and truth for prosperity written in Daulat Ra'jat. The problem formulations are: (1) what are the principles about government theory related to Mohammad Hatta? And (2) what are the benefit from his government theory? For answering, then researcher uses library research method to fill the gap that does not yet discuss about Mohammad Hatta's Theory in Daulat Ra'jat, thoroughly. The purposes are about for knowing the principles and knowing the benefits. Data collection uses primary data from soft file documents of "Daulat Ra'jat" provided by Khastara website of National Library of The Republic of Indonesia. Data Validation uses comparison of wholeness between the soft file to books titled, "Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932" and "Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934" from Yayasan Hatta Publisher in year of 2002. The Research location is in textual area from texts in soft file until books of Daulat Ra'jat. Data collection method uses searching, inventory working, reading, analyzing, synthesizing, and concluding the data in Daulat Ra'jat related to the topic. Analyzing uses techniques. The techniques are for adding, decreasing, and combining the data with the researcher knowledge about theory, conception, also perspective from many literatures related to the topic. The results of the research are that cooperation must have price arrangement capability, power to set accessibility, opportunity sharing management at production area until consumption area, and profit sharing management through donation, or investation, or credit. The main principles of government are: (1) based on justice and truth, (2) based on the sovereignty for my people not for my lord, and (3) government is with indigenious and constitution aspect. The benefits are for: (1) common prosperity, (2) people's economy empowerment, and (3)

government is as leadership for folk's defense actor, then folk is as sovereign actor.

Keywords: common prosperity; folk's sovereignty; government; justice; mohammad hatta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mohammad Hatta mengungkapkan dalam artikel berjudul, “Faham Persatoean Di Dalam Strategi Dan Taktik Perdjoangan” tanggal 30 Januari 1932, bahwa sebuah tujuan harus mempunyai pergerakan (Hatta, 1932b). Pergerakan mencapai keberlanjutan ekonomi berbasis kerakyatan bisa didukung oleh teori desa mandiri hijau. Desa mandiri hijau merupakan gerakan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan sekaligus sustainabilitas ekonomi masyarakat desa yang menggerakkan usaha produksi dari kekayaan sumber daya alam dan tradisi (Sugiyanto, Tiurmida, et al., 2022). Desa mandiri hijau sebuah temuan gerakan ekonomi baru yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Desa mandiri hijau bukan sekedar bisa dipraktekkan pada masyarakat pedesaan, tetapi bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan yang memberdayakan kearifan lokal.

Difusi pemberdayaan ekonomi berdasar kearifan lokal bisa dilihat pada aspek pemberdayaan pemasaran ekonomi rakyat tradisional di perkotaan. Misalnya, di Kota Yogyakarta dapat dilakukan kepada gerakan pemberdayaan para pelaku pasar tradisional. Para pelaku pasar tradisional diajarkan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk kepentingan pemasaran produk (Tiurmida et al., 2022). Difusi pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal juga bisa diterapkan dalam aspek

good governance untuk strategi pemberdayaan melalui kolaborasi pemerintah memberdayakan pedagang lokal, seperti program revitalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dari pemerintah untuk pemasaran pedagang Pasar Colombo, Condongcatur (Sangaji & Sugiyanto, 2021).

Sugiyanto (2020, halaman 197) menyebutkan difusi pemberdayaan ekonomi berdasarkan kearifan lokal melalui strategi pemerintah memberdayakan pedagang pasar atau lokal bisa juga dilihat pada dampak positif ekonomi bagi penduduk lokal di Kawasan Jalan Tol (Sugiyanto & Musoli, 2020). Pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal pernah diterapkan oleh pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat era imperialisme Jepang. Saat itu, pemerintah Kerajaan Yogyakarta memberdayakan rakyat membangun Selokan Mataram. Selokan Mataram menjadi infrastruktur irigasi yang mengairi persawahan rakyat sehingga bisa berproduksi dan rakyat aman dari kerja *romusha* (Sugiyanto, 2024).

Hal ini menunjukkan, bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal bisa menjadi teori yang berperan untuk memberdayakan atau membangun ekonomi kerakyatan di masa mendatang. Ekonomi kerakyatan memadukan *government* dengan pelaku ekonomi tradisional atau lokal. Pada masa mendatang, teori pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal mempunyai tantangan untuk meningkatkan status pelaku ekonomi lokal atau tradisional menjadi kelompok maskapai usaha yang mendukung perekonomian nasional (*staataccumulatie*). Teori pemberdayaan

ekonomi berbasis kearifan lokal dapat didukung oleh teori pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran sehingga mendukung *Staataccumulatie* yang berpusat pada rakyat bukan pada kelompok tuan/elit. *Staataccumulatie* berpusat rakyat yaitu teori yang diajukan oleh Mohammad Hatta dalam artikel, “Pemandangan Loear Negeri: Djepang” tanggal 29 Februari 1932 halaman 7, bahwa mengembangkan kekuatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha rakyat menjadi usaha-usaha mandiri yang bisa memberikan pemasukan kepada kas Negara (Hatta, 1932e). Misal, melalui kemampuan usaha rakyat yang sudah *establish* dapat membeli surat berharga pemerintah.

Teori Mohammad Hatta ada yang berkaitan dengan pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran. Mohammad Hatta merupakan tokoh yang andal dalam teori *government* yang memakmurkan. Wujud teorinya berpadu dengan strategi yang berhasil membentuk pemerintahan sendiri yang mandiri, yaitu pemerintahan dalam Perumahan Indonesia Merdeka.

Mohammad Hatta maju bersama Soekarno memimpin kemerdekaan dan menjadi bapak proklamator dengan bukti deklarasi proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Kahin, 1980). Mohammad Hatta menjadi bapak proklamator juga berperan sebagai pahlawan nasional, negarawan, ahli pemerintahan, ahli politik, sekaligus ahli ekonomi. Pahlawan nasional sebagai “Dermawan Besar”. Dermawan Besar berkorban untuk bangsanya. Dermawan paling besar dalam konteks negara adalah figur yang

turut aktif dalam proses pendirian negara. Mohammad Hatta menjadi Dermawan Besar karena banyak sumbangsih beliau untuk bangsa Indonesia dalam proses kemerdekaan, membentuk negara, mempunyai pemerintahan sendiri, sampai dengan mengisi kemerdekaan.

Beliau bersama Soekarno memimpin pergerakan kebangsaan Indonesia dan revolusi kemerdekaan. Beliau juga mempunyai peran dalam transisi perpindahan kekuasaan pemerintahan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia. Proses pemindahan kekuasaan tersebut memakan waktu sekitar 7 bulan pada tahun 1949 (Kahin, 1980).

Peran beliau menjadi tokoh sentral pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia serta membangun pemerintahan Indonesia dapat kita temui dalam Majalah Daulat Ra'jat. Menurut beliau bahwa membentuk negara dan pemerintahan diawali dengan strategi membangun kesadaran rakyat terhadap rasa kesatuan bangsa. Rasa ini yang kemudian menjadi azas kebangsaan. Azas kebangsaan haruslah diperkuat dengan azas kerakyatan. Azas kerakyatan merupakan semangat mengurus penghidupan rakyat, seperti kekuatan keuangan dan ekonomi rakyat melalui kekuatan pemerintahan rakyat sendiri.

Azas kebangsaan yang digabungkan dengan nama Indonesia sudah dikenal lama. Sejak majalah Daulat Ra'jat pertama kali terbit di bulan September tahun 1931, nama Indonesia sudah dikenal. Ini menjadi kemudahan bagi rakyat untuk mempersatukan diri dalam perasaan bersatu lewat azas kebangsaan Indonesia. Azas

kebangsaan ini menjadi strategi pertama rakyat menuju kemerdekaan. Kemerdekaan membentuk pemerintahan sendiri terlepas dari pemerintahan Kerajaan Belanda.

Menurut Mohammad Hatta dalam artikel, "*Koloniale Politiek: Dari Politiestaat ke "Rechts"-Staat dan Kembali Lagi ke Politiestaat*" tanggal 20 September 1931, bahwa pemerintahan Kerajaan Belanda dipimpin oleh kekuasaan raja/ratu yang absolut sehingga tidak cocok untuk pemerintahan di Indonesia (Hatta, 1931d). Pemerintahan sendiri menjadi salah satu syarat terbentuknya negara. Pemerintahan sendiri memberikan ruang luas dan waktu yang panjang untuk mengurus pemakmuran ekonomi atau hajat hidup rakyat.

Pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta yang paling pokok dapat kita lihat pada majalah Daulat Ra'jat yang terbit sejak tahun 1931-1934. Dalam majalah tersebut, pemikiran beliau yang nampak sebagai keinginan besar beliau, yaitu pada *government* sendiri untuk mengurus pemakmuran rakyat. Majalah tersebut terbit setiap bulan sebanyak tiga kali untuk kurun sepuluh harian. Majalah ini didirikan oleh beliau sejak masih di Belanda hingga beliau pulang ke tanah air.

Peneliti menganggap penting pemikiran Mohammad Hatta, baik untuk tema ekonomi, pemerintahan, dan kebangsaan, serta kerakyatan. Banyak pemikiran Mohammad Hatta yang sudah dimuat oleh berbagai penulis. Namun demikian, penulis-penulis belum banyak yang mengutip pemikiran Mohammad Hatta secara langsung pada lembaran-lembaran majalah Daulat Ra'jat. Hal ini

bisa kita lihat pada artikel berjudul, “Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif *Governmentality*” (Sahdan, 2020). Artikel ini menyebut Mohammad Hatta sebagai ahli ekonomi. Namun kutipan tersebut tidak memunculkan sumber dari Daulat Ra’jat. Artikel lainnya yang berjudul, “Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila” (Soeprapto, 2013) juga tidak mencantumkan Daulat Ra’jat sebagai referensi langsung. Artikel ini menyebutkan pemikiran Mohammad Hatta terkait pokok-pokok pikiran beliau terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang telah dirumuskan dalam Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang Mohammad Hatta sebelum penelitian ini, belum ada artikel kalau ada jumlah masih sedikit, yang memunculkan sumber langsung dari Daulat Ra’jat. Penelitian dalam artikel sebelum kami melakukan penelitian juga belum memperhatikan pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta. Padahal teori ini penting untuk menyatukan peran pemerintah bersama penghidupan rakyat dalam mengisi kemerdekaan dan melakukan pembangunan ekonomi.

Saat ini, pemahaman banyak orang tentang teori ekonomi Mohammad Hatta hanya berfokus kepada koperasi. Koperasi saat ini banyak bergerak pada model Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP melakukan kegiatan usahanya malah terjerumus kepada *profit taking* atau murni mengarah kepada pengambilan untung semata.

KSP malah mengarah kepada peran penyalur kredit tidak beda dengan perbankan konvensional.

Padahal kredit yang saat ini dilakukan menggunakan bunga menyebabkan usaha ekonomi kerakyatan tercengkeram kepada hegemoni akuntansi bukan pemberdayaan. Bunga ditentukan berdasarkan jadwal keuangan bukan berdasarkan kepada aspek hasil ekonomi kerakyatan. Jika rakyat tidak mampu membayar kredit, jalan paling buruk yang dialami adalah disitanya jaminan rakyat (Oswaldo, 2022). Jalan sita tersebut berupa pelelangan yang dalam perbankan didukung oleh Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Bunyinya, apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 1996).

Hal KSP melulu mengikuti pola perbankan tentu bertolak belakang dengan teori Mohammad Hatta terkait pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran yang menekankan kepada penguatan ekonomi kerakyatan. Fenomena faktual seperti yang menjadi fakta permasalahan bahwa koperasi belum sepenuhnya menjalankan teori Mohammad Hatta. Tentu ini harus dijawab dengan hasil penelitian yang menunjukkan

bagaimana sebenarnya kondisi baik ekonomi kerakyatan, misalnya koperasi.

Pola KSP mengikuti perbankan dapat kita lihat adanya kemampuan KSP untuk melelang jaminan debiturnya yang notabene juga anggotanya. Pelelangan jaminan debitor yang tidak mampu memenuhi pelunasan hutang/kredit dapat dilakukan oleh koperasi melalui lembaga pelelangan. Model pelunasan kesuksesan melelang aset debitor yaitu apabila hasil lelang lebih besar dari hutang debitor, sisa uang akan dikembalikan kepada debitor. Jika uang lelang tidak mencukupi pelunasan hutang, maka akan dilakukan hapus buku terhadap kekurangan pelunasan hutang debitor oleh KSP (Triesadi & Islami, 2017).

Fakta koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang berubah menjadi agen ekonomi pengekor perbankan atau bisa dikatakan sebagai kapitalisme, maka tujuan dari penelitian ini bukan sekedar untuk menunjukkan jawaban permasalahan, tetapi juga bermanfaat kepada pentingnya mengetahui kondisi yang terbaik ekonomi kerakyatan menurut Mohammad Hatta sehingga koperasi tidak terjebak kepada kondisi mengikuti pola perbankan saja, tetapi harus berperan sebagai pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Padahal koperasi yang dimaksud teori Mohammad Hatta bukan sekedar koperasi seperti yang ada pada KSP saat ini saja, tetapi lebih luas daripada itu, untuk semua kelembagaan ekonomi bagi pemberdayaan rakyat. Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi juga menyangkut entitas lembaga keuangan, lembaga produksi, lembaga distribusi, dan lembaga konsumsi.

Menjadi hal penting bahwa koperasi harus direvitalisasi agar lebih sesuai dengan teori Mohammad Hatta, maka penelitian ini menjadi menarik karena akan berimbas kepada aspek *governing*. Misalnya, mereka ulang apakah unsur lelang yang dilakukan lembaga keuangan adalah satu-satunya jalan terakhir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Tentu, hal ini harus ditunjukkan oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta tentang bagaimana seharusnya lembaga ekonomi untuk memberdayakan rakyat.

Adanya solusi dalam ujung hasil penelitian ini yang terkait dengan *governing* tentu menjadi menarik agar pemerintah lebih memberdayakan koperasi agar sesuai dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di masa depan. Oleh karena itu, menurut peneliti penting untuk membahas pemikiran Mohammad Hatta yang tercantum dalam Daulat Ra'jat. Misalnya, terkait pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran. Penelitian ini menjadi menarik karena sumber data utama yang mudah diakses berupa kumpulan Majalah Daulat Ra'jat yang ditemukan di situs online Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sehingga kita harus menjadikannya sebagai data primer dan hasil pembahasannya disajikan dalam bentuk tulisan ini. Hal ini didukung dengan kondisi perlu diteliti karena untuk memperhatikan pemikiran Mohammad Hatta harus mengutamakan pemikirannya yang ada dalam majalah Daulat Ra'jat agar menjadi perhatian publik akademis dan peneliti.

Pemikiran Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat menjadi paling bersemangat memerdekakan rakyat Indonesia sehingga penelitian ini berjudul, “Pemerintahan Berbasis Keadilan dan Kebenaran Untuk Kemakmuran Rakyat (Studi Pemikiran Mohammad Hatta)”.

B. Kajian Literatur

Pemikiran Mohammad Hatta banyak dikaji dalam penelitian. Pemikiran beliau terkait banyak hal, seperti perekonomian kerakyatan, pemerintahan, konstitusi, dan sebagainya. Literatur-literatur hasil penelitian terkait dengan Mohammad Hatta yang disebutkan dalam *literature review* ini menunjukkan adanya kesamaan topik tentang pemikiran Mohammad Hatta. Namun demikian, masih terdapat hal yang belum diteliti. Hal tersebut yaitu pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran rakyat menurut Mohammad Hatta yang dicantumkan dalam Daulat Ra'jat. Tema pemerintahan tersebut menjadi kesenjangan yang harus dibahas dalam penelitian ini. Di sini menunjukkan tujuh artikel yang mempunyai arah kemiripan dengan tema penelitian ini, namun berbeda pijakannya terkait pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran rakyat. Artikel-artikel tersebut seperti di bawah ini:

Tabel I. 1. Artikel Tentang Mohammad Hatta

No .	Judul Artikel	Jurnal	Pustaka Daulat Ra'jat	Keterangan
1	Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi di Indonesia (Asriana et al., 2018)	Jurnal Civicus Volume 18 Nomor 12 Tahun 2018	Tidak ada	Penelitian ini membahas tentang pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi hubungannya dengan kebijakan pemerintahan Indonesia saat ini.
2	Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi Dalam Kontitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta (Pulungan, 2019)	Arena Hukum Volume 12 Nomor 1 Tahun 2019	Tidak ada	Penelitian ini mengkaji tentang faktor pendukung terbentuknya pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi koperasi
3	<i>In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980)</i> (Kahin, 1980)	<i>George McT.Kahin JSTOR No. 30 (Oct., 1980), pp. 112-119</i>	Tidak ada	Artikel dari jurnal internasional ini mengkaji biografi Mohammad Hatta (Kahin, 1980).
4	Hatta and	<i>The ANNAL of</i>	Tidak ada	Artikel

No .	Judul Artikel	Jurnal	Pustaka Daulat Ra'jat	Keterangan
	<i>Co-operatives: The Middle Way for Indonesia?</i> (Higgins, 1958)	<i>the American Academy of Political and Social Science. Volume 318. Number 1. Year of 1958.</i>		menuliskan tentang pemikiran Mohammaad Hatta tentang pembangunan ekonomi nasional berupa koperasi (Higgins, 1958).
5	<i>The Essence of Mohammad Hatta's Democracy: relevance to the development of regional autonomy</i> (Jalil, 2021)	<i>Utopia y Praxis Latinoamericana . Volume 26. Number 2. Year of 2021.</i>	Tidak ada	Artikel ini menulis tentang pemikiran Mohammad Hatta terkait demokrasi. Studi pustaka yang digunakan, terutama secara <i>internal coherence</i> , yang menunjukkan bahwa prinsip demokrasi tentang kebebasan dapat dicapai lewat kondisi

No .	Judul Artikel	Jurnal	Pustaka Daulat Ra'jat	Keterangan
				sosial ekonomi dan politik hukum, seperti kesamaan status sosial dan ekonomi, dan kesamaan partisipasi yang timbal balik.
6	Hatta 's <i>Thoughts of Democracy, Social Justice, Human Rights and Democracy Economy</i> (Aditiya et al., 2019)	<i>International Journal of Education and Social Research. Volume 2. Number 3. Year of 2019.</i>	Tidak ada	Artikel ini meneliti tentang pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi, keadilan sosial, HAM, dan demokrasi ekonomi. Hasilnya bahwa pemikiran Mohammad tersebut masih relevan untuk mendukung pembentukan perundang-

No .	Judul Artikel	Jurnal	Pustaka Daulat Ra'jat	Keterangan
				undangan.
7	<i>The Conception of People's Sovereignty in Indonesia: Mohammad Hatta's Thought Approach</i> (Aulia et al., 2024)	Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Volume 9. Number 1. Year of 2024.	1 referensi terbit tanggal 20 September 1931.	Artikel ini membahas tentang Kedaulatan Rakyat menurut Pemikiran Mohammad Hatta.

Sumber: Hasil Penelusuran Peneliti Tahun 2024

Dari Tabel Artikel Tentang Mohammad Hatta dapat kita ketahui, bahwa semua literatur berbentuk artikel hasil penelitian yang dimuat dalam beberapa jurnal belum banyak memuat tulisan Mohammad Hatta yang tertulis dalam majalah Daulat Ra'jat. Hal ini dikarenakan belum banyak informasi mengenai keberadaan Daulat Ra'jat. Daulat Ra'jat tidak banyak diungkap dalam tulisan-tulisan terkait Mohammad Hatta.

Penelitian berjudul, "Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi di Indonesia" membahas tentang pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi hubungannya dengan kebijakan pemerintahan Indonesia saat ini (Asriana et al., 2018). Namun demikian, penelitian belum mengungkap data referensi secara langsung daripada Daulat Ra'jat sehingga di sinilah posisi

penelitian sekarang ini untuk mengisi kekosongan referensi Daulat Ra'jat.

Penelitian berjudul, “Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi Dalam Kontitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta”. Artikel ini membahas faktor pendukung terbentuknya pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi koperasi (Pulungan, 2019). Artikel ini belum mengungkap referensi langsung daripada Daulat Ra'ja. Kesenjangan ini diisi oleh penelitian ini dengan mengungkapkan pemikiran beliau dari referensi langsung Daulat Ra'jat.

Artikel dari pihak internasional juga membahas tentang Mohammad Hatta berjudul, “*In Memoriam: Mohammad Hatta, (1902-1980)*”. Artikel ini membahas tentang perjuangan Mohammad Hatta (Kahin, 1980). Artikel ini menyebutkan sejarah kehidupan Mohammad Hatta dari kecil hingga menjadi wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artikel hanya menyebutkan sejarah perjuangannya menjadi proklamator dan pejuang ulung membentuk negara Republik Indonesia. Artikel ini tidak mendalam membahas pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran daripada referensi langsung Daulat Ra'jat.

Peneliti internasional lainnya bernama Higgins (1958) dalam artikel berjudul, “*Hatta and Co-operatives: The Middle Way for Indonesia?*” mengkaji tentang pemikiran Mohammad Hatta tentang pembangunan ekonomi nasional berupa koperasi. Koperasi sebagai jalan tengah antara konsep ekonomi Eropa Barat, komunis, dan nasionalis (Higgins, 1958). Artikel ini tidak memuat referensi

langsung dari Daulat Ra'jat juga tidak membahas pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta.

Artikel lain tentang Mohammad Hatta berjudul, *“Essence of Mohammad Hatta's Democracy: relevance to the development of regional autonomy”*. Artikel ini memuat pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi. Demokrasi menurut Mohammad Hatta dapat dicapai dengan mewujudkan terlebih dahulu kebebasan. Kebebasan harus ditempatkan kepada semua dimensi kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik, serta hukum (Jalil, 2021). Artikel ini tidak memuat referensi langsung dari Daulat Ra'jat. Artikel ini juga tidak memuat pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta.

Artikel lain berjudul, *“Hatta's Thoughts of Democracy, Social Justice, Human Rights and Democracy Economy”*. Artikel ini membahas tentang pemikiran Mohammad Hatta yang masih relevan terhadap perundangan-undangan untuk hal demokrasi, hak azasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi (Aditiya et al., 2019). Bedanya artikel ini tidak membahas tema pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut pemikiran Mohammad Hatta. Artikel ini juga belum mengungkap referensi langsung daripada Daulat Ra'jat. Inilah ruang kosong yang diisi oleh penelitian ini.

Artikel terakhir berjudul, *“The Conception of People's Sovereignty in Indonesia: Mohammad Hatta's Thought Approach”* membahas tentang Kedaulatan Rakyat menurut pemikiran

Mohammad Hatta. Beda dengan artikel lainnya, yaitu memuat satu referensi dari Daulat Ra'jat yang terbit pada tanggal 20 September 1931 (Aulia et al., 2024). Namun, hanya satu referensi saja dari Daulat Ra'jat padahal masih ada terbitan dari tanggal lainnya yang perlu dimuat juga. Hal ini menjadi ruang kosong dari pada beberapa referensi langsung Daulat Ra'jat. Ruang kosong ini diisi oleh penelitian ini.

Inilah beberapa alasan yang menunjukkan pemikiran Mohammad Hatta tidak banyak dikutip langsung dari majalah Daulat Ra'jat juga terkait kesenjangan topik pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran. Oleh karena itu, posisi penelitian ini sangat penting untuk diteruskan pengerjaannya. Penelitian ini sebagai jawaban kesenjangan kekurangan data tulisan Mohammad Hatta dari Daulat Ra'jat yang harus banyak dikutip oleh para peneliti lainnya. Penelitian ini juga mempunyai keunggulan terkait tema yang belum banyak dikaji, yaitu pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran rakyat.

C. Fokus Penelitian

Pusat perhatian penelitian berdasarkan latar belakang dan *literature review* yaitu pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran bersama menurut pemikiran Mohammad Hatta yang tertulis pada Daulat Ra'jat.

D. Rumusan Masalah.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Apa saja prinsip daripada pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat?
- 2) Apa saja manfaat daripada pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a) untuk menunjukkan beberapa prinsip daripada pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta yang tercantum dalam Daulat Ra'jat.
- b) untuk menunjukkan beberapa manfaat daripada pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta yang tercantum dalam Daulat Ra'jat.

b. Manfaat Penelitian

- a) Mengisi kekosongan data penelitian sebelumnya yang belum mengungkap kutipan secara langsung berbagai pemikiran Mohammad Hatta yang tercantum dalam majalah Daulat Ra'jat terkait fokus pemerintahan yang berkeadilan dan berkebenaran untuk kemakmuran.
- b) Mengembangkan proses nasionalisasi atau indigenisasi pemikiran Mohammad Hatta melalui kutipan langsung dari Daulat Ra'jat.

F. Kerangka Konseptual

Fenomena yang berdampak baik atau buruk pada masyarakat akan memunculkan sebuah konsep. Misalnya, fenomena penindasan dari kelas bangsawan pada masa feodalisme terhadap masyarakat non-bangsawan memunculkan konsep hidup merdeka bagi setiap individu. Terjadi peristiwa atau fenomena runtuhnya feodalisme mulai dari sebuah revolusi Perancis pada tahun 1789. Menurut Mohammad Hatta dalam artikel, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta” tanggal 20 September 1932 halaman 2, menyebutkan feodalisme runtuh yang melahirkan gagasan liberalisme atau kapitalisme yang mempunyai jiwa setiap individu lahir merdeka (Hatta, 1932c). Di Indonesia, Mohammad Hatta dalam artikel, “Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia” tanggal 10 Desember 1932, halaman 1-2, menyebutkan bahwa fenomena penjajahan Belanda terhadap rakyat Indonesia memunculkan konsep Indonesia merdeka (Hatta, 1932f).

Revolusi Perancis dan penjajahan Belanda terhadap rakyat Indonesia adalah suatu fenomena atau peristiwa. Kemudian, fenomena Revolusi Perancis berdampak kepada munculnya konsep individu lahir merdeka dan fenomena penjajahan Belanda melahirkan konsep Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena melahirkan konsep, baik satu konsep atau beberapa konsep.

Fenomena yaitu semua hal yang dialami oleh manusia baik fisik maupun non-fisik (Asih, 2005). Menurut KBBI (2024), fenomena yaitu hal-hal yang dapat disaksikan menggunakan panca

indera manusia dan dapat pula hal tersebut diamati secara ilmiah (Bahasa, 2024a). Menurut Brouwer (1984 dalam Hasbiansyah, 2008) menyebutkan bahwa fenomena itu gejala yang dialami manusia sehari-hari dan dapat diinformasikan melalui bahasa (Hasbiansyah, 2008).

Dari fenomena melahirkan konsep. Konsep yaitu ajaran atau gagasan atau ide atau pemahaman abstrak tentang sesuatu (Tosepu, 2020). Menurut KBBI (2024) konsep adalah gagasan atau ide di luar bahasa yang digunakan sebagai alat oleh akal untuk memahami sesuatu, proses, atau obyek (Bahasa, 2024b). Konsep diartikan sebagai gagasan abstrak untuk mengkategorikan atau meklasifikasikan sesuai dengan bentuk istilah atau frase. Konsep bisa dibentuk oleh fakta. Misalnya, kebutuhan manusia terkait martabat (Effendy et al., 2023).

Kemudian, dengan adanya konsep-konsep yang ada memunculkan himpunan dan saling keterkaitan secara rinci dan sistematis sehingga memunculkan pandangan yang bisa memberikan solusi terhadap suatu peristiwa, maka muncul teori (*Teori, Konsep, Variabel, Proposisi, Dan Hubungan Antar Variabel*, 2023). Misalnya, konsep Indonesia merdeka dihimpun dengan konsep persatuan Indonesia untuk melahirkan suatu generalisasi atau prinsip umum yang melahirkan teori. Teori tersebut misalnya, teori pemerintahan menurut Mohammad Hatta. Dalam teori pemerintahan ada ikhtisar mengenai aturan umum yang harus dijalankan oleh pemerintah. Aturan tersebut bisa berupa prinsip umum yang dibuat berdasarkan kajian yang ilmiah.

Teori berarti prinsip umum yang kredibel secara ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena yang menjadi permasalahan (Tosepu, 2020). Menurut KBBI (2024) teori yaitu azas umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan atau seni (Bahasa, 2024f). Menurut Wahyono (2005), teori yaitu cara atau pendapat atau aturan melakukan sesuatu berdasarkan hal yang jelas dan ilmiah.

Lalu, setiap teori mempunyai cakupan yang luas atau terfokus. Begitu pula, konsep bisa mencakup hal yang luas atau turunannya. Setiap cakupan daripada teori atau konsep melahirkan suatu perspektif. Perspektif membimbing peneliti untuk memilih pada titik atau sudut pandang mana dia menggunakan teori atau konsep untuk memandang suatu permasalahan atau fenomena. Misalnya, perspektif kemakmuran atau perspektif kemerdekaan.

Perspektif yaitu cara melihat atau menilai sesuatu (Rejeki, 2010). Menurut KBBI (2024) perspektif yaitu sudut pandang atau cara melukiskan sesuatu berdasarkan sudut mata memandangnya (Bahasa, 2024c). B. Aubrey Fisher (1990 dalam Faizin, 2015) menyebutkan bahwa perspektif yaitu pandangan yang mendasar dari suatu keilmuan mengenai pokok persoalan. Perspektif sebagai alat pandu daripada perspsi/wawasan seseorang (Faizin, 2015).

Teori pemerintahan yang mempunyai perspektif kemakmuran tentu saja membutuhkan perspektif ekonomi. Ekonomi menurut Adam Smith (1776 dalam Safri 2003, halaman 8) yaitu ilmu yang mempelajari sarana kekayaan suatu bangsa berfokus pada sumber pemakmuran (Safri, 2018). Lalu, teori pemerintahan yang berspektif kemakmuran yang didukung ekonomi

haruslah mencantumkan teori yang cakupannya mengarah kepada keadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan turunan teori pemerintahan untuk meneropong pemikiran Mohammad Hatta yang bisa dikategorikan kepada teori pemerintahan yang bisa menekankan kegiatan pemerintahan yang menghidupkan pergaulan kehidupan ekonomi yang adil dan benar untuk memakmurkan rakyatnya. Peneliti menggunakan teori dari turunan teori pemerintahan daripada 5 G atau *Government Making*.

Dalam teori 5 G menyebutkan adanya *government*, *governing*, *governance*, *governmentality*, dan *governability* (Yunanto, 2021). *Government* yaitu aktor yang mempunyai kebijaksanaan untuk menjalankan fungsi distribusi dan proteksi kepada masyarakat. Pada sisi arena, pemerintahan adalah arena menjalankan fungsi distribusi dan proteksi kepada masyarakat. Arena tersebut bisa berupa desa atau kota atau negara (Yunanto, 2021). Contoh, pemerintahan negara, pemerintahan kota, dan pemerintahan desa. Pada hal yang seirama merujuk kepada buku berjudul, “Ilmu Negara” dari Djokosutono (1982) halaman 165-167, pemerintah yaitu *staatsorganen* atau suatu badan yang melaksanakan kekuasaan negara berdasarkan perundang-undangan (*verordeningen*) sesuai dengan tingkatan wilayahnya (Djokosutono, 1982).

Adapun wujud perbuatan pemerintahan yaitu *governing*. *Governing* menurut Yunanto (2021, halaman 13) yaitu perbuatan pemerintah yang secara politik membentuk perundang-undangan

dan peraturan, secara administratif melaksanakan perundang-undangan dan peraturan, dan secara hukum menegakkan peraturan dan perundang-undangan (Yunanto, 2021).

Menurut Mohammad Hatta dalam artikel berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)” (1932), *government* melaksanakan tiga proses *governing* tersebut harus memegang azas kerakyatan. Azas kerakyatan untuk mempersatukan rakyat Indonesia dan *government* agar mengurus penghidupan yang memakmurkan (Hatta, 1932g).

Dengan azas kerakyatan, *government* dapat melaksanakan fungsi pemerintahannya untuk kemakmuran bersama. Adapun menurut Karl Polanyi (1944 dalam Yunanto, 2021), bahwa fungsi pemerintahan dalam perspektif Karl Polanyi yaitu kemampuan pemerintah menyediakan distribusi dan proteksi kepada orang-orang dalam negara (Yunanto, 2021).

Untuk menjalankan *governing* yang berbasis keadilan dan kebenaran yang memakmurkan dibutuhkan kesatuan hubungan antar berbagai pihak yang saling tolong-menolong secara kolektif dan sama kedudukannya. Hubungan yang saling bersatu yaitu antara rakyat dengan aktor pemerintah. Karena itu, dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang yang tolong-menolong secara kolektif antara rakyat dan aktor pemerintah. Tata kelola pemerintahan ini disebut dalam teori 5G sebagai *governance*. Menurut Yunanto (2021, halaman 15) menunjukkan bahwa *governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang menjamin mulusnya hubungan interaktif antara aktor pemerintah dan rakyat (non-pemerintah) (Yunanto,

2021). Dengan *governance*, maka hubungan interaktif untuk berbagi antara pemerintah sebagai aktor pemimpin dengan rakyat sebagai aktor penguasa akan memuluskan pemerintahan yang adil dan benar untuk kemakmuran bersama atau kolektif.

Governance yang menyediakan kesempatan penuh interaksi kolektif antara aktor pemerintah dengan rakyat akan memunculkan sifat pemerintahan atau *governmentality* yang mengandalkan perspektif kemakmuran untuk memberikan *governing* yang adil dan benar bagi rakyat. *Governmentality* yang bersifat memakmurkan mempunyai orientasi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Seiring dengan sifat memerintah tersebut, *governmentality* menurut Yunanto (2021, halaman 16-17) dipahami sebagai keahlian atau pengetahuan seni berkuasa. Jika seni berkuasa tersebut didasari oleh sifat memakmurkan rakyat tentunya menghasilkan *governing* yang adil dan benar bagi rakyat.

Governmentality yang membawa sifat memakmurkan rakyat, maka peluang negara menjadi negara sukses bagi keselamatan rakyat akan tercapai. Dengan demikian, pemerintahan mempunyai kapasitas yang berperan sebagai agen kekamkuran. Kapasitas pemerintahan dipandang dalam teori 5 G sebagai *governability*.

Governability menurut Sutoro Eko Yunanto (2021) yaitu kapasitas pemerintah menjalankan otoritas dalam pemerintahan demokratis (Yunanto 2021, halaman 14). *Governability* ini yang membuat citra pemerintah menjadi negara gagal atau negara sukses. Adapun penyebab *governability* menjadi negara gagal dikarenakan

krisis demokrasi. Huntington (1975, halaman 11-13) menyatakan bahwa penyebab krisis demokrasi, yaitu adanya kelompok kepentingan dalam *decision-making system* dan perjalanan birokrasi sehingga pemakmuran ekonomi tidak berjalan (Huntington et al., 1975).

Untuk mengantisipasi adanya kelompok kepentingan yang mengganggu *governability*, maka teori 5 G menyebutkan bahwa pemerintahan membutuhkan mekanisme indigenisasi dan rekonstitusi. Indigenisasi dapat dipahami sebagai upaya ilmu pemerintahan untuk membumikan *governability*. Menurut Djokosutono (1982, halaman 9-10), indigenisasi mengarah kepada nasionalisasi pada empat hal, yaitu: (1) kesatuan, (2) kemerdekaan, (3) keaslian, dan (4) kehormatan (Djokosutono, 1982).

Kesatuan bisa kita maknai sebagai wujud dari azas kebangsaan. Kemerdekaan merupakan pengakuan kedaulatan negara. Keaslian merupakan usaha untuk mendapatkan orisinalitas yang lebih tinggi daripada adaptasi maupun adopsi. Kehormatan yaitu penggunaan jati diri dan sumber daya lokal, misalnya dalam penggunaan teori menggunakan teori anak bangsa.

Lalu, rekonstitusi yaitu perilaku pemerintahan yang mengembalikan dirinya dan menyesuaikan diri kembali sesuai dengan sistem nilai yang dibangun dalam konstitusi. Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yunanto, 2021, halaman 3).

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk meneliti pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran dari pemikiran Mohammad Hatta secara langsung dalam Daulat Ra'jat, maka data disediakan oleh teks pustaka dari majalah Daulat Ra'jat bukan oleh manusia atau kejadian sosial. Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah kegiatan penelitian untuk memperoleh pendalaman teori dan konsep sesuai dengan topik yang dipelajari sebagai dasar kerja tahapan penelitian (Sugiyanto, Surwiyanta, et al. 2022, halaman 468). Penelitian pustaka juga berarti metode mengumpulkan data berbasis informasi melalui berbagai bahan data sekunder seperti buku dan literatur. Menurut Syah (2018, halaman 133) bahwa penelitian pustaka juga berarti kajian teoritis, referensi, dan pengkajian literatur-literatur lainnya yang dikaitkan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam penelitian sosial (Syah & Hermawati, 2018). Penelitian pustaka menjadi langkah kritis untuk mendalami suatu topik atau mempertajam kajian teoritis (Zed, 2023, halaman 1). Mempertajam bisa dilakukan lewat langkah menemukan ruang kesenjangan yang belum diisi oleh penelitian sebelumnya. Penelitian pustaka membatasi kegiatan penelitian pada bahan-bahan koleksi perpustakaan atau pada koleksi tekstual tanpa kerja pengumpulan data di lapangan (Zed, 2023, halaman 2). Jenis

penelitian pustaka mengandalkan data utama atau primer yang dicari tidak di lapangan namun di data tekstual sehingga tidak ada aktivitas komunikasi dengan informan atau responden.

Penelitian pustaka memberikan informasi kepada pembaca terkait hasil penelitian yang diperoleh, hubungan penelitian dengan literatur yang ditemukan, atau mengisi kesenjangan yang belum dipenuhi oleh penelitian terdahulu. Hasil studi kepustakaan bermanfaat mengembangkan kerangka konseptual hingga ditemukan orisinalitas dalam penelitian (Sugiyanto, Surwiyanta, et al. 2022, halaman 469). Oleh karena itu, penelitian pustaka menjadi upaya penelitian yang menggunakan hal sekunder sebagai data primer, seperti buku, koran, dan literatur untuk memperdalam teori atau konsep berdasarkan tema yang diteliti. Kedalaman tersebut untuk mengisi *gap* atau kesenjangan yang didapatkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian pustaka bukan di lapangan, Menurut Zed (2023, halaman 2) pada arena faktual atau perpustakaan dalam konteks luas (Zed, 2023). Konteks luas bukan sekedar di suatu kantor perpustakaan saja, tetapi termasuk pada arena tekstual atau dokumen hasil penelitian dan pelaporan kegiatan. Lokasi penelitian terletak pada arena yang menyediakan data sekunder. Lokasi utama penelitian ini di arena internet dalam situs Khastara milik Perpustakaan Nasional.

Khastara dikunjungi sejak bulan Juli 2024. Kunjungan *online* untuk mengunduh semua *softfile* Daulat Ra'jat. Pengunduhan *softfile* menghemat waktu akses internet dan menyelamatkan data

primer penelitian, jika sewaktu-waktu internet tidak bisa diakses. Lokasi penelitian juga didukung dari arena internet, arena digital, dan arena tekstual lainnya terkait dengan fokus penelitian.

Data penelitian diutamakan dari situs Khastara. Dari situs tersebut, file Daulat Ra'jat bertipe pdf diunduh kemudian dilakukan pengumpulan, *screening*, pembacaan, inventori teori Mohammad Hatta, analisa, sintesa, dan kesimpulan. Untuk kebenaran keutuhan informasi, maka lingkungan *softfile* dilengkapi dengan *hardfile* berupa buku cetak berjudul, "Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932" dan "Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934". Kedua buku tersebut terbitan dari Yayasan Hatta tahun 2002. Posisi buku cetak sebagai pendukung dan pengontrol *softfile* pdf Daulat Ra'jat. Buku tersebut mempunyai posisi sebagai aspek validitas pengumpulan data.

C. Sumber Data.

Menurut Sugiyanto (2022, halaman 469) sumber data penelitian pustaka yaitu berbagai data digital atau tekstual seperti buku, artikel, materi kuliah, materi *website*, dan dokumen lainnya terkait tema (Sugiyanto, Surwiyanta, et al., 2022). Menurut Syah (2018, halaman 133), sumber data dapat ditemukan juga lewat upaya pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka, termasuk hasil skripsi, tesis, disertasi, laporan resmi pemerintah, dan sebagainya yang kemudian diolah dan disajikan sehingga ditemukan hal baru (*novelty*) (Syah & Hermawati, 2018).

Dalam penelitian ini, sumber data primer dari dokumen resmi pemerintah yang berupa *softfile* pdf Daulat Ra'jat yang

berasal dari situs Khastara. Lalu, sebagai pendukung berupa buku cetak Daulat Ra'jat terbitan Yayasan Hatta Tahun 2002. Untuk data sekunder berasal dari wawancara terhadap informan yang mengetahui “ruh” dari pemikiran Mohammad Hatta. Beliau bernama bapak Dr. Jalaluddin Abdul Malek. Data sekunder kedua berasal dari wawancara terhadap bapak Wiratna Tritawirasta. Beliau adalah Koordinator Alih Media Bahan Perpustakaan, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk mengetahui sejarah dokumentasi *softfile* Daulat Ra'jat. Data sekunder ketiga berasal dari literatur terkait biografi Mohammad Hatta.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan cara: mencari, membaca, dan mereview laporan penelitian dan materi pustaka (Sugiyanto, Surwiyanta, et al. 2022, halaman 469). Materi pustaka, terutama pada obyek penelitian (sesuatu yang ingin diteliti) pada informasi yang berada dalam majalah Daulat Ra'jat terkait pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta.

Teknik pengumpulan data juga dimaknai pengumpulan dokumen dari materi sekunder yang bersumber dari hasil penelitian lain dan literatur lain terkait topik penelitian (Syah and Hermawati, 2018, halaman 133-134). Teknik pengumpulan data juga dipahami sebagai metode mengumpulkan data yang berasal dari data sekunder, baik materi pustaka, hasil penelitian dan dokumen lainnya

terkait topik penelitian. Data sekunder bisa berupa tekstual atau pun non-tekstual selain *softfile* Daulat Ra'jat.

Data pustaka berupa *softfile* Daulat Ra'jat dijadikan data primer. Data primer dikumpulkan dengan cara mengetikkan kata kunci Daulat Ra'jat pada mesin pencari internet. Lalu, link Daulat Ra'jat yang muncul dicari yang terkait situs Khastara. Situs Khastara dikunjungi untuk kemudian mengunduh semua *softfile* Daulat Ra'jat. Untuk mendukung data primer tersebut, maka peneliti menggunakan buku cetak Daulat Ra'jat.

Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder. Dalam penelitian pustaka, data sekunder dikumpulkan lewat dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara terhadap informan yang mengetahui sejarah pendokumentasian *softfile* Daulat Ra'jat dalam situs Khastara. Informan tersebut berasal dari pegawai di Perpustakaan Nasional. Hal ini penting karena dibutuhkan data pendukung tentang kondisi mikro film Daulat Ra'jat dan proses preservasinya sehingga tersedia di situs Khastara. Data wawancara juga didapatkan dari informan ahli bernama bapak Dr. Jalaluddin Abdul Malek pengajar dari Universitas Kebangsaan Malaysia saat berkunjung ke Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2024. Pada pengumpulan data sekunder lewat dokumentasi dilakukan terhadap data digital maupun non-digital yang terkait dengan biografi Mohammad Hatta maupun sejarah Daulat Ra'jat.

E. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian pustaka memilih informan guna mengumpulkan data sekunder. Data sekunder berupa hal-hal terkait “ruh” pemikiran Mohammad Hatta dan sejarah *softfile* Daulat Ra’jat hingga bisa diunduh lewat situs Khastara. Ada dua informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan atau keahlian beliau terkait Mohammad Hatta dan Daulat Ra’jat di Khastara. Mereka adalah bapak Dr. Jalaluddin Abdul Malek pengajar dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan bapak Wiratna Tritawirasta sebagai Koordinator Alih Media Bahan Perpustakaan, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

F. Teknik Validasi Data

Menurut Sugiyono (2013, halaman 241), bahwa teknik validasi data menggunakan model triangulasi yaitu menemukan kebenaran atau kesesuaian makna yang dipahami penulis terhadap data (Sugiyono, 2013) dalam Daulat Ra’jat dengan pemikiran Mohammad Hatta terkait dengan pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan frase dan kalimat pemikiran Mohammad Hatta yang dihubungkan dengan variabel kunci terkait pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran. Hal ini seperti tindakan mentabulasi data yang ditemukan terkait fokus penelitian. Misalnya, ada frase pemerintahan sendiri atau frase Dewan Rakyat bisa dimasukkan pada tabel karena terkait dengan fokus penelitian pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran.

Validasi data juga dilakukan dengan memeriksa atau membandingkan keutuhan data yang disediakan oleh data primer dari *softfile* pdf Daulat Ra'jat terhadap pembacaan data pendukung. Data pendukung berupa buku cetak terbitan Yayasan Hatta Tahun 2002 berjudul, "Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932" dan "Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934". Isi dari data primer dibandingkan dengan isi data pendukung sehingga dapat ditemukan tabulasi data sesuai fokus penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Metode penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data tekstual, menganalisanya, mengkritisi, dan memutuskan. Pada fase analisa, dilakukan analisis data dengan cara, peneliti menambahkan, mengurangi, dan menggabungkan data yang didapatkan dengan pemahaman peneliti mengenai berbagai teori, konsep, dan perspektif dari berbagai literatur terkait topik. Sugiyanto (2022, halaman 469) menyebutkan cara ini merupakan kegiatan Analisis Isi (*content analysis*), yaitu menggabungkan data dengan pengalaman penulis (Sugiyanto, Surwiyanta, et al., 2022).

Untuk memperkuat kualitas data dan hasil penelitian, peneliti bisa melakukan diskusi atau wawancara pemikiran Mohammad Hatta terkait topik dengan informan yang mengetahui tentang Mohammad Hatta. Hasil wawancara juga bisa dimanfaatkan untuk menganalisa sehingga diketahui nilai-nilai tulisan Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat yang dimuat dalam situs Khastara.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Proses Digitalisasi Daulat Ra'jat

Penelitian ini mempunyai obyek penelitian (sesuatu yang ingin diteliti) pada pemikiran Mohammad Hatta tentang pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran yang berada dalam majalah Daulat Ra'jat. Untuk menggambarkan obyek penelitian, maka menyangkut penjelasan tentang proses digitalisasi Daulat Ra'jat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, struktur Majalah Daulat Ra'jat, dan Biografi Mohammad.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berhasil menyajikan Daulat Ra'jat dari bentuk mikro film menjadi bentuk *softfile* yang bisa diunduh dari situs Khastara. Hal ini merupakan tindakan lembaga pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan, bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2007).

Pada era kemerdekaan tepatnya pada tahun 1980 nama Perpustakaan Nasional sudah muncul. Menurut Nurlidiawati (2014, halaman 26), bahwa nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berasal dari konsep yang dibangun oleh Prof. Selo Sumardjan pada tahun 1978/1979. Perpustakaan Nasional ini merupakan lembaga hasil gabungan dari lembaga-lembaga bernama, “Perpustakaan Museum Pusat”; “Perpustakaan Sejarah, Politik, dan Sosial”; “Bagian Bibliografi dan Deposit” di “Pusat Pembinaan Perpustakaan”; dan “Perpustakaan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” (Nurlidiawati, 2014).

Struktur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional seperti yang tersebut pada Pasal 5, bahwa perpustakaan diisi oleh sembilan unit, yaitu: Kepala, Sekretariat Utama, Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Pembinaan Pustakawan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, 2020). Mengenai struktur perpustakaan terkait proses digitalisasi Daulat Ra'jat dapat diketahui melalui hasil wawancara sebagai berikut:

**Tabel III. 1. Struktur Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia**

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Lokasi Penelitian: Informan Perorangan (Wiratna Tritawirasta)</p> <p>Jabatan: Koordinator Alih Media Bahan Perpustakaan-Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan-Perpustakaan Nasional RI</p> <p>Waktu Wawancara: 16 Juli 2024 pukul 09:27 WIB sampai dengan +/- 10:00WIB memakan waktu +/-33 menit.</p> <p>Teknik: Wawancara secara <i>online</i> melalui Program Zoom dengan akun Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta</p> <p>Pertanyaan Peneliti: <i>“Bagaimana struktur organisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengoleksi Daulat Ra’jat?”</i></p> <p>Jawaban Informan:</p> <p><i>“Perpustakaan Nasional mempunyai 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon I:</i></p> <p><i>a. Pertama: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi</i></p> <p><i>b. Kedua: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan</i></p> <p><i>c. Ketiga: Sekretariat Utama</i></p> <p><i>Setiap koleksi masuk pada Deputi Bidang Pengembangan Bahan</i></p>	<p>Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi terdiri atas:</p> <p>a. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan;</p> <p>b. Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;</p> <p>c. Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan; dan</p> <p>d. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Pustaka dan Jasa Informasi. Koleksi bisa berupa buku, manuscript, buku langka, majalah, majalah langka, dan lain-lain juga Daulat Ra'jat. Informan menyebut Daulat Ra'jat sebagai koran.</i></p> <p><i>Daulat Ra'jat masuk ke Direktorat Deposit Dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Kemudian diolah oleh Pusat Bibliografi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Daulat Ra'jat yang berbentuk mikro film positif ditayangkan di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan Dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Mikro film positif Daulat Ra'jat lalu didigitalkan lewat ke Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan."</i></p>	

Sumber: Hasil Wawancara terhadap Bapak Wiratna Tritawirasta

Dari Tabel Struktur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat diketahui bahwa struktur perpustakaan yang terkait dengan proses digitalisasi Daulat Ra'jat adalah adanya Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Deputi ini terdiri atas: (1) Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan; (2) Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; (3) Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan; dan (4) Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.

Kemudian struktur tersebut melakukan proses digitalisasi Daulat Ra'jat dengan alur sebagai berikut:

Tabel III. 2. Proses Digitalisasi Daulat Ra'jat

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Lokasi Penelitian: Informan Perorangan (Wiratna Tritawirasta)</p> <p>Jabatan: Koordinator Alih Media Bahan Perpustakaan – Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan-Perpustakaan Nasional RI</p> <p>Waktu Wawancara: 16 Juli 2024 pukul 09:27 WIB sampai dengan +/- 10:00WIB memakan waktu +/-33 menit.</p> <p>Teknik: Wawancara secara <i>online</i> melalui Program Zoom dengan akun Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta</p> <p>Pertanyaan Peneliti dalam Daftar Pertanyaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kapan Majalah Daulat Ra'jat pertama kali masuk atau dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional?</i> 2. <i>Darimana asal Majalah Daulat Ra'jat sebelum masuk ke Perpustakaan Nasional?</i> 3. <i>Majalah Daulat Ra'jat masuk atau diinventarisir oleh Perpustakaan Nasional langsung seluruhnya atau sebagian? Mohon penjelasannya.</i> 4. <i>Saat ini bentuk fisik Majalah Daulat Ra'jat diarsipkan di mana?</i> 5. <i>Kapan Majalah Daulat Ra'jat dialihmediakan ke online dan dimuat dalam portal Khastara?</i> 6. <i>Tahapan apa yang dilalui Majalah</i> 	<p>Daulat Ra'jat diterima Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk mikro film positif.</p> <p>Tahapan penayangan koleksi Daulat Ra'jat sampai dengan online, yaitu:</p> <p>Pertama, koleksi Daulat Ra'jat berupa mikro film positif masuk ke Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan melalui mekanisme hibah pada tahun 1980an.</p> <p>Kedua, Mikro Film positif</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Daulat Ra'jat dari bentuk fisik sampai dengan bentuk online yang dimuat Khastara?</i></p> <p>Jawaban Informan:</p> <p><i>"Setiap koleksi masuk ke Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Koleksi bisa berupa buku, manuscript, buku langka, majalah, majalah langka, dan lain-lain, termasuk Daulat Ra'jat.</i></p> <p><i>Daulat Ra'jat masuk ke Direktorat Deposit Dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang berada di bawah Deputy Pertama. Direktorat menerima Daulat Ra'jat dalam bentuk Mikro Film positif tidak berbentuk fisik kertas. Direktorat bisa mendapatkan koleksi melalui pembelian, tukar-menukar, hibah, dan sebagainya. Daulat Ra'jat didapatkan Direktorat melalui hibah berbentuk mikro film positif. Kemudian diolah oleh Pusat Bibliografi Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan yang juga berada di bawah Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi. Di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan setiap koleksi, seperti Daulat Ra'jat diberikan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetak terbit, dan sebagainya yang disebut sebagai meta-data. Mikro film positif Daulat Ra'jat ditayangkan di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan Dan Pengelolaan Naskah Nusantara yang juga berada di bawah Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi. Jadi alur mikro film positif Daulat Ra'jat adalah</i></p>	<p>Daulat Ra'jat masuk ke Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan untuk diberikan meta-data berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetak terbit, dan sebagainya.</p> <p>Ketiga, Daulat Ra'jat yang berbentuk mikro film positif dan sudah mempunyai meta-data ditayangkan oleh Pusat Jasa Informasi Perpustakaan Dan Pengelolaan Naskah Nusantara.</p> <p>Keempat, mikro film</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>pertama masuk dalam koleksi Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Kedua kepada Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan untuk diolah menjadi meta-data. Ketiga masuk kepada Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Selanjutnya, jika mikro film positif Daulat Ra'jat tersebut ingin didigitalkan, maka masuk ke Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan. Jadi untuk mendigitalkan, Daulat Ra'jat prosesnya melingkupi keempat unit di bawah Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka Dan Jasa Informasi. Apabila koleksi tersebut dirasa sudah hampir punah terkait dengan rusak, dialihdigitalkan, diselamatkan secara fisik maupun informasinya kemudian koleksi tersebut masuk ke Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan, mengingat mikro film positif Daulat Ra'jat rentan terhadap kerusakan. Mikro film positif Daulat Ra'jat diterima oleh Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan pada tahun 1980an. Mikro film sebenarnya ada yang negative dan positif. Daulat Ra'jat diterima sebagai mikro film positif sehingga eksportnya bisa langsung dilihat. Mikro film positif berwarna hitam berlatar belakang putih. Untuk menayangkan mikro film, pemustaka menggunakan micro film reader. Dahulu untuk membaca Daulat Ra'jat menggunakan micro film reader di tahun sekitar 1980an. Saat itu, informan belum masuk di</i></p>	<p>positif Daulat Ra'jat ingin didigitalkan, maka masuk ke Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan sehingga bisa tersaji di OPEC tahun 2016 dan di Khastara tahun 2019.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mikro film rentan kerusakan. Kami melakukan inisiasi alih media pada tahun 2016. Alih media berbentuk digital kemudian masuk 2019 di Khastara. Sebelumnya tahun 2016 masuk di OPAC karena belum ada Khastara. Mikro film positif masuk jadi digital tahun 2016 dimunculkan di OPAC. Khastara sebagai penampil saja. Karena sebelumnya sudah muncul di OPAC.</i></p> <p><i>Kami mengumpulkan koleksi yang ada dari sejak jaman Belanda. Ada Undang-Undang simpan karya cetak karya rekam menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi). (Koleksi) sejatinya itu dikumpulkan oleh Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional mengumpulkan dan Alhamdulillah Daulat Ra'jat dihibahkan tidak tahu darimana dalam bentuk mikro film dan selanjutnya kami alihmediakan.</i></p>	

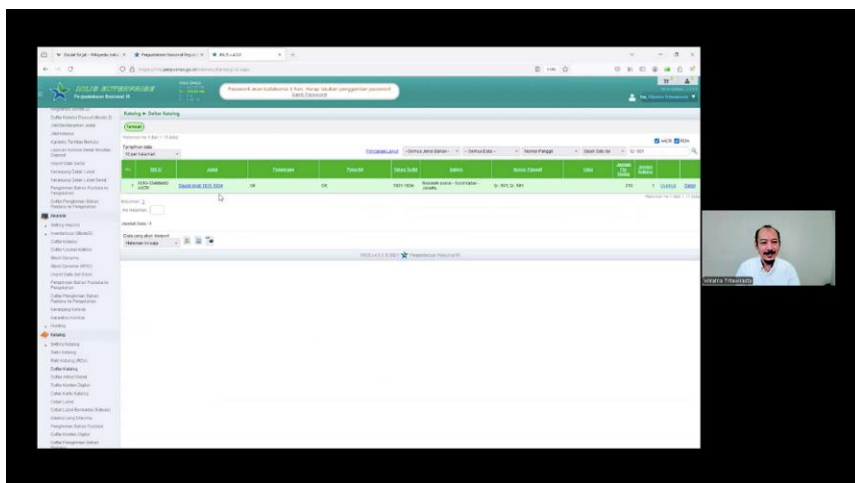
Sumber: Hasil Wawancara terhadap Bapak Wiratna Tritawirasta

Tabel Proses Digitalisasi Daulat Ra'jat menyebutkan bahwa alur Daulat Ra'jat dari mikro film positif sampai dengan disajikan secara *online* sehingga kita bisa mengunduhnya lewat situs Khastara adalah melalui empat tahapan, yaitu: (1) Mikro film positif Daulat Ra'jat masuk ke Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan melalui mekanisme hibah pada tahun 1980an, (2) Mikro Film masuk ke Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan untuk diberikan *meta-data* sehingga mempunyai judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, maupun cetak terbit, (3) Mikro film Daulat Ra'jat yang sudah mempunyai *meta-data*

ditayangkan oleh Pusat Jasa Informasi Perpustakaan Dan Pengelolaan Naskah Nusantara, dan (4) Mikro film didigitalkan, maka masuk ke Pusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaan sehingga bisa tersaji di OPAC tahun 2016 dan di Khastara tahun 2019.

Daulat Ra'jat awal terbit 20 September 1931 sampai dengan edisi terakhir 10 September 1934. Keseluruhan edisi tersebut bisa diketahui pada gambar dari *screenshoot* saat wawancara dengan informan. *Screenshoot* pada laman INLIS ENTERPRIZE. Adapun gambar seperti di bawah ini:

Gambar III. 1. Keseluruhan Edisi Daulat Ra'jat

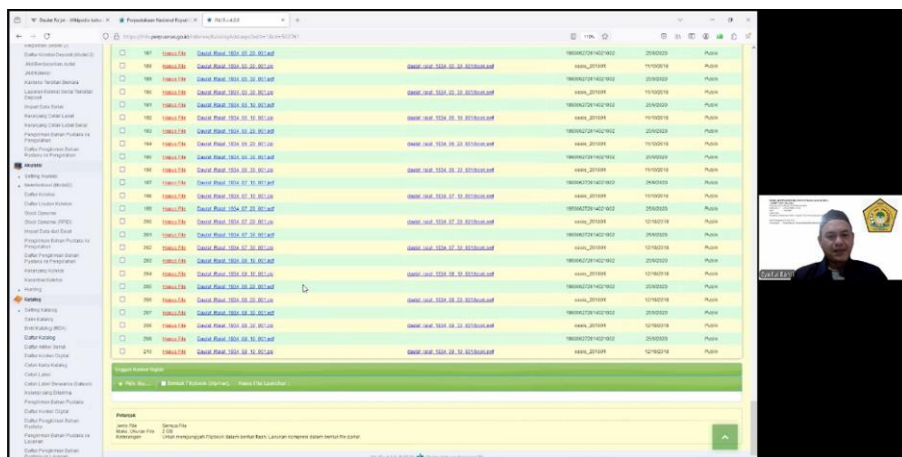


Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Wiratna Tritawirasta

Gambar Keseluruhan Edisi Daulat Ra'jat menunjukkan keberhasilan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelamatkan Daulat Ra'jat dari mikro film positif menjadi digital. Gambar menunjukkan bahwa file yang ada di internet sekitar 210 buah file. File tersebut terbagi ke dalam dua tipe yaitu

swf dan pdf. Adapun tampilan *softfile* bertipe swf dan pdf seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar III. 2. Kumpulan *Softfile* Daulat Ra'jat Dalam INLIS



Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Wiratna Tritawirasta

Gambar Kumpulan *Softfile* Daulat Ra'jat Dalam INLIS menunjukkan tipe file Daulat Ra'jat berformat swf dan pdf. Swf digunakan untuk mengikuti tren aplikasi internet yang menyajikan layanan *flipping book*, yaitu layanan program atau aplikasi membaca file gambar secara bolak-balik dan interaktif. File yang pdf bermanfaat ketika pembaca tidak mempunyai program pembaca *flipping book*. Kedua tipe sudah ada di Khastara sehingga masyarakat dan peneliti dari dalam negeri dan luar negeri dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan variatif.

Hal ini menunjukkan adanya fungsi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggiatkan penyelamatan warisan nusantara semaksimal mungkin. Misalnya, usaha penyelamatan isi Daulat Ra'jat yang berbentuk bukan fisik kertas tetapi berbentuk mikro film positif. Adapun bentuk mikro film Daulat Ra'jat adalah seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar III. 3. Mikro Film Positif Daulat Ra'jat



Sumber: Hasil Wawancara Terhadap Bapak Wiratna Tritawirasta

Dari Gambar Mikro Film Positif Daulat Ra'jat kiri atas nampak bahwa mikro film berada dalam kotak bermerk ImageLink, LE500, EPM. Dalam kotak tersebut terdapat selongsong dan strip film berwarna hitam. Pada kanan atas, terdapat gambar Selongsong

Mikro Film yang menunjukkan bahwa selongsong terdapat gulungan strip film berwarna hitam. Strip film tersebut berisi gambar-gambar Daulat Ra'jat yang terdapat pada gambar tengah bawah. Strip film menjadi inti dari mikro film positif. Jika mikro film tersebut rusak, maka gambar tidak bisa dibaca dan akhirnya hilang data tersebut. Untuk mencegah kerusakan dan kehilangan data Daulat Ra'jat, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berhasil memformatnya dalam bentuk digital yang tersaji di OPAC di tahun 2016 dan di situs Khastara sejak tahun 2019. Saat ini, kondisi strip mikro film positif Daulat Ra'jat sudah rusak dengan ciri kerusakan sudah bau dan berair. Keuntungan format digital Daulat Ra'jat, yaitu bisa diunduh di situs Khastara, bisa dibaca setiap waktu, dan bisa dicetak ke format kertas. Dengan demikian, nilai-nilai dalam Daulat Ra'jat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengunjung internet.

B. Struktur Daulat Ra'jat

Dalam wawancara yang telah disebutkan dalam Tabel Struktur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia diketahui bahwa Daulat Ra'jat berdasarkan kondisi fisik, baik ukuran maupun halaman disebut seperti koran. Kemudian, menurut Redaktur Daulat Ra'jat yang disebut dalam Tahun Ke-1 Nomor 1 tertanggal 20 September 1931 pada halaman pertama paragraf ketiga menyebutkan bahwa Daulat Ra'jat berupa majalah. Daulat Ra'jat berfungsi untuk menjelaskan asas-asas yang menjadi pedoman dalam bidang politik, ekonomi, dan pergaulan sosial (Hatta, 1931a) dan (Hatta, 2002). Oleh karena itu, penggunaan penyebutan untuk Daulat Ra'jat

menjadi sinonim untuk koran dan majalah. Daulat Ra'jat bisa disebut koran untuk kondisi fisik sekarang ini juga bisa disebut majalah untuk kategori penyebutan redaksi di masa lalu yang majalah tersebut terbit tiga kali dalam sebulan,

Data primer Daulat Ra'jat berada pada file yang diunduh dari situs Khastara. Situs Khastara dikunjungi melalui mesin pencari internet dengan mengetikkan *keyword*, “Daulat Ra'jat”. Lalu, menuju ke laman Daulat Ra'jat di situs Khastara. Daulat Ra'jat dalam Khastara berkatalog ID: 502761, Bibid: 0010-33408460, Jenis Bahan: Majalah & Surat Kabar Langka, Judul: Daulat Ra'jat 1931-1934, Penerbitan: Batavia-Centrum 1931-1934, Deskripsi Fisik: 57 cm, Subyek: Masalah Sosial-Surat Kabar-Jakarta—Surat Kabar Indonesia, Nomor Panggil: Q501, Nomor Kontrol: INLIS000000000130137, Bahasa: Indonesia, dan *Create Date*: 07 Maret 2009. Tipe *softfile* yang diunduh bisa pdf, swf, atau zip. *Softfile* tersebut divalidasi menggunakan triangulasi data terhadap *hardfile* untuk kesamaan informasi isi Daulat Ra'jat. *Hardfile* berupa data pendukung yaitu buku, “Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932” dan “Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934” yang diterbitkan Yayasan Hatta pada tahun 2002. Validasi pada tabel:

Tabel III. 3. Keutuhan Edisi Daulat Ra'jat

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
1	Daulat_Rajat_1931_09_10_001.pdf Halaman 1-12 kondisi ada yang kurang terbaca	Tahoen ke-1 No. 1. 20/09/1931	12 hlmn.	Tahoen ke-1 No. 1. 20/09/1931. Terbaca	12	-	-
2	Daulat_Rajat_1931_09_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 2. 30/09/1931	8 hlmn.	Tahoen ke-1 No. 2. 30/09/1931. Terbaca	8	-	-
3	Daulat_Rajat_1931_09_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 3. 10/10/1931	8 hlmn.	Tahoen ke-1 No. 3. 10/10/1931. Terbaca	8	-	-
4	Daulat_Rajat_1931_10_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 4. 20/10/1931	8 hlmn.	Tahoen ke-1 No. 4. 20/10/1931. Terbaca	8	-	-
5	Daulat_Rajat_1931_10_30_001.pdf	Tahoen ke-	1,8,1,2 (ada	Tahoen ke-1	10	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Ada yang kurang terbaca dan halaman ada yang terulang	1 No. 5. 30/10/1931	kurang terbaca),3,8, 1,8,1, 2 (ada yang kurang terbaca) 3-10. Total 18 hlmn.	No. 5. 30/10/1931. Terbaca			
6	Daulat_Rajat_1931_11_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 6. 10/11/1931.	8	Tahoen ke-1 No. 6. 10/11/1931. Terbaca	8	-	-
7	Daulat_Rajat_1931_11_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 7. 20/11/1931.	10	Tahoen ke-1 No. 7. 20/11/1931. Terbaca	10	-	-
8	Daulat_Rajat_1931_11_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 8. 30/11/1931.	1-7, 6-8 Total 10 halaman	Tahoen ke-1 No. 8. 30/11/1931.	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
				Terbaca			
9	Daulat_Rajat_1931_12_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 9. 10/12/1931.	8 hlmn	Tahoen ke-1 No. 9. 10/12/1931. Terbaca	8	-	-
10	Daulat_Rajat_1931_12_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 10. 20/12/1931	8 hlmn	Tahoen ke-1 No. 10. 20/12/1931 Terbaca	8	-	-
11	Daulat_Rajat_1931_12_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-1 No. 11. 30/12/1931	8 hlmn	Tahoen ke-1 No. 11. 30/12/1931 Terbaca	8	-	-
12	Daulat_Rajat_1932_01_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 12. 10/01/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 12. 10/01/1932 Terbaca	8	-	-
13	Daulat_Rajat_1932_01_20_001.pdf	Tahoen ke-	8 hlmn	Tahoen ke-II	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Terbaca	II No. 13. 20/01/1932		No. 13. 20/01/1932 Terbaca			
14	Daulat_Rajat_1932_01_30_001.pdf	Tahoen ke-II No. 14. 30/01/1932	Total 8 hlmn. Hlmn 4 ada kurang terbaca	Tahoen ke-II No. 14. 30/01/1932 Terbaca	8	-	-
15	Daulat_Rajat_1932_02_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 15. 10/02/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 15. 10/02/1932 Terbaca	8	-	-
16	Daulat_Rajat_1932_02_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 16. 20/02/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 16. 20/02/1932 Terbaca	8	-	-
17	Daulat_Rajat_1932_02_29_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 17.	1-3, 2-8 Total 8	Tahoen ke-II No. 17.	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		29/02/1932	hlmn	29/02/1932 Terbaca			
18	Daulat_Rajat_1932_03_10_001.pdf	Tahoen ke-II No. 18. 10/03/1932	Total 8 hlmn. Hlmn. 2&6 kurang terbaca.	Tahoen ke-II No. 18. 10/03/1932 Terbaca	8	-	-
19	Daulat_Rajat_1932_03_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 19. 20/03/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 19. 20/03/1932	Hlmn 3 ada kurang terbaca. Total 8 hlmn.	-	-
20	Daulat_Rajat_1932_03_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 20. 30/03/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 20. 30/03/1932 Terbaca	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
21	Daulat_Rajat_1932_04_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 21. 10/04/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 21. 10/04/1932 Terbaca	8	-	-
22	Daulat_Rajat_1932_04_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 22. 20/04/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 22. 20/04/1932	Hlm. 1 ada kurang terbaca. Total 8 hlmn.	-	-
23	Daulat_Rajat_1932_04_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 23. 30/04/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 23. 30/04/1932 Terbaca	8	-	-
24	Daulat_Rajat_1932_05_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 24. 10/05/1932	8 hlmn	Tahoen ke-II No. 24. 10/05/1932 Terbaca	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
25	Daulat_Rajat_1932_05_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 25. 20/05/1932	1-6, 3-8. Total 8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 25. 20/05/1932 Terbaca	8	-	-
26	Daulat_Rajat_1932_05_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 26. 30/05/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 26. 30/05/1932 Terbaca	8	-	-
27	Daulat_Rajat_1932_06_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 27. 10/06/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 27. 10/06/1932 Terbaca	8	-	-
28	Daulat_Rajat_1932_06_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 28. 20/06/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 28. 20/06/1932 Terbaca	8	-	-
29	Daulat_Rajat_1932_06_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 29.	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 29.	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		30/06/1932		30/06/1932 Terbaca			
30	Daulat_Rajat_1932_07_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 30. 10/07/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 30. 10/07/1932 Terbaca	8	-	-
31	Daulat_Rajat_1932_07_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 31. 20/07/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 31. 20/07/1932 Terbaca	8	-	-
32	Daulat_Rajat_1932_07_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 32. 30/07/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 32. 30/07/1932 Terbaca	8	-	-
33	Daulat_Rajat_1932_08_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 33. 10/08/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 33. 10/08/1932 Terbaca	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
34	Daulat_Rajat_1932_08_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 34. 20/08/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 34. 20/08/1932 Terbaca	8	-	-
35	Daulat_Rajat_1932_08_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 35. 30/08/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 35. 30/08/1932 Terbaca	8	-	-
36	Daulat_Rajat_1932_09_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 36. 10/09/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 36. 10/09/1932 Terbaca	8	-	-
37	Daulat_Rajat_1932_09_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 37. 20/09/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 37. 20/09/1932 Terbaca	8	-	-
38	Daulat_Rajat_1932_09_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 38.	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 38.	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		30/09/1932		30/09/1932 Terbaca			
39	Daulat_Rajat_1932_10_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 39. 10/10/1932	1, halaman 2 dan 3 hilang. 4-8. Total 6 hlmn.	Tahoen ke-II No. 39. 10/10/1932 Terbaca	8	-	-
40	Daulat_Rajat_1932_10_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 40. 20/10/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 40. 20/10/1932 Terbaca	8	-	-
41	-	-	-	Tahoen ke-II No. 41. 30/10/1932 Terbaca	8	-	-
42	Daulat_Rajat_1932_11_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 42.	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 42.	8 (2kali sama)	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		10/11/1932 Terbaca		10/11/1932 Terbaca	Total 16 hlmn.		
43	-	-	-	Tahoen ke-II No. 43. 20/11/1932 Terbaca	8	-	-
44	Daulat_Rajat_1932_11_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 44. 30/11/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 44. 30/11/1932 Terbaca	8	-	-
45	Daulat_Rajat_1932_12_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 45. 10/12/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 45. 10/12/1932 Terbaca	8	-	-
46	Daulat_Rajat_1932_12_20_001.pdf Terbaca Daulat_Rajat_1932_12_20_002.pdf	Tahoen ke-II No. 46. 20/12/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 46. 20/12/1932	8	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Terbaca			Terbaca			
47	Daulat_Rajat_1932_12_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-II No. 47. 30/12/1932	8 hlmn.	Tahoen ke-II No. 47. 30/12/1932 Terbaca	8	-	-
48	Daulat_Rajat_1933_01_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 48. 10/01/1933	1-8. Total 8 hlmn.	Tahoen ke-III No. 48. 10/01/1933 Terbaca	8	-	-
49	Daulat_Rajat_1933_01_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 49. 20/01/1933	9-16, -2- Lampiran Daulat Ra'jat No. 49 (1 hlmn.) Total 10 hlmn.	Tahoen ke-III No. 49. 20/01/1933 Terbaca	9-16. Total 8 hlmn.	-	-
50	Daulat_Rajat_1933_01_30_001.pdf	Tahoen ke-	17-24. Total	Tahoen ke-III	17-24.	-	-

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Terbaca	III No. 50. 30/01/1933	8 hlmn.	No. 50. 30/01/1933 Terbaca	Total 8 hlmn.		
51	Daulat_Rajat_1933_02_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 51. 10/02/1933	25-32. Total 8 hlmn.	Tahoen ke-III No. 51. 10/02/1933 Terbaca	25-32. Total 8 hlmn.	-	-
52	Daulat_Rajat_1933_02_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 52. 20/02/1933	33-40. Total 8 hlmn.	Tahoen ke-III No. 52. 20/02/1933 Terbaca	33-40. Total 8 hlmn.	-	-
53	Daulat_Rajat_1933_02_28_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 53. 28/02/1933	41-48. Total 8 hlmn.	Tahoen ke-III No. 53. 28/02/1933 Terbaca	41-48. Total 8 hlmn.	-	-
54	Daulat_Rajat_1933_03_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 54. 10/03/1933	49-56. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-III No. 54. 10/03/1933	49-56. Total 8 hlmn.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
						Terbaca	
55	Daulat_Rajat_1933_03_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 55. 20/03/1933	57-64. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-III No. 55. 20/03/1933 Terbaca	57-64. Total 8 hlmn.
56	Daulat_Rajat_1933_03_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 56. 30/03/1933	65-72. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-III No. 56. 30/03/1933 Terbaca	65-72. Total 8 hlmn.
57	Daulat_Rajat_1933_04_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 57. 10/04/1933	73-80. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-III No. 57. 10/04/1933 Terbaca	73-80. Total 8 hlmn.
58	Daulat_Rajat_1933_04_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-III No. 58. 20/04/1933	81-88. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-III No. 58. 20/04/1933 Terbaca	81-88. Total 8 hlmn.
59	Daulat_Rajat_1933_05_01_001.pdf	Tahoen ke-	89-92,	-	-	Tahoen ke-	89-96.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		III No. 59. 1/05/1933	93-92 ada kurang terbaca, 93-96. Total 10 hlmn.			III No. 59. 1/05/1933 Terbaca	Total 8 hlmn.
60	Daulat_Rajat_1933_05_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 60. 10/05/1933	97-104. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 60. 10/05/1933 Terbaca	97-104. Total 8 hlmn.
61	Daulat_Rajat_1933_05_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 61. 20/05/1933	105-112. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 61. 20/05/1933 Terbaca	105-112. Total 8 hlmn.
62	Daulat_Rajat_1933_05_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 62. 30/05/1933	113-120. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 62. 30/05/1933 Terbaca	113-120. Total 8 hlmn.
63	Daulat_Rajat_1933_06_10_001.pdf	Tahoen ke-	121-128.	-	-	Tahoen ke-	121-128.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Terbaca	III No. 63. 10/06/1933	Total 8 hlmn.			III No. 63. 10/06/1933 Terbaca	Total 8 hlmn. (122 kurang terbaca)
64	Daulat_Rajat_1933_06_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 64. 20/06/1933	129-136. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 64. 20/06/1933 Terbaca	129-136. Total 8 hlmn.
65	Daulat_Rajat_1933_06_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 65. 30/06/1933	137-144. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 65. 30/06/1933 Terbaca	137-144. Total 8 hlmn.
66	Daulat_Rajat_1933_07_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 66. 10/07/1933	145-149. Diulang 148-152. Total 10 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 66. 10/07/1933 Terbaca	145-152. Total 8 hlmn.
67	Daulat_Rajat_1933_07_20_001.pdf	Tahoen ke-	153-160.	-	-	Tahoen ke-	153-160.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Terbaca	III No. 67. 20/07/1933	Total 8 hlmn.			III No. 67. 20/07/1933 Terbaca	Total 8 hlmn.
68	Daulat_Rajat_1933_07_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 68. 30/07/1933	161-168. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 68. 30/07/1933 Terbaca	161-168. Total 8 hlmn.
69	Daulat_Rajat_1933_08_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 69. 10/08/1933	169-176. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 69. 10/08/1933 Terbaca	169-176. Total 8 hlmn.
70	Daulat_Rajat_1933_08_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 70. 20/08/1933	177-184. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 70. 20/08/1933 Terbaca	177-184. Total 8 hlmn.
71	Daulat_Rajat_1933_08_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 71. 30/08/1933	185-192. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 71. 30/08/1933	185-192. Total 8 hlmn.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
						Terbaca	
72	Daulat_Rajat_1933_09_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 72. 10/09/1933	193-200. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 72. 10/09/1933 Terbaca	193-200. Total 8 hlmn.
73	Daulat_Rajat_1933_09_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 73. 20/09/1933	201-208. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 73. 20/09/1933 Terbaca	201-208. Total 8 hlmn.
74	Daulat_Rajat_1933_09_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 74. 30/09/1933	209-216. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 74. 30/09/1933 Terbaca	209-216. Total 8 hlmn.
75	Daulat_Rajat_1933_10_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 75. 10/10/1933	217-224. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 75. 10/10/1933 Terbaca	217-224. Total 8 hlmn.
76	Daulat_Rajat_1933_10_20_001.pdf	Tahoen ke-	225-232.	-	-	Tahoen ke-	225-232.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Terbaca	III No. 76. 20/10/1933	Total 8 hlmn.			III No. 76. 20/10/1933 Terbaca	Total 8 hlmn.
77	Daulat_Rajat_1933_10_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 77. 30/10/1933	233-240. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 77. 30/10/1933 Terbaca	233-240. Total 8 hlmn.
78	Daulat_Rajat_1933_11_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 78. 10/11/1933	241-248. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 78. 10/11/1933 Terbaca	241-248. Total 8 hlmn.
79	Daulat_Rajat_1933_11_20_001.pdf	Tahoen ke- III No. 79. 20/11/1933	249-256. Total 8 hlmn. 255 ada yang tidak terbaca.	-	-	Tahoen ke- III No. 79. 20/11/1933 Terbaca	249-256. Total 8 hlmn.
80	Daulat_Rajat_1933_11_30_001.pdf	Tahoen ke-	257-264.	-	-	Tahoen ke-	257-264.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
	Terbaca	III No. 80. 30/11/1933	Total 8 hlmn.			III No. 80. 30/11/1933 Terbaca	Total 8 hlmn.
81	Daulat_Rajat_1933_12_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 81. 10/12/1933	265-272. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 81. 10/12/1933 Terbaca	265-272. Total 8 hlmn.
82	Daulat_Rajat_1933_12_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 82. 20/12/1933	273-280. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 82. 20/12/1933 Terbaca	273-280. Total 8 hlmn.
83	Daulat_Rajat_1933_12_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- III No. 83. 30/12/1933	281-288. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- III No. 83. 30/12/1933	281-288. Total 8 hlmn. 287-288 ada yang tidak terbaca

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
84	Daulat_Rajat_1934_01_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-IV No. 84. 10/01/1934	1-8. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-IV No. 84. 10/01/1934 Terbaca	1-8. Total 8 hlmn.
85	Daulat_Rajat_1934_01_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-IV No. 85. 20/01/1934	9-16. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-IV No. 85. 20/01/1934 Terbaca	9-16. Total 8 hlmn.
86	Daulat_Rajat_1934_01_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke-IV No. 86. 30/01/1934	17-24. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-IV No. 86. 30/01/1933 Terbaca	17-24. Total 8 hlmn.
87	Daulat_Rajat_1934_02_10_001.pdf Terbaca. Ketikan bulan Januari harusnya Februari di halaman 1	Tahoen ke-IV No. 87. 10/02/1934	25-32. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke-IV No. 87. 10/02/1934 Terbaca	25-32. Total 8 hlmn. Ketikan bulan Januari

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
							harusnya Februari hl.1
88	Daulat_Rajat_1934_02_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 88. 20/02/1934	33-40. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 88. 20/02/1934 Terbaca	33-40. Total 8 hlmn.
89	Daulat_Rajat_1934_02_28_03- 10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 89. 28/02/1934- 10/03/1934	41-48. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 89. 28/02/1934- 10/03/1934 Terbaca	41-48. Total 8 hlmn.
90	Daulat_Rajat_1934_03_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 90. 20/03/1934	49-56. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 90. 20/03/1934 Terbaca	49-56. Total 8 hlmn.
91	Daulat_Rajat_1934_03_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 91.	57-64. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 91.	57-64. Total 8

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		30/03/1934				30/03/1934 Terbaca	hlmn.
92	Daulat_Rajat_1934_04_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 92. 10/04/1934	65-72. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 92. 10/04/1934 Terbaca	65-72. Total 8 hlmn.
93	Daulat_Rajat_1934_04_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 93. 20/04/1934	73-75, 74-80. Total 10 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 93. 20/04/1934 Terbaca	73-80. Total 8 hlmn.
94	Daulat_Rajat_1934_05_01_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 94. 01/05/1934	81-88. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 94. 01/05/1934 Terbaca	81-88. Total 8 hlmn.
95	Daulat_Rajat_1934_05_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 95. 10/05/1934	89-96. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 95. 10/05/1934 Terbaca	89-96. Total 8 hlmn.

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
96	Daulat_Rajat_1934_05_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 96. 20/05/1934	97-104. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 96. 20/05/1934 Terbaca	97-104. Total 8 hlmn.
97	Daulat_Rajat_1934_05_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 97. 30/05/1934	105-112. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 97. 30/05/1934 Terbaca	105-112. Total 8 hlmn.
98	Daulat_Rajat_1934_06_10_001.pdf Terbaca. Hlmn 120 <i>landscape</i> ada yang kurang terbaca	Tahoen ke- IV No. 98. 10/06/1934	113-120. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 98. 10/06/1934 Terbaca	113-120. Total 8 hlmn.
99	Daulat_Rajat_1934_06_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 99. 20/06/1934	121-128. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 99. 20/06/1934 Terbaca	121-128. Total 8 hlmn.
100	Daulat_Rajat_1934_06_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 100.	129-136. Total 8	-	-	Tahoen ke- IV No. 100.	129-136. Total 8

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		30/06/1934	hlmn.			30/06/1934 Terbaca	hlmn.
101	Daulat_Rajat_1934_07_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 101. 10/07/1934	137-144. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 101. 10/07/1934 Terbaca	137-138, 141-142, 139-140, 143-144. Total 8 hlmn.
102	Daulat_Rajat_1934_07_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 102. 20/07/1934	145-152. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 102. 20/07/1934 Terbaca	145-152. Total 8 hlmn.
103	Daulat_Rajat_1934_07_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 103. 30/07/1934	153-160. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 103. 30/07/1934 Terbaca	153-160. Total 8 hlmn.
104	Daulat_Rajat_1934_08_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 104.	161-168. Total 8	-	-	Tahoen ke- IV No. 104.	161-168. Total 8

No.	Data Primer dari Situs Khastara			Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932		Data Buku Cetak: Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934	
	Nama File/Kondisi	Edisi	Jml. Hlmn.	Edisi/Kondisi	Jml. Hlmn.	Edisi	Jml. Hlmn.
		10/08/1934	hlmn.			10/08/1934 Terbaca	hlmn.
105	Daulat_Rajat_1934_08_20_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 105. 20/08/1934	169-176. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 105. 20/08/1934 Terbaca	169-176. Total 8 hlmn.
106	Daulat_Rajat_1934_08_30_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 106. 30/08/1934	177-184. Total 8 hlmn.			Tahoen ke- IV No. 106. 30/08/1934 Terbaca	177-184. Total 8 hlmn.
107	Daulat_Rajat_1934_09_10_001.pdf Terbaca	Tahoen ke- IV No. 107. 10/09/1934	185-192. Total 8 hlmn.	-	-	Tahoen ke- IV No. 107. 10/09/1934 Terbaca	185-192. Total 8 hlmn.

Sumber: Khastara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diunduh 3 Juni 2024.

“Daulat Ra'jat Buku 1 Tahun 1931-1932”, Yayasan Hatta, Tahun 2002.

“Daulat Ra'jat Buku 2 Tahun 1933-1934”, Yayasan Hatta, Tahun 2002.

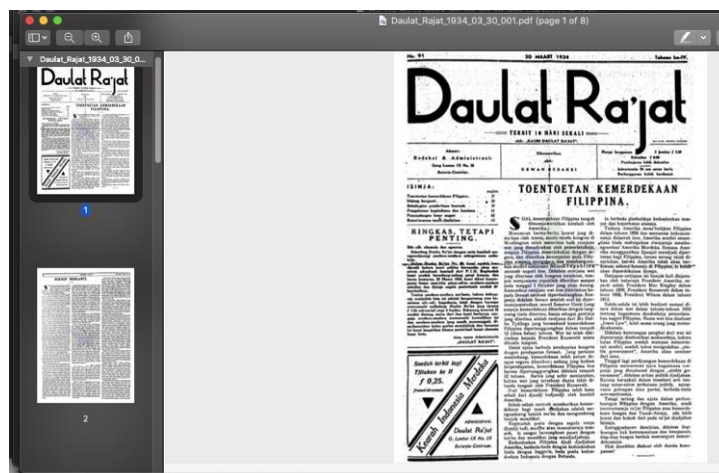
Dari Tabel Keutuhan Edisi Daulat Ra'jat diketahui Daulat Ra'jat terbit 10 hari sekali. Sebulan ada 3 edisi. Daulat Ra'jat sudah terbit 107 edisi dari tahun 1931 sampai dengan tahun 1934. Di Khastara, ada dua edisi yang hilang yaitu terbitan Tahoen Ke-II No. 41 tanggal 30 Oktober 1932 dan Tahoen Ke-II No. 43 tanggal 20 November 1932 sehingga hanya ada 105 edisi. Sedangkan, di buku terbitan Yayasan Hatta ada sebanyak 107 edisi. Buku cetak yang merangkum Daulat Ra'jat dari edisi pertama sampai dengan akhir menjadikannya layak menjadi data pendukung sehingga penelitian ini lebih tajam untuk mengungkap pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran menurut Mohammad Hatta.

Daulat Ra'jat yang berupa *softfile* maupun *hardfile* saling menutupi masing-masing kekurangan. Misalnya, menutupi kekurangan edisi dan tulisan setiap halaman. Pada *softfile* edisi Tahoen Ke-I Nomor 1 tanggal 20 September 1931 pada halaman 1-12 kondisi tulisannya sulit dibaca dapat ditutupi dengan tulisan yang ada pada *hardfile* Buku 1 tahun 1931-1932. Lalu, tulisan yang kurang bisa terbaca ada lagi pada edisi terbit: (1) *Softfile* Tahoen Ke-I Nomor 5 tanggal 30 Oktober 1931 pada halaman 1, 2, 3, dan 8; (2) *Softfile* Tahoen ke-II Nomor 14 tanggal 30 Januari 1932 pada halaman 4; (3) *Softfile* Tahoen ke-II Nomor 18 tanggal 10 Maret 1932 pada halaman 2 dan 6; (4) *Softfile* Tahoen ke-II Nomor 39 tanggal 10 Oktober 1932 pada halaman 2 dan 3 hilang; (5) *Softfile* Tahoen ke-III Nomor 59 tanggal 1 Mei 1933 pada halaman 93-96, dan (6) *Softfile* Tahoen ke-III Nomor 79 tanggal 20 November 1933 pada halaman 255. Adanya kekurangan berupa kurang atau tidak

bisa dibaca tulisannya pada beberapa halaman pada beberapa edisi dalam *softfile* dapat ditutupi oleh *hardfile* dari buku cetak dari Yayasan Hatta.

Pada umumnya terbitan Daulat Ra'jat setiap edisi terdapat 8 halaman. Adapun contoh tampilan halaman muka Daulat Ra'jat ditunjukkan pada *softfile* edisi terbit Tahoen Ke-IV Nomor 86 tanggal 30 Januari 1934, seperti pada gambar berikut:

Gambar IV Muka Daulat Ra'jat Tahoen Ke-IV Nomor 86 Tanggal 30 Januari 1934



Sumber:

<https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/502761/1>, diunduh
22 September 2024

C. Biografi Mohammad Hatta

Mohammad Hatta figur nasional yang mengutamakan pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan dalam segala aspeknya. Aspek religi dan pendidikan umum juga harus berpadu

agar bangsa Indonesia menjadi insani yang cerdas, berilmu dan berreligi. Karena tanpa religi ilmu yang digunakan menjadi buta bagi masa depan dan religi yang tanpa ilmu akan seperti insani yang lumpuh.

Religi dan pendidikan harus disatukan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang maju dan komperhensif. Hal ini nampak pada pidato beliau pada Kuliah Umum perdana di kampus Universitas Islam Indonesia pada tahun 1946. Dahulunya kampus tersebut bernama, Sekolah Tinggi Islam (Indonesia, 2018). Beliau menjadi ketua panitia pendirian Sekolah Tinggi Islam mulai tahun 1944 sampai dengan selesai.

Selain itu, beliau juga banyak menulis. Misalnya, buku berjudul, “Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia: Pidato diutjapkan pada Hari Alumni I Universitas Indonesia, pada 11 Djuni 1957”, Penerbit Fasco. Lalu, buku berjudul, “Pengantar Ke Djalan Ilmu Dan Pengetahuan” PT. Pembangunan Djakarta. Kedua buku tersebut menggambarkan betapa Mohammad Hatta sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan religi yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia yang adil, benar, dan makmur.

Menurut Fuady (2019, halaman 1), Mohammad Hatta senantiasa menjalankan kewajiban dan sunah keagamaannya. Bahkan sewaktu beliau menempuh pendidikan ekonomi di salah satu perguruan tinggi di negeri Belanda pun beliau senantiasa sholat dan berpuasa dan tidak mengikuti orang-orang lain yang minum minuman keras atau main perempuan (Fuady, 2019). Keharusan

religi disatukan dengan ilmu pengetahuan umum sudah dipahami oleh beliau sejak lama.

Menurut Fuady (2019, halaman 2) Mohammad Hatta kecil lahir dari ibu Siti Saleha di Minangkabau. Beliau mempunyai ayah bernama Muhammad Djamil bin Syaikh Abdul Rahman. Secara keturunan, beliau mempunyai kelengkapan *nasab* Mohammad Hatta bin Muhammad Djamil bin Abdul Rahman (Fuady, 2019). Menurut Imran (1981, dalam Maryono, 2015) pada halaman 24 ditemukan bahwa Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada tahun 1916, beliau menyelesaikan pendidikannya dari *Europeesche Lagere School* (ELS). Pada tahun 1919, beliau menyelesaikan Pendidikan lanjutannya di *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO), Padang. Lalu, pada tahun 1921, beliau lulus dari *Prins Hendrik School* (Maryono, 2015). Kemudian, beliau melanjutkan Pendidikan tingginya ke negeri Rotterdam, Belanda tepatnya di Perguruan Tinggi *Handels Hoogere School* atau diterjemahkan sebagai Sekolah Tinggi Ekonomi.

Awalnya beliau mengambil jurusan ekonomi perdagangan karena adanya pengalaman di dunia bisnis di masa mudanya. Lalu, di perguruan tinggi yang sama beliau pindah jurusan ke Ekonomi Kenegaraan. Menurut Maryono (2015, halaman 24) pada tahun 1932, setelah persidangannya dengan pembelaannya berjudul, “Indonesia Vrij” beliau menyelesaikan pendidikannya dengan gelar Sarjana Ekonomi kemudian kembali ke tanah air. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta (Maryono, 2015).

Menurut Azizah et. al (2021) pada halaman 76, Mohammad Hatta selain aktif di pendidikan formal, beliau juga aktif pada organisasi kemasyarakatan. Beliau pernah aktif di Gerakan *Jong Sumaterane Bond* (JBS) dan di Perhimpunan Indonesia serta majalah Indonesia Merdeka (Azizah et al., 2021, halaman 76). Menurut Kahin (1980, halaman 113), Mohammad Hatta menjabat sebagai bendahara Perhimpunan Indonesia dari tahun 1922 sampai dengan tahun 1925. Beliau menjadi ketua umum organisasi tersebut pada tahun 1930 (Kahin, 1980).

D. Mohammad Hatta Dan Daulat Ra'jat

Mohammad Hatta menerbitkan Daulat Ra'jat sejak beliau masih berada di Belanda. Menurut Utomo dan Kamal (2020, halaman 21), bahwa Daulat Ra'jat sebagai bagian pergerakan pers dan nasionalisme. Mohammad Hatta sebagai pendiri, dewan redaksi, sekaligus kontributor tulisan. Daulat Ra'jat digerakkan sekaligus diisi oleh pendiri dan kontributor, baik oleh Mohammad Hatta, Sjahrir, Bondan, Boerhanoedin, dan tokoh pergerakan lainnya (Utomo & Kamal, 2020).

Daulat Ra'jat diterbitkan oleh Mohammad Hata dengan dua periode, yaitu periode pertama ketika beliau sebagai pimpinan sekaligus sebagai kontributor tulisan ketika masih di Eropa dari tanggal awal Daulat Ra'jat terbit pada tanggal 20 September 1931 sampai dengan nomor 32 pada tanggal 30 Juli 1932 (Ra'jat, 1932b). Tanda periode pertama adalah pada halaman muka setiap periode ada tertulis, "Dikemoedikan oleh: *Commissie redaction* Pengarang di Europa: Mohammad Hatta dan Suparman". Periode kedua, ketika

beliau sudah pulang ke tanah air dari Daulat Ra'jat nomor 33 pada tanggal 10 Agustus 1932 (Ra'jat, 1932a) sampai dengan nomor 107 pada tanggal 10 September 1934. Tanda periode kedua adalah pada halaman muka setiap periode ada tertulis, "Dikemoedikan oleh: *Commissie redaction*" saja lalu sudah tidak ada tulisan Pengarang di Europa: Mohammad Hatta dan Suparman.

Adapun tulisan Mohammad Hatta yang tertera dengan namanya dalam Daulat Ra'jat adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4. Tulisan Berlabel Mohammad Hatta dalam Daulat Ra'jat

No.	Edisi	Judul
1	No. 1 tanggal 20/09/1931 Halaman 2-3	<i>Koloniale Politiek: Dari Politiestaat ke "Rechts-Staat" dan Kembali Lagi ke Politiestaat</i>
2	No. 1 tanggal 20/09/1931 Halaman 11	Soerat Terboek: P. I. dan Saja
3	No. 2 tanggal 30/09/1931 Halaman 1-2	Indonesia Dominion apa Indonesia Merdeka?
4	No. 2 tanggal 30/09/1931 Halaman 5-6	Soerat Terboek: P. I. dan Saja (Samboengan DR. No. 1)
5	No. 4 tanggal 20/10/1931 Halaman 1	Politik <i>non-cooperation</i>
6	No. 5 tanggal 30/10/1931 Halaman 1-3	Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka <i>Volksraad</i> .
7	No. 7 tanggal 20/11/1931 Halaman 1-4	Pengaroeh Koloniaal Kapitaal Di Indonesia
8	No. 8 tanggal	Toentoet Kemerdekaan Pers!

No.	Edisi	Judul
	30/11/1931 Halaman 1-3	
9	No. 8 tanggal 30/11/1931 Halaman 3	Satoe Soerat Dari SDR. Mohammad Hatta Kepada MR. Sartono (Rotterdam, 10 November 1931)
10	No. 9 tanggal 10/12/1931 Halaman 1	Pidato Mohammad Hatta – Lustrum IV Perhimpoean Indonesia di Den Haag Desember 1928
11	No. 9 tanggal 10/12/1931 Halaman 5	Motto
12	No. 10 tanggal 20/12/1931 Halaman 5	Penangkis Tjerita Bohong Dari Dr. Rivai
13	No. 11 tanggal 30/12/1931 Halaman 5-7	Tjatoer Politik Di Keliling Meja Boendar
14	No. 12 tanggal 10/01/1932 Halaman 2-3	Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra'jat
15	No. 13 tanggal 20/01.1932. Halaman 5-6	Jtara Orang Barat Bersatoe Hati
16	No. 14 tanggal 30/01/1932 Halaman 3-4	Sekali Lagi Keterangan Saja (I) Mendjawab Kritik
17	No. 14 tanggal 30/01/1932 Halaman 5	Sekali Lagi Keterangan Saja (II) Perhimpoean Indonesia Dan Saja
18	No. 15 tanggal 10/02/1932 Halaman 4-6	Politik Imperialisme Djepang Di Tiongkok
19	No. 20 tanggal 30/03/1932 Halaman 1	Motto
20	No. 26 tanggal 30/05/1932	So'al Kemerdekaan Filipina (I)

No.	Edisi	Judul
	Halaman 5-6	
21	No. 27 tanggal 10/06/1932 Halaman 3-5	So'al Kemerdekaan Filipina (II)
22	No. 30 tanggal 10/07/1932 Halaman 1	Mohammad Hatta
23	No. 34 tanggal 20/08/1932 Halaman 5-6	Interview Toean Mohammad Hatta
24	No. 36 tanggal 10/09/1932 Halaman 1	Dari Medja Redaksi
25	No. 36 tanggal 10/09/1932 Halaman 1-2	Pendirian Kita
26	No. 37 tanggal 20/09/1932 Halaman 2-5	Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia (Pidato Mohammad Hatta)
27	No. 38 tanggal 30/09/1932 Halaman 1-2	Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia (Pidato Mohammad Hatta-Samboengan)
28	No. 42 tanggal 10/11/1932 Halaman 3-4	<i>Non-Cooperatie</i> Boekan <i>Non-Actie</i> !
29	No. 45 tanggal 10/12/1932 Halaman 1-3	Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia
30	No. 46 tanggal 20/12/1932 Halaman 1-2	Politik
31	No. 45 tanggal 10/12/1932 Halaman 2-4	Keterangan Dari SDR. Moh. Hatta
32	No. 45 tanggal 10/12/1932 Halaman 7	Mohammad Hatta Dan <i>Tweede Kamer</i>

No.	Edisi	Judul
33	No. 47 tanggal 30/12/1932 Halaman 1-4	<i>Non-Cooperation</i>
34	No. 50 tanggal 30/01/1933 Halaman 1-3	Sekali Lagi <i>Non-Cooperation</i> Dan <i>Tweede Kamer</i>
35	No. 51 tanggal 10/02/1933 Halaman 1-3	Sedikit Debat Tentang <i>Non-Cooperation</i>
36	No. 63 tanggal 10/06/1933 Halaman 1- 3/121-123	Djepoen Maoe Kembali Ke Asia
37	No. 64 tanggal 20/06/1933 Halaman 1- 2/129-130	Menempoeh Zaman Perpisahan
38	No. 64 tanggal 20/06/1933 Halaman 3- 4/131-132	Aliran Baroe Dalam Koloniale Politiek?
39	No. 65 tanggal 30/06/1933 Halaman 1- 3/137-139	Kedaulatan Ra'jat Boekan Anarchie
40	No. 66 tanggal 10/07/1933 Halaman 1- 3/145-147	Nasib Kaoem dagang Ketjil Di Indonesia
41	No. 66 tanggal 10/07/1933 Halaman 6- 7/150-151	Satu Kitab Fasal Pergerakan Sekerdja
42	No. 66 tanggal 10/07/1933 Halaman 2- 3/162-163	Kedoedoekan Boeroeh Di Indonesia

No.	Edisi	Judul
43	No. 70 tanggal 20/08/1933 Halaman 1- 3/177-179	Djalan Sempit
44	No. 71 tanggal 30/08/1933 Halaman 7- 8/191-192	Satu Kitab Ketjil yang Bagoes
45	No. 72 tanggal 10/09/1933 Halaman 2- 4/194-196	Pemimpin, Madjallah Dan Anggauta Dalam Pergerakan
46	No. 73 tanggal 20/09/1933 Halaman 1/201	Oedara Politik
47	No. 75 tanggal 10/10/1933 Halaman 2- 3/218-219	Krisis-Politik Ataupun Anti Kema'moeran Ra'jat?
48	No. 75 tanggal 10/10/1933 Halaman 5- 6/221-222	<i>Collectivisme</i> Toea Dan Baroe
49	No. 76 tanggal 20/10/1933 Halaman 2- 3/226-227	<i>Associatie-Politiek</i> Lagi?
50	No. 77 tanggal 30/10/1933 Halaman 2- 4/234-236	Pemoeda Dalam Krisis
51	No. 78 tanggal 10/11/1933 Halaman 2- 3/242-243	Fasal Indonesia Merdeka
52	No. 79 tanggal 20/11/1933	Ekonomi Ra'jat

No.	Edisi	Judul
	Halaman 1-3/249-251	
53	No. 80 tanggal 30/11/1933 Halaman 2/258	Perpoetaran Soal Di Keliling Persatoean
54	No. 81 tanggal 10/12/1933 Halaman 2-3/266-267	Sikap Pemimpin
55	No. 82 tanggal 20/12/1933 Halaman 3-4/275-276	Pemimpin Dan Penghidoepannja
56	No. 83 tanggal 30/12/1933 Halaman 1-2/281-282	Anggauta Partai dan Kewadjibannja
57	No. 83 tanggal 30/12/1933 Halaman 6-8/286-288	Pokok-Pokok Diktatoer Hitler Di Djerman
58	No. 84 tanggal 10/01/1934 Halaman 2-4	Ekonomi Ra'jat Dalam Bahaja
59	No. 85 tanggal 20/01/1934 Halaman 1-2/9-10	Di Atas Segala Lapangan Tanah Air Akoe Hidoep Akoe Gembira
60	No. 85 tanggal 20/01/1934 Halaman 13-411-12	Dasar Kritik
61	No. 87 tanggal 10/02/1934 Halaman 1-2/25-26	<i>Gilden-Socialisme</i>
62	No. 87 tanggal	Di Atas Papan Tjatoer Politik Doenia

No.	Edisi	Judul
	10/02/1934 Halaman 7-8/31-32	
63	No. 88 tanggal 20/02/1934 Halaman 2-4/34-36	<i>Self-Help Dalam Emigratie</i>

Sumber: Website Khastara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

“Daulat Ra’jat Buku 1 Tahun 1931-1932”, Yayasan Hatta, Tahun 2002.

“Daulat Ra’jat Buku 2 Tahun 1933-1934”, Yayasan Hatta, Tahun 2002.

Dari Tabel Tulisan Berlabel Mohammad Hatta dalam Daulat Ra’jat diketahui bahwa tulisan yang memuat nama Mohammad Hatta ada sejumlah 63 tulisan/artikel. Semua tulisan merata pada setiap tahunnya, dari tahun 1931 sampai dengan 1934. Untuk tahun 1931 dari nomor 1-13 sejumlah 13 artikel. Untuk tahun 1932 dari nomor 14 sampai dengan 33 sejumlah 20 artikel. Untuk tahun 1933 dari nomor 34 sampai dengan 57 sejumlah 24 artikel. Hingga tahun 1934 dari nomor 58 sampai dengan 63 sejumlah 6 artikel. Semua tulisan berbahasa Indonesia ejaan lama bercampur dengan bahasa asing.

Tulisan Mohammad Hatta dan Daulat Ra’jat hanya sampai dengan tahun 1934. Hal ini dikarenakan Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan Daulat Ra’jat dilarang terbit oleh

pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1934. Menurut Kahin (1980, halaman 114), pada tahun 1934, Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda kemudian menyusul Bondan, Sutan Sjahrir, Boerhanoeddin, dan lain anggota pergerakan nasionalisme juga ditangkap. Awalnya sekitar setahun, Mohammad Hatta dihukum di penjara Glodok, Batavia/Jakarta. Lalu, beliau diasingkan ke *camp* tengah hutan bernama Tanah Merah di Boven Digul di area barat Papua Nugini. Pada tahun 1936, beliau diasingkan lagi bersama Sjahrir ke Pulau Banda Neira. Di sana beliau malah bisa bergabung dengan tokoh pergerakan nasionalisme lainnya bernama Iwa Kusumasumantri dan Dr. Tjipto Mangunkusumo (Kahin, 1980).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Bidang Pemerintahan Berbasis Keadilan Dan Kebenaran

Ahli ilmu sosial bernama Dr. Jalaluddin Abdul Malek dari Universitas Kebangsaan Malaysia saat mengunjungi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Seminar Internasional berjudul, “Komparatif *Smart City* Indonesia-Malaysia” menyebutkan tentang perhatian besar Mohammad Hatta terhadap ilmu pemerintahan. Hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:

Tabel IV. 1. Informasi Tentang Mohammad Hatta Oleh Dr. Jalaluddin Abdul Malek

No.	Data	Hasil
1	Mohammad Hatta membuat dasar penguatan pembangunan nasional untuk ekonomi dan <i>national building</i> , Awal dengan penguatan ruh atau semangat manusia menjadi merdeka dan mengisi kemerdekaan dengan kemampuan yang terbaik (Malek, 2024).	Mohammad Hatta membangun pondasi pemerintahan nasional yang merdeka menjadi negara hukum dengan pemerintahan sendiri berbasis pada semangat kebangsaan dan kerakyatan. Contoh wujudnya, yaitu tercipta daerah sebagai
2	Semangat mengisi kemerdekaan dan pembangunan yaitu adanya <i>smart city</i> . <i>Smart city</i> yaitu daerah berisi: (1) semangat manusia yang terbaik, baik	<i>smart city</i> . <i>Smart city</i> bercirikan mandiri, istimewa (spesifik), terukur (<i>measureable</i>), berprestasi (<i>achievable</i>), kekinian (<i>relevant</i>), realistik, dan

No.	Data	Hasil
	formal maupun non formal, (2) mampu menyelesaikan masalah sendiri secara mandiri yang realistis dan komparatif, komparatif bukan berarti menang atau kalah, (3) kekinian seiring dengan <i>Sustainable Development Goals</i> , dan (4) daerah yang mempunyai karakter <i>specific, measureable, achievable, relevant</i> , dan <i>time</i> (Malek, 2024).	berdaya saing.

Sumber: Dr. Jalaluddin Abdul Malek, 11 Juli 2024

Dari Tabel Informasi Tentang Mohammad Hatta Oleh Dr. Jalaluddin Abdul Malek menunjukkan Mohammad Hatta menekankan pentingnya pemerintahan yang dibangun oleh ruh atau semangat merdeka dan kemampuan terbaik. Semangat terwujud adanya asas kebangsaan dan kerakyatan. Dengan pemerintahan yang mengemban semangat tersebut, maka negara hukum terwujud dan rakyat di daerah bisa mengisi kemerdekaan dengan kemampuan terbaik (Malek, 2024). Oleh karena itu, pemerintahan menjadi bidang penting yang harus dirawat dan dikembangkan sepak terjangnya.

Mohammad Hatta memerhatikan pemerintahan karena unsur negara ini yang paling mempunyai kekuatan aktif. Menurut Yunanto (2023, halaman 11), dalam Memahami Pemerintahan terdapat lima unsur negara, yaitu: (1) pemerintah, (2) wilayah, (3) rakyat, (4) kedaulatan, dan (5) pengakuan (Yunanto, 2023). Dari

kelima unsur negara tersebut, ada dua unsur dalam negeri yang bisa menjadi actor hidup yaitu pemerintah dan rakyat. Dari keduanya, hanya pemerintah yang boleh memegang perangkat negara seperti tentara, senjata, dan kepolisian. Karenanya, pemerintah harus dikontrol agar tidak menyusahkan kehidupan rakyat dan unsur Negara lainnya. Agar tidak menyusahkan rakyat, strata pemerintah harus minimal setara dengan rakyat dan tidak boleh di atas rakyat.

Hal ini seiring dengan pendapat Joss Raadschelders (2020) seperti yang diutarakan kembali oleh Yunanto (Joss Raadschelders dalam Yunanto, 2021, halaman 5), ada tiga tingkatan kedudukan pemerintah, yaitu: (1) pemerintah di atas rakyat, (2) pemerintah bersama rakyat atau di antara individu-individu, dan (3) pemerintah dalam rakyat atau di antara rakyat (Yunanto, 2021).

Perhatian terhadap pemerintahan sebagai bidang tersendiri diutarakan oleh Mohammad Hatta dalam artikel berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra’jat Indonesia: Pidato Mohamamd Hatta (Samboengan)” yang diterbitkan oleh Daulat Ra’jat Nomor 38 tertanggal 30 September 1932 pada halaman 1 paragraf 2 sampai dengan 3 (Hatta, 1932), bahwa pemerintah harus mengikuti keadilan dan kebenaran serta berbasis kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang berbasis kepada kedaulatan rakyat yaitu pemerintahan yang tindak menindas rakyat, berhaluan suara rakyat terbanyak, dan setara dengan rakyat (Hatta, 1932g). Artikel tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel IV. 2. Artikel Krisis Doenia dan Nasib Ra'jat Indonesia:
Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)**

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p align="center">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)". Nomor 38. Tanggal 30 September 1932 (Hatta, 1932g).</p> <p>Resume:</p> <p>Kedaulatan Rakyat berbeda dengan Feodalisme, Kapitalisme, dan Sosialisme. Kedaulatan Rakyat adalah ideologi sendiri dalam sanubari rakyat Indonesia. Kedaulatan Rakyat membentuk norma pemerintahan bahwa rakyat sebagai penguasa sehingga pemerintah di bawah rakyat sehingga negara lebih bertahan lama. Kedaulatan Rakyat mempunyai ideologi ekonomi kolektivisme yaitu pengaturan pergaulan hidup untuk persamaan dalam mencapai kemakmuran atau saling memberi oportunitas. Motornya adalah koperasi. Koperasi dibangun berdasar persamaan hak dan kebersamaan. Modal yang kecil disatukan menjadi besar dalam wadah koperasi. Koperasi memunculkan koperasi lainnya. Jalinan koperasi saling memberikan santunan untuk pendidikan dan pergaulan hidup rakyat. Melalui koperasi dapat mengantisipasi krisis. Krisis bisa disebabkan: (1) kapitalisme pada area pasar yang <i>output</i> produksi tidak seiring dengan kemampuan penyerapan konsumsi dan (2) Krisis bermula dari adanya perang.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 1</p> <p>Pertahanan negeri pada rakyat. Pertahanan rakyat pada pendidikan budi pekerti, kesatuan paham, kemampuan pikir dan menimbang, dan persatuan.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Pertahanan negeri adalah persatuan rakyat.</p>
3	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 2-3</p>	<p>Halaman 1</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Jika persatuan terjalin, maka yang disempurnakan adalah penghidupan yang berkeadilan dan kebenaran. Adil dan benar yaitu tidak ada pihak yang ditindas. Persatuan Rakyat dan penghidupan adil dan benar adalah pertahanan negeri melawan imperialisme. Ideologi pemerintahan Indonesia yang cocok adalah berbasis kerakyatan bukan feodal, bukan kapitalis, dan bukan sosialis, tetapi kedaulatan rakyat. Kedaulatan Rakyat adalah pemerintahan dari daulat rakyat yang luas, tidak menindas, mengikuti rakyat banyak, dan mengikuti keadilan dan kebenaran. Inilah pertahanan Indonesia.</p>	<p>Pemerintah harus mengikuti keadilan dan kebenaran serta berasal dari kedaulatan rakyat. Pemerintahan berasal dari kedaulatan rakyat yaitu pemerintahan yang tidak menindas rakyat, berhaluan suara rakyat terbanyak, dan tidak di atas rakyat.</p>
4	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 4 Beda kedaulatan rakyat dengan <i>volk sovereigniteit</i> ala barat yaitu kemerdekaan atau kesamaan ala barat hanya bidang politik tetapi pada ekonomi penguasanya kapitalis lalu rakyat ditindas. Kalau di Kedaulatan Rakyat kemerdekaan bagi semua dan semua bidang.</p>	
5	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 3 Kolektivisme yaitu pergaulan hidup berdasar persamaan.</p>	<p>Halaman 2 Kolektivisme yaitu pergaulan hidup berdasar persamaan.</p>
6	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 7 Kolektivisme berwujud saling tolong-menolong yang sudah ada pada adat rakyat. Dapat diorganisasikan berbentuk koperasi. Koperasi sebagai kegiatan ekonomi</p>	<p>Halaman 2 Kolektivisme dapat diorganisasikan berbentuk koperasi dengan inti kolektivisme pada</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	untuk mencari laba dan memenuhi keperluan orang banyak. Satu koperasi memancing tumbuhnya koperasi lain lalu bersatu saling menyumbangkan hasil usahanya untuk menolong orang banyak, seperti mendirikan perguruan tinggi.	saling memberi kesempatan.
7	Letak: Halaman 2, paragraph 8 Koperasi sebagai motor ekonomi. Kedaulatan Rakyat menempatkan kuasa rakyat untuk menentukan sendiri keperlunya. Lalu, kepemilikan bersama atau persamaan adalah terhadap koperasi atau perusahaan bukan bersama dalam memiliki harta pribadi atau keluarga.	Halaman 2 Koperasi motor ekonomi Kedaulatan Rakyat
8	Letak: Halaman 2, paragraf 9 Ekonomi Kedaulatan Rakyat bisa berjalan dalam negara merdeka dan mempunyai hukum dan peraturan perundang-undangan yang cocok dengan rasa keadilan dan kebenaran.	Halaman 2 Ekonomi Kedaulatan Rakyat ada dalam negara merdeka. Perundangan harus cocok dengan rasa keadilan dan kebenaran.
9	Letak: Halaman 2, paragraf 10 Pemerintah adalah rakyat dalam ideologi Kedaulatan Rakyat karena rakyat adalah raja. Raja dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi.	Halaman 2 Rakyat di atas pemerintah dalam ideologi Kedaulatan Rakyat.
10	Letak: Halaman 2, paragraf 11 Negara yang maju dalam bidang pemerintahan bercirikan rakyatnya bisa memerintah, mengatur dan memperhatikan pemerintah, dan diperintah.	Halaman 2 Negara maju pemerintah dan rakyat bisa saling memerintah. Karena kedudukannya paling

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
		tidak setara.
11	Letak: Halaman 2, paragraf 12-20 Negara bertahan lama, jika rakyatnya bisa dan bersemangat ikut memerintah dan mengatur pemerintahan. Negara tak bertahan lama, jika rakyatnya hanya diperintah saja.	Halaman 2 Negara bisa bertahan lama jika rakyatnya bisa ikut memerintah.

Sumber: “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)”, Daulat Ra'jat, Nomor 38, tanggal 30 September 1932

Dari Tabel Artikel Krisis Doenia dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan), kita mengetahui pemerintahan harus dikontrol betul agar mengikuti keadilan dan kebenaran serta berasal dari kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang berasal dari kedaulatan rakyat yaitu pemerintahan yang tindak menindas rakyat, berhaluan suara rakyat terbanyak, dan setara dengan rakyat. Dengan demikian, maka kehidupan bernegara akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu: (1) pemerintahan berjalan tanpa menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) akibat tanpa menindas rakyat dan (2) menuju kemakmuran.

Pemerintahan yang tidak menindas membuat perjalanan semua bidang di suatu negara bahkan internasional menuju kepada pemakmuran semua bangsa. Seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith (Adam Smith dalam Mohammad Hatta, 1933, halaman 2, paragraf 1-3), bahwa inti atau sendi daripada pemerintahan adalah mewujudkan kepada kemakmuran bagi masing-masing bangsanya

sendiri (Hatta, 1933d). Kelengkapan kutipan Mohammad Hatta terhadap teori ekonomi Adam Smith dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 3. Artikel Menempoeh Zaman Perpisahan

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "Menempoeh Zaman Perpisahan". Nomor 64. Tanggal 20 Juni 1933 (Hatta, 1933d).</p> <p>Resume:</p> <p>Mohammad Hatta menyebutkan bahwa krisis ekonomi disebabkan peraturan negara debitur peserta perang dan dinding tarif perdagangan internasional yang tinggi. Solusi bukan saja mengatur ulang tarif bea masuk keluar perdagangan internasional. Kaum liberalis percaya solusi krisis adalah mantra <i>vrije spel maatschappelijke krachten</i> atau hak kebebasan dari kekuatan sosial atau kebebasan individu (<i>free competition</i>). <i>Free competition</i> dilakukan dengan perdagangan antar negara sesuai spesialisasi produk/jasanya. Muncul solusi utama kaum kapitalis dalam krisis yaitu penghematan pengeluaran berupa penyamaan hitungan belanja negara terhadap pendapatan negara agar pendapatan negara yang berkurang bisa seimbang dengan pengeluaran. Itu adalah hukum ekonomi statis liberalis. Hal ini harus diikuti dengan kesadaran hukum ekonomi yang dinamis. Menyamakan kondisi ekonomi makro dengan kondisi ekonomi riil. Ekonomi riil menunjukkan adanya krisis disebabkan oleh menguatnya pelaku ekonomi <i>free competition</i> menjadi kartel dan memainkan monopoli sehingga merusak ekonomi statis yang <i>free competition</i> tersebut. Wujud monopoli berupa pembatasan ekonomi misalnya: <i>autarchy</i> (kebijakan ekonomi membatasi perdagangan), proteksi, dan <i>safe guarding</i> yang malahan</p>	

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>menimbulkan kondisi ekonomi riil yang tidak pasti (kontengensi). Dengan demikian, solusi Mohammad Hatta terhadap krisis ekonomi berupa menyatukan pemahaman ekonomi liberal yang <i>free competition</i> dengan ekonomi riil yang dinamis dengan kebijakan dan praktik ekonomi dinamis yang berdasarkan kepada keadilan dan kebenaran.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 2</p> <p>Sebab krisis, ekonom liberal menyebutkan, dikarenakan oleh: (1) peraturan pembayaran hutang perang yang amat banyak, (2) politik dinding tarif tinggi di suatu negara, dan (3) persaingan ekonomi berupa saling mencegah keluar masuk barang suatu negara.</p>	
3	<p>Letak: Halaman 2 paragraf 1-3</p> <p>Adam Smith, mengutarakan, bahwa <i>free competition</i>—persaingan merdeka—mendatangkan kebaikan kepada umat dunia yang menjadi semboyan kapitalisme.</p> <p>Persaingan merdeka itu menjadi sendi kemakmuran, walaupun kemakmuran yang sempurna tidak akan didapat. Persaingan merdeka berupa: (1) setiap orang bekerja sesuai keahliannya juga setiap negeri menghasilkan barang yang mudah diperbuatnya sesuai dengan keadaan negerinya. (2) menyatukan kapitalis besar-besar sehingga muncul <i>trust</i>, kartel, <i>concern</i> yang memonopoli pasar bersifat nasional dan internasional. (3) menimbulkan <i>autarchie</i>, <i>protectie</i>, <i>safeguarding</i>, <i>contingenteering</i>.</p> <p>Perekonomian semacam itu sudah liwat di belakang kita. Waktu sekarang ini</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Adam Smith, mengutarakan, bahwa <i>free competition</i>—persaingan merdeka—mendatangkan kebaikan kepada umat dunia.</p> <p>Persaingan merdeka itu menjadi sendi kemakmuran dan semboyan kapitalisme.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	berpolitik melihat ke depan, memperhatikan segala kodrat dinamika dan mempelajari susunan baru. Perjalanan kita menuju masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran.	

Sumber: “Menempoeh Zaman Perpisahan”, Daulat Ra’jat, Nomor 64, 20 Juni 1933.

Dari Tabel Artikel Menempoeh Zaman Perpisahan, Mohammad Hatta menunjukkan kutipannya (Adam Smith dalam Mohammad Hatta, 1933, halaman 2, paragraf 1-3), bahwa inti daripada pemerintahan adalah mewujudkan kepada kemakmuran bagi masing-masing bangsanya sendiri. Hal ini dapat dicapai, jika suatu bangsa menerapkan *free competition* atau kegiatan ekonomi dengan persaingan sempurna (Hatta, 1933d). Terdukung pula bahwa menurut Adam Smith, di tahun 1783 (Smith, ss2007, halaman 160), kemajuan ekonomi dari suatu negara bahwa pemerintahannya dapat mengadakan standar upah tenaga kerja, seperti Inggris Raya, akan menuju kemakmuran (Smith, 2007).

Adam Smith dan Mohammad Hatta mempunyai persamaan bahwa pemerintahan harus menjalankan kinerjanya untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Bedanya, Mohammad Hatta berpikiran bahwa kemakmuran untuk semua rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan Adam Smith mengarah kepada kemakmuran dalam negeri saja sehingga memungkinkan adanya imperialisme terhadap rakyat di luar negeri.

Pemerintahan paling berperan menentukan kemakmuran. Oleh karena itu, pemerintahan harus masuk dalam suatu bidang tersendiri dan keilmuan tersendiri. Di sinilah letak urgensi ilmu pemerintahan. Urgensinya yaitu berupa menjaga pemerintah agar tetap di jalur kebenaran dan keadilan untuk membawa rakyatnya kepada kemakmuran.

Mohammad Hatta (1932, halaman 2-3) menekankan bahwa pemerintahan dapat mencapai kemakmuran, jika ada pengawasan tentang arah keuntungan ekonomi yang bukan untuk penguasaan menindas atau untung semata, tetapi kepada pemakmuran bersama (Hatta, 1932a). Kemakmuran yang diajukan Mohammad Hatta berlaku untuk dalam negeri dan luar negeri sehingga tanpa penjajahan. Pemerintahan yang tidak menindas dan membawa rakyat kepada pemakmuran bersama pada artikel di bawah ini:

Tabel IV. 4. Artikel Demokrasi Asli Indonesia

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra'jat". Nomor 12. Tanggal 10 Januari 1932 (Hatta, 1932a),</p> <p>Resume:</p> <p>Demokrasi asli Indonesia ada kemiripan dengan demokrasi asing. Bedanya bukan pada kemerdekaan individu, tetapi kepada kemerdekaan rakyat. Demokrasi asli Indonesia yang dikembangkan adalah Daulat Rakyat bukan Daulat Tuanku. Daulat Tuanku juga demokrasi asli Indonesia, tetapi tidak</p>	

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>layak dilanjutkan karena bersifat menindas demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mempunyai tiga karakter, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi asli berdasar cita-cita luhur rakyat Indonesia sejak dulu 2. Ada tata cara umum hak rakyat mengeluarkan pendapat 3. Koperasi sebagai wujud riil pemerintahan sendiri Indonesia dengan teknik tolong-menolong. 	
2	<p>Letak: Halaman 2-3</p> <p>Artikel ini muncul sebagai tanggapan terhadap kritik yang mengenai gerakan Mohammad Hatta tentang demokrasi asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat. Menurut Mohammad Hatta, demokrasi asli Indonesia sudah dinyatakan oleh beliau pada tahun 1928 di Belanda dalam Indonesia <i>Vrij</i>. Ada 3 hal yang dikemas untuk konsep demokrasi Indonesia dalam Perumahan Indonesia Merdeka, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi asli berdasar cita-cita luhur rakyat Indonesia sejak dulu 2. Ada tata cara umum hak rakyat mengeluarkan pendapat 3. Koperasi sebagai wujud riil pemerintahan sendiri Indonesia dengan teknik tolong-menolong <p>Demokrasi mempunyai sendi yaitu pergaulan hidup rakyat. Pergaulan hidup yang asli harus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Pergaulan hidup harus ditingkatkan dalam wujud Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat ada kesamaan dengan penamaan <i>volkssoeveriniteit</i> Eropa. Bedanya adalah Kedaulatan Rakyat di Eropa berdasar kebebasan individu, sedangkan Kedaulatan Rakyat Indonesia berdasarkan mufakat bersama.</p>	<p>Halaman 2-3</p> <p>Melanjutkan perekonomian berbasis natural agraris menuju pengikatan ekonomi dunia dengan dasar produksi hasil rakyat dalam perusahaan rakyat yang tolong-menolong dengan wujud perusahaan koperasi.</p> <p>Demokrasi rakyat harus mengikuti keperluan dan kemauan rakyat untuk pemakmuran bersama.</p> <p>Demokrasi asli</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Di Indonesia, demokrasi asli ada dua yaitu demokrasi rakyat yang terdapat di desa-desa dengan tipe rapat untuk menentukan mufakat ada juga yang berwujud sepakat. Namun demikian, demokrasi asli bernama demokrasi rakyat masih tertindih oleh demokrasi tuanku. Tuanku merujuk kepada kaum raja, keluarga raja, keluarga bangsawan, dan keluarga raja-raja kecil. Jadinya Kedauletan Rakyat merujuk ke Indonesia asli tidak mengambil keduanya cukup Daulat Rakyat dengan menghapus Daulat Tuanku. Kedauletan Rakyat yang dibangun kelompok Mohammad Hatta untuk Perumahan Indonesia Merdeka adalah melanjutkan Daulat Rakyat berbasis pergaulan hidup rakyat.</p> <p>Daulat Rakyat dari masing-masing desa bersusun-susun atau berjunjung-junjung bergabung berwujud Dewan Rakyat dari desa ke pusat.</p> <p>Demokrasi yang berdasar pergaulan hidup rakyat juga akan sesuai dengan perekonomian Indonesia. Artinya meningkatkan atau melanjutkan perekonomian berbasis natural agraris menuju pengikatan ekonomi dunia dengan dasar produksi hasil rakyat dalam perusahaan rakyat yang tolong-menolong dengan wujud perusahaan koperasi.</p> <p>Jadi demokrasi rakyat harus berpadu dengan demokrasi ekonomi karena demokrasi rakyat mengikuti pergaulan hidup rakyat. Penghasilan dan perusahaan harus mengikuti keperluan dan kemauan rakyat. Harus ada pengawasan tentang arah keuntungan</p>	<p>bernama Daulat Rakyat masih tertindih oleh Daulat Tuanku.</p> <p>Kedauletan Rakyat merujuk ke demokrasi Indonesia asli mengambil Daulat Rakyat dengan menghapus Daulat Tuanku.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	ekonomi yang bukan untuk penguasaan menindas atau untung semata, tetapi kepada pemakmuran bersama.	

Sumber: “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra'jat”, Daulat Ra'jat, Nomor 12, tanggal 10 Januari 1932.

Dari Tabel Artikel Demokrasi Asli Indonesia dapat kita ketahui bahwa Kedaulatan Rakyat mengarah kepada kemakmuran bersama. Kemakmuran bersama untuk dalam negeri dan luar negeri. Menurut Mohammad Hatta (1932), Kedaulatan Rakyat mengikuti adat istiadat yang berasal dari tradisi rakyat Indonesia, yaitu melanjutkan Daulat Rakyatku dan meninggalkan Daulat Tuanku (Hatta, 1932a).

Menurut Mohammad Hatta (1932) Daulat Tuanku juga model tradisi lama Indonesia berupa model pemerintahan yang penguasa dan pemimpinnya adalah kaum bangsawan, sedangkan rakyat tidak punya peran dan tidak boleh berperan mengatur pemerintahan. Oleh karena itu, Daulat Tuanku harus ditinggalkan karena punya sifat menindas dan di atas rakyat (Hatta, 1932a).

Ilmu pemerintahan juga menjadi amanat Mohammad Hatta. Pemerintahan harus berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran bersama. Basis keadilan harus menjadi sistem nilai pemerintahan seperti halnya yang diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini juga didukung oleh artikel yang ditulis oleh Yunanto (2021,

halaman 1), bahwa ilmu pemerintahan berorientasi kepada *government making* yang menekankan cita-cita luhur bahwa pemerintahan harus berbasis kepada keadilan (Yunanto, 2021).

Dalam sub-bab ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemerintahan harus mempunyai prinsip utama, yaitu pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran. Prinsip ini menjadi sistem nilai pemerintahan seperti amanat Sila Kelima Pancasila. Prinsip utama ini dapat kita temukan dalam halaman 1 artikel berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra’jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)” pada Daulat Ra’jat Edisi Nomor 38 tertanggal 30 September 1932. Adapun manfaatnya yaitu mewujudkan kemakmuran bersama. Manfaat ini dapat kita temukan pada artikel berjudul, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra’jat” dalam Daulat Ra’jat Edisi Nomor 12 pada tanggal 10 Januari 1932.

Kemudian, pemerintahan harus dibangun secara *self-government*. *Self-government* merupakan niatan menempatkan pemerintah sesuai dengan ideologi pemerintahan atau nilai yang telah hidup di sanubari rakyat selama ini.

B. Pemerintahan Sendiri Dan Daulat Rakyat

Pemerintahan sendiri menjadi pertahanan rakyat untuk mengurus penghidupan rakyat dalam negara yang merdeka. Melalui pemerintahan sendiri, rakyat bisa diberikan pelayanan pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran bersama. Menurut Mohammad Hatta (1932, halaman 1), bahwa pemerintahan menjadi kesatuan lembaga pertahanan rakyat (Hatta, 1932g), atau aktor pertahanan rakyat

yang berbasis keadilan dan kebenaran (Hatta, 1932g) untuk mewujudkan kemakmuran bersama (Hatta, 1932a). Pemerintahan Sendiri dikenal sebagai pemerintahan baru. Mohammad Hatta menyebutkan syarat negara berdaulat dalam artikel di bawah ini:

Tabel IV. 5. Sedikit Pemandangan tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka <i>Volksraad</i>". Nomor 5. Tanggal 30 Oktober 1931 (Hatta, 1931c).</p> <p>Resume:</p> <p>Kekuasaan legislatif ada dua, yaitu (1) berkuasa di atas eksekutif dan (2) kekuasaannya di bawah eksekutif. Pertama, adalah Dewan Rakyat yang dipilih dalam pemilu dalam negara yang merdeka seperti sistem pemerintahan parlementer. Kedua, Dewan Rakyat sebagai Dewan Perwakilan pada tanah jajahan yang tidak bisa menuntut atau menjatuhkan eksekutif. Idealnya adalah Dewan Rakyat yang berkuasa lebih tinggi daripada eksekutif karena dewan mewakili Kedaulatan Rakyat. Dewan seperti ini ada pada negara yang merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 1 paragraf 2</p> <p>Negara bersistem pemerintahan parlementer mempunyai kekuasaan Dewan Rakyat yang besar sehingga pemerintahan baru tak dapat berdiri, jika tak dapat kepercayaan dewan.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Sistem pemerintahan parlementer mempunyai Dewan Rakyat yang bisa membentuk pemerintahan baru.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
3	<p>Letak: Halaman 1 paragraf 3 dan 4</p> <p>Jika haluan politik dewan tidak sepadan dengan pemerintah, maka dewan bisa dibubarkan. Pemilihan umum diadakan kembali. Jika masih tidak ada persamaan politik antara dewan dan eksekutif, maka eksekutif harus diganti yang baru. Ini hanya berlaku pergantian satu kali jika terjadi perselisihan antara legislatif dan eksekutif. Setelah itu, harus kekuasaan legislatif yang dimenangkan karena dewan mewakili rakyat.</p> <p>Hal ini didukung oleh adat yang diadakan yang tidak tertulis di hukum azas. Adat tersebut bisa juga dibuat tertulis dalam hukum azas seperti Hukum Azas kerajaan Jerman tahun 1919.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Kekuasaan legislatif harus dimenangkan daripada eksekutif karena dewan mewakili rakyat. Hal ini didukung oleh adat yang diadakan dan ditulis dalam hukum azas.</p>
4	<p>Letak: Halaman 2 paragraf 1</p> <p><i>Volksraad</i> yang saat Indonesia terjajah, maka <i>Volksraad</i> bukan dewan rakyat. Karenanya, pidato <i>Gouverneur General</i> Belanda tidak berpengaruh kepada tuntutan kepercayaan dari <i>Volksraad</i>. Pemerintahan baru tidak bisa dituntut atau diturunkan oleh <i>Volksraad</i> karena pemerintahan baru sudah otomatis dalam hukum kolonial yang ditetapkan Menteri Daerah Penjajahan dari Den Haag, Belanda.</p>	<p>Halaman 2</p> <p><i>Volksraad</i> yang saat Indonesia terjajah, maka <i>Volksraad</i> bukan Dewan Rakyat.</p>
5	<p>Letak: Halaman 2 paragraf 8-10</p> <p>Perjuangan mencapai kemerdekaan adalah perjuangan politik terkait perjuangan tujuan dan azas. Pemerintah kolonial yang diwakili oleh <i>Vollksraad</i> dan G. G. tidak mungkin</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Di tahun 1844, Thorbecke mengumandangkan era liberalisme atau kemerdekaan</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	sama dengan pihak yang memperjuangkan azas kerakyatan dan tujuan kemerdekaan. Di tahun 1844, Thorbecke mengumandangkan era liberalisme atau kemerdekaan <i>privat</i> di Belanda dan 1848 diterima di Belanda.	<i>privat</i> di Belanda dan 1848 diterima di Belanda.
6	Letak: Halaman 2 paragraf 11 Teori Marxisme yang menyebutkan perkembangan kemajuan jaman dijalani dari feodalisme ke kapitalisme atau liberalisme kemudian menjadi sosialisme yang juga berhasil di Eropa.	Halaman 2 Perkembangan kemajuan jaman dijalani dari feodalisme ke kapitalisme atau liberalisme kemudian menjadi sosialisme.
7	Letak: Halaman 3 De Jonge dan G. G. Hindia Belanda belum memahami Thorbecke dan gerakan liberalis sosialis di Eropa 1844-1848 sehingga mengacuhkan gerakan nasionalisme Indonesia merdeka. Bahwa pemerintahan baru harus diraih oleh suatu bangsa lewat kemerdekaan.	Halaman 3 Pemerintahan baru harus diraih oleh suatu bangsa lewat kemerdekaan.

Sumber: “Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*”, Daulat Ra’jat, Nomor 5, tanggal 30 Oktober 1931.

Dari Tabel Artikel Sedikit Pemandangan tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*, bahwa pemerintahan yang bisa berbasis kepada keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan kemakmuran bersama adalah pemerintahan sendiri. Menurut Mohammad Hatta (1931, halaman 3) pemerintahan sendiri bisa

dicapai oleh bangsa merdeka. Pemerintahan sendiri mempunyai Dewan Rakyat yang mengemban kepercayaan rakyat dan mempunyai posisi lebih tinggi daripada eksekutif (Hatta, 1931c). Jadi pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan pada bangsa merdeka. Pemerintahan harus di bawah rakyat. Wujudnya yaitu eksekutif di bawah legislatif dan legislatif di bawah rakyat karena dewan rakyat mengemban kepercayaan rakyat.

Teori Mohammad Hatta yang menyebutkan bahwa pemerintah harus berada di bawah rakyat agar rakyat mempunyai keselamatan hidup yang dijamin oleh perlakuan pemerintah yang adil dan benar serta memakmurkan. Jadinya pemerintah berada di bawah rakyat mirip dengan teori yang diajukan oleh Raadschelders (Joss Raadschelders dalam Yunanto, 2021, halaman 5), bahwa pemerintah yang mengalami fase modern adalah pemerintah dalam tahap ketiga yaitu pemerintah di antara rakyat atau dalam masyarakat (Yunanto, 2021). Namun, mempunyai perbedaan bahwa pemerintah dalam masyarakat masih bisa menentang rakyat karena memposisikan setara dengan rakyat, sedangkan pada teori pemerintahan Mohammad Hatta bahwa pemerintah yang berada di bawah rakyat selalu melayani rakyat. Ini sedikit perbedaannya dalam konteks teoritis. Pemerintahan sendiri yang sesuai dengan adat lama di Indonesia adalah pemerintahan yang di bawah rakyat dengan prinsip Daulat Rakyatku bukan Daulat Tuanku (Hatta, 1932a). Kebutuhan pemerintahan sendiri disebutkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV. 6. Artikel Pengaruh Kolonial Kapital Di Indonesia

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "Pengaruh <i>Kolonial Kapital</i> Di Indonesia". Nomor 7. Tanggal 20 November 1931 (Hatta, 1931b).</p> <p>Resume:</p> <p>Rakyat Indonesia masuk kolonialisme kapitalisme dunia bermula dari masuknya OIC/VOC sebagai usaha ekonomi Belanda dengan model penjajahan dan kekerasan senjata. Setelah itu, masuk pemerintahan kerajaan kolonial Belanda dengan kekuatan pemodal-kapitalis partikelir. Usahanya dengan kekerasan dan senjata menjaga perusahaan pertanian untuk kepentingan ekspor. Rakyat dijadikan buruh dan lahan disewa untuk ditanami produk ekspor. Kapitalis Belanda tidak membuat rakyat makmur. Rakyat hanya cukup dengan hasil beberapa sen sehari sedangkan hasil besarnya masuk kas Negara Belanda. Kas Negara Belanda semakin besar ditambah lagi pemasukan lewat pajak ekspor, cukai impor, pajak transportasi, dan pajak perniagaan. Saat krisis ekonomi dunia melanda, rakyat semakin sulit.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 1 paragraf 1 dan 2</p> <p>Pidato G. G. De Jonge menampakkan politik kolonial untuk mensukseskan perusahaan-perusahaan besar Belanda. Perusahaan tersebut mempekerjakan buruh rakyat yang hasilnya dikirim ke Belanda lalu Belanda mendapatkan hasil dari ekspor. G. G. Belanda menunjukkan, jika perusahaan tersebut krisis, maka rakyat pun ikut krisis. Itu propaganda saja</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Pemerintah kolonial hanya mensukseskan perusahaan besar Belanda dengan mengelabui dan menindas rakyat.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	untuk meraih hati rakyat.	
3	Letak: Halaman 1 paragraf 3-4 Perusahaan besar Belanda Indonesia bergerak pada produksi kopi, gula, teh, obat kina, dan sebagainya yang dibutuhkan dunia. Investor kulit putih yang datang ke Hindia Belanda ditunjukkan proses produksi tersebut dan dipropagandai, jika perusahaan tersebut berhenti beroperasi karena gerakan kemerdekaan Indonesia, maka Barat tidak dapat lagi memperoleh produk ekspor yang dibutuhkan tersebut. Karenanya, perusahaan tersebut tidak mau meninggalkan Indonesia karena penjajahan Belanda di Hindia Belanda adalah sumber yang menghasilkan untung besar.	Halaman 3-4 Perusahaan imperialis tidak akan meninggalkan penjajahannya karena menghasilkan untung besar.
4	Letak: Halaman 1 paragraf 5 Pemerintah kolonial seperti <i>Politiestaat</i> dan " <i>Rechts</i> "- <i>Staat</i> , pegawai kantornya diangkat oleh bangsa asing. Tujuannya untuk mengamankan kolonialisme. Indonesia dulu dikuasai VOC lalu pemerintah kerajaan Belanda lewat <i>cultuur stelsel</i> lalu bergilir kepada kaum kapitalis partikelir.	Halaman 1 paragraf 5 Pemerintah kolonial seperti <i>Politiestaat</i> dan " <i>Rechts</i> "- <i>Staat</i> pegawai kantornya diangkat oleh bangsa asing.
5	Letak: Halaman 2 paragraf 2 Ekonomi rakyat akan tergantung negara penjajah kalau masih belum merdeka. Kunci kemakmuran bukan pada negara atau kekuatan asing, melainkan lewat adanya pengukuhan dan pengaturan	Halaman 2 paragraf 2 Kunci kemakmuran bukan pada negara atau kekuatan asing, melainkan lewat adanya pengukuhan dan pengaturan

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	perekonomian oleh rakyat sendiri.	perekonomian oleh rakyat sendiri.
6	<p>Letak: Halaman 2 paragraf 10-17</p> <p>Semula penduduk Indonesia hidup dengan cukup lewat pertanian, perniagaan, dan pelayaran. Datanglah bangsa Eropa yang menjalankan monopoli perekonomian secara militeristik atau kekerasan senjata. Rakyat Indonesia harus menanam yang dibutuhkan penjajah dan laku dijual di dunia. Perekonomian hanya boleh dilakukan oleh penjajah Belanda. Karena itulah, rakyat Indonesia masuk ke dalam perputaran perekonomian kapital global. Penjajahan itu bermula dari <i>Oost Indische Compagnie</i> (OIC) lalu <i>cultuur stelsel</i> dan kapitalis partikelir atau kapitalisme dunia yang modern. Seandainya rakyat Indonesia tidak kuat, maka mereka bisa musnah seperti bangsa usul di Australia, Tasmania. Rakyat yang susah terjajah semakin terpuruk dalam penjajahan kapitalisme global. Hal ini dapat diantisipasi, jika rakyat Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang membela rakyat bukan modal asing dan kekuatan penjajah.</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Rakyat Indonesia masuk kapitalisme global lewat penjajahan dari Negara asing dan perusahaan global. Rakyat terpuruk dalam kapitalisme global. Keterpurukan dapat diantisipasi, jika rakyat Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang membela rakyat bukan modal asing dan kekuatan penjajah.</p>
7	<p>Letak: Halaman 3 paragraf 1</p> <p>Jikalau ada pemerintahan (jaman penjajahan), maka pemerintahan itu adalah pemerintahan dari penjajah. Peraturan yang dibuat</p>	<p>Halaman 3 paragraf 1</p> <p>Pemerintahan penjajahan memunculkan <i>wet poenale sanctie</i> yaitu</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	adalah peraturan atau <i>wet poenale sanctie</i> yaitu hukum untuk keperluan penguasa dan pemilik modal.	hukum untuk keperluan penguasa dan pemilik modal.

Sumber: “Pengaruh *Koloniaal Kapitaal* Di Indonesia”, Daulat Ra’jat, Nomor 7, tanggal 20 November 1931.

Dari Tabel Artikel Pengaruh *Koloniaal Kapitaal* Di Indonesia dapat kita ketahui bahwa Mohammad Hatta (1931, halaman 2) menyatakan bahwa pemerintahan sendiri mutlak dimiliki oleh suatu bangsa agar hidup rakyat menjadi makmur dan tidak terpuruk. Pemerintahan sendiri harus mempunyai prinsip membela rakyat bukan modal asing dan kekuatan penjajah (Hatta, 1931b). Pemerintah berprinsip membela rakyat, maka berdampak pada penguatan perekonomian rakyat. Mohammad Hatta menekankan lagi (1931, halaman 2) bahwa kunci kemakmuran bukan pada kekuatan asing, melainkan pengukuhan dan pengaturan perekonomian oleh rakyat sendiri (Hatta, 1931b). Selain berprinsip membela rakyat, pemerintahan sendiri juga harus mengurus rakyat tanpa menindas, baik kepada kaum mayoritas maupun kepada kaum minoritas. Pemerintahan yang mengurus tanpa menindas rakyat ada pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 7. Artikel Tjatoer Politik Di Keliling Medja Boendar

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "Tjatoer Politik Di Keliling Medja Boendar". Nomor 11. Tanggal 30 Desember 1931 (Hatta, 1931e).</p> <p>Resume:</p> <p>Rapat Meja Bundar di London Inggris untuk mencari mufakat antara perwakilan India dengan pemerintahan Inggris di masa Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Rapat untuk menentukan pembentukan pemerintahan sendiri milik India yang saat itu masih bersifat Dominion Inggris. Hasil tidak optimal karena tidak ada persatuan antara perwakilan Partai Kongres India yang mewakili mayoritas Hindu India dengan perwakilan Partai Muslimin India. Hal ini karena ada perbedaan prinsip keagamaan. Rapat Meja Bundar tidak sukses membentuk pemerintahan sendiri. India gagal bersatu antara Muslim dan Hindu. Dari pengalaman tersebut, ada tiga masukan bagi pemerintahan seperti India tersebut, yaitu: (1) Negara disusun berdasarkan politik demokratis karena di India beragam agama, (2) Masing-masing kelompok agama dan minoritas mempunyai kekuasaan sendiri mengurus penghidupan sendiri, dan (3) Negara di India harus terbagi secara federal dengan adanya pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 5</p> <p>Soal kaum minoritas tidak akan selesai di India, jika kaum minoritas tidak diperhatikan haknya dan tidak diayomi. Orang-orang harus terus berusaha mencari peraturan umum untuk melindungi mereka. Jika soal kaum minoritas dijadikan tanpa solusi, maka</p>	<p>Halaman 5</p> <p>Tujuan pemerintahan sendiri harus bisa mengurus kaum mayoritas dan tanpa menindas kaum minoritas.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>kemajuan pemerintahan terhambat. Adanya perlakuan mayoritas kaum Hindu terhadap minoritas kaum Muslim yang tidak adil, maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah Inggris. Itulah tujuan pemerintahan sendiri harus bisa mengurus kaum mayoritas dan tanpa menindas kaum minoritas. Akhirnya rapat politik di keliling meja bundar di London Inggris kandas karena kaum minoritas Muslim belum semufakat dengan mayoritas Hindu India.</p> <p>Kondisi tidak mufakat minoritas dan mayoritas harus diselesaikan lewat kecakapan masing-masing pemimpin kelompok yang akan mengisi pemerintahan sendiri (Partai Kongres India dan Partai Persatuan Muslimin India) untuk membimbing rakyat ke padang kemerdekaan.</p>	
3	<p>Letak: Halaman 7</p> <p>Seperti India yang rakyatnya bermacam agama dalam mencapai kemerdekaan, maka sebaiknya negara mempunyai pemerintahan sendiri harus berdasar program politik bukan program agama. Dengan dasar politik pemerintahannya yaitu demokrasi. Hal ini untuk memperbaiki penghidupan rakyat dan keselamatan rakyat.</p> <p>Urusan agama harus diberikan kekuasaan kelompoknya untuk</p>	<p>Halaman 7</p> <p>Pemerintahan sendiri berdasar program demokrasi untuk memperbaiki penghidupan dan keselamatan rakyat. Pemerintah membentuk negara bagian di bawah pemerintah pusat untuk mengurus urusan dalam negeri.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>mengurus rakyat seagamanya. Lainnya berdasar politik.</p> <p>Untuk contoh India, urusan sistem pemerintahan yang berdaulat di skala negara berhubungan dengan pihak luar, maka permufakatan India terbagi dalam beberapa kerajaan atau negara bagian. Negara bagian akan berwenang mengurus urusan internal. Pemerintah pusat mengurus hubungan ke luar negeri.</p>	

Sumber: “Tjatoer Politik Di Keliling Medja Boendar”, Daulat Ra’jat, Nomor 11, tanggal 30 Desember 1931.

Dari Tabel Artikel Tjatoer Politik Di Keliling Medja Boendar, kita menemukan manfaat dari berjalannya prinsip dalam pemerintahan sendiri, yaitu agar pemerintah tidak menindas dan menghapus penindasan terhadap rakyat serta memunculkan keselamatan bagi rakyatnya, baik di pusat maupun di daerah. Menurut Mohammad Hatta (1931, halaman 5 dan 7) menyebutkan bahwa pemerintah bertujuan untuk mengurus rakyat mayoritas dan tidak menindas rakyat minoritas serta mewujudkan penghidupan rakyat yang selamat. Secara struktural, organisasi pemerintahan dijalankan dengan model pemerintah pusat dan daerah yang demokratis demi terwujudnya pengurusan rakyat yang tanpa menindas menuju keselamatan rakyat (Hatta, 1931e).

Untuk mencapai pemerintahan sendiri dilakukan dengan apa? Lewat demokrasi asli berupa Daulat Rakyatku bukan Daulat Tuanku. Ini disebut indigenisasi dan rekonstitusi. Untuk prinsip pemerintahan sendiri yang berkualitas yaitu menempatkan *governing* di bawah rakyat dengan prinsip Daulat Rakyat telah disebutkan dalam keterangan-keterangan di atas terutama yang rujukannya pada artikel berjudul, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra’jat” yang terbit pada tanggal 10 Januari 1932 di Daulat Ra’jat. Selebihnya pemerintahan sendiri dapat dicapai dengan prinsip indigenisasi dan rekonstitusi.

Adapun kesimpulan di sini dapat kita ketahui bahwa untuk bisa membuat pemerintahan sendiri dengan prinsip utama, yaitu Daulat Rakyatku bukan Daulat Tuanku. Prinsip utama ini dapat kita temukan dalam halaman 2 – 3 artikel berjudul, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra’jat” Edisi Nomor 12 pada tanggal 10 Januari 1932. Prinsip utama lalu diturunkan menjadi prinsip turunan, yaitu:

1. Dijalankan dengan prinsip tanpa menindas demi keselamatan rakyat. Prinsip ini dapat kita temukan pada artikel Mohammad Hatta berjudul, “Tjatoer Politik Di Keliling Medja Boendar” yang diterbitkan oleh Daulat Ra’jat di halaman 5 dan 7 pada tanggal 30 Desember 1931 dengan edisi nomor 11.
2. Pemerintahan yang membela rakyat bukan modal asing dan kekuatan penjajah. Prinsip ini dapat kita temukan pada artikel berjudul, “Pengaroeh *Koloniaal Kapitaal* Di

Indonesia pada halaman 1 di Daulat Ra'jat Edisi nomor 7 tanggal 20 November 1931.

3. Prinsip rakyat di atas legislatif kemudian legislatif di atas eksekutif atau pemerintahan berposisi di bawah rakyat karena mengemban Daulat Rakyat. Prinsip ini kita temukan dalam halaman 1 artikel berjudul, "Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*" Edisi Nomor 5 tertanggal 30 Oktober 1931.

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran, yaitu:

1. Penguatan perekonomian rakyat. Manfaat ini dapat kita temukan pada artikel berjudul, "Pengaroeih *Koloniaal Kapitaal* Di Indonesia pada halaman 2 di Daulat Ra'jat Edisi nomor 7 tanggal 20 November 1931.
2. Memiliki pemerintahan sendiri. Manfaat ini dapat kita temukan dalam halaman 2 artikel berjudul, "Pengaroeih *Koloniaal Kapitaal* Di Indonesia Edisi Nomor 7 tertanggal 20 November 1931.
3. Struktur organisasi pemerintahan mempunyai model pemerintah pusat dan daerah. Manfaat ini dapat kita temukan pada artikel Mohammad Hatta berjudul, "Tjatoer Politik Di Keliling Medja Boendar" pada halaman 7 yang diterbitkan oleh Daulat Ra'jat pada tanggal 30 Desember 1931 dengan edisi nomor 11.

C. Indigenisasi dan Rekonstitusi Pemerintahan

Indigenisasi dan rekonstitusi merupakan metode yang diajukan oleh teori *government making* untuk membuat pemerintahan sendiri yang berkualitas berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran dan keselamatan rakyat. Pemerintahan menempatkan diri bahwa rakyat adalah tuan dari pemerintah yaitu Daulat Rakyat. Prinsip Daulat Rakyat masih tertutupi kabut tebal yang oleh Yunanto dalam kertas kerja berjudul, “Memahami Pemerintahan” (2023, halaman 6) kabut tebal itu disebabkan oleh kolonialisme, orientalisme, neoliberalisme, dan developmentalisme. Jadi untuk membentuk pemerintahan sendiri dengan menghalau kabut tebal dibutuhkan indigenisasi dan rekonstitusi (Yunanto, 2023).

Makna indigenisasi dapat kita ketahui sebagai menurut Yan (2014); Stewart (2018); Blair (2020); dan Jordan (2021) dalam Istiningasih dan Dharma (2023, halaman 192, 193, dan 199) menyebutkan, bahwa indigenisasi dimaknai sebagai domestikasi atau membumikan teori asli dari wilayah budaya setempat untuk terpilah dan terbebas dari teori-teori Barat yang mendominasi (Istiningsih & Dharma, 2023). Mohammad Hatta mengambil model pemerintahan yang membumi dalam artikel, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra'jat” (1932) demokrasi asli yang membumi dari Indonesia bernama Daulat Rakyat yang sering tertindih Daulat Tuanku (Hatta, 1932a).

Seiring dengan indigenisasi, ada rekonstitusi yang berguna untuk menghilangkan kabut gelap dalam mengupayakan pemerintahan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diunduh tanggal 26 November 2024 dapat kita ketahui bahwa rekonstitusi yaitu pemulihan kembali agar keadaan seperti semula (KBBI, 2024) atau seperti sedia kala dalam konteks pemerintahan seperti sistem nilai pada posisi Daulat Rakyat, yaitu pemerintahan berada di bawah rakyat.

Sistem nilai tersebut azas yang telah ada sejak dahulu kala di Indonesia dan diadakan kembali oleh pemerintahan Republik Indonesia sehingga termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Jadi usaha rekonstitusi pemerintahan adalah mengupayakan bahwa pemerintahan suatu negara harus kembali kepada sistem nilai bangsa yang tercantum dalam hukum azas.

Mohammad Hatta dalam artikel berjudul, “Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*” dalam Daulat Ra’jat Edisi Nomor 5, tanggal 30 Oktober 1931 (1931, halaman 1) menyatakan terkait rekonstitusi berupa usaha mengembalikan sistem nilai pemerintahan kepada Daulat Rakyat yang rakyat membawahi pemerintahan karena adanya adat yang diadakan dalam hukum azas (Hatta, 1931c).

Jadi rekonstitusi merupakan upaya mengembalikan pemerintahan agar kembali kepada payung Daulat Rakyat yang telah disebutkan oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Kedaulatan Rakyat. Daulat

Rakyat harus diusung oleh pemerintahan sebagai pula wujud pembumian atau domestikasi teori asli dari wilayah budaya Indonesia untuk terpilah dan terbebas dari dominasi teori-teori pemerintahan dari Barat.

Karena itu, kita dapat mengetahui prinsip utama, yaitu pemerintahan berprinsip indigenisus dan konstitusional. Prinsip ini kita temukan pada artikel, “Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*” halaman 1 dalam Daulat Ra’jat Edisi Nomor 5, tanggal 30 Oktober 1931 dan “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra’jat” pada Daulat Ra’jat Edisi Nomor 12 tertanggal 10 Januari 1932. Adapun manfaatnya yaitu terwujud Kedaulatan Rakyat bersendikan pergaulan hidup rakyat yang saling tolong-menolong dan menjunjung tinggi rakyat. Manfaat ini ada pada artikel, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra’jat” pada Daulat Ra’jat Edisi Nomor 12 tertanggal 10 Januari 1932.

D. Ideologi Pemerintahan Dunia

Kedaulatan Rakyat berupa daulat rakyatku bukan daulat tuanku adalah ideologi pemerintahan yang diajukan oleh teori Mohammad Hatta tentang pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran. Kedaulatan Rakyat berbeda dengan feodalisme, liberalism, dan sosialisme. Mohammad Hatta (1932, halaman 2) dalam artikel berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra’jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)” menyebutkan, bahwa ideologi pemerintahan dunia dari feodalisme ke liberalisme kemudian ke sosialisme (Hatta, 1932g). Namun demikian, ketiga ideologi pemerintahan tersebut belum mampu menempatkan rakyat

Indonesia kepada derajat yang bermartabat penuh dalam segala bidang.

1. Feodalisme

Dalam artikel berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra’jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta” yang diterbitkan oleh Daulat Ra’jat Edisi Nomor 37 tertanggal 20 September 1932 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 8. Artikel Krisis Doenia Dan Nasib Ra’jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra’jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra’jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra’jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta”. Nomor 37. Tanggal 20 September 1932 (Hatta, 1932c).</p> <p>Resume:</p> <p>Ada beberapa semangat pergaulan hidup di barat, yaitu feodalisme yang penguasanya adalah ningrat. Kemudian, kapitalisme lahir dengan penguasanya adalah modal dari individu-individu yang merdeka lalu lahir lagi sosialisme yang penguasanya adalah orang kelas bawah yang mayoritas buruh.</p> <p>Kapitalisme menjadi ideologi pemerintahan paling kuat membuat konjungsi ekonomi dunia naik atau turun. Konjungsi ekonomi turun menyebabkan depresi dan krisis ekonomi. Di negeri terjajah pun ikut mengalami krisis.</p> <p>Melalui rasionalisasi dan revolusi teknik, kaum kapitalis ingin melepaskan diri dari depresi ekonomi, krisis ekonomi, revolusi kaum buruh, dan serangan ekonomi Jepang. Terus kapitalisme menambah perilaku berupa imperialisme di tanah jajahan. Rakyat Indonesia harus mampu bertahan dari</p>	

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	serangan imperialisme politik maupun ekonomi.	
2	<p>Letak: Halaman 1 paragraf 2</p> <p>Pergerakan rakyat membutuhkan pemimpin. Pemimpin harus memperdalam keilmuan. Perjuangan pemimpin selalu tak bisa menutupi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsanya.</p> <p>Bangsa yang besar dikarenakan rakyatnya bukan membebek saja, tetapi karena rakyat cakap memperbaiki nasibnya. Jadi bukan karena pemimpinnya. Walau pemimpin dibutuhkan untuk pergerakan rakyat. Pemimpin dan rakyat harus senantiasa memperbaiki diri dan pekerti.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Pergerakan rakyat membutuhkan pemimpin yang berilmu dan berpekerti. Meskipun pergerakan rakyat membutuhkan pemimpin, bangsa yang besar dikarenakan rakyatnya yang cakap memperbaiki diri dan pekertinya bukan karena pemimpinnya.</p>
3	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 4</p> <p>Krisis selalu terhubung dengan kapitalisme, terkhusus karena hal produksi. Dahulu produksi menurut pesanan sekarang produksi dibuat dahulu menurut pasar atau untuk perkiraan keperluan permintaan orang banyak. Jadi sering terjadi <i>overproduction</i>. Inilah krisis, tidak seimbangny produksi dan permintaan.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Krisis selalu disebabkan kapitalisme, khususnya <i>over production</i> yang berarti tidak mampunya permintaan menandingi kelebihan produksi.</p>
4	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 5-6</p> <p>Kapitalisme membuat perekonomian turun naik karena sifatnya yang berorientasi laba dan kekuatan produksi.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Kapitalisme menciptakan kondisi perekonomian turun naik karena berorientasi profit dan kekuatan produksi.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
5	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 7</p> <p>Krisis berjalan diawali selama dua atau tiga tahun. Disebut sebagai depresi. Kondisinya banyak badan perniagaan yang bangkrut. Garis perekonomian di saat krisis turun terus lalu naik sedikit lalu turun lagi selama dua sampai tiga tahun. Pengusaha tidak berani mengerjakan kerja baru. Kredit bank bergerak rendah. Kaum buruh atau pekerja banyak menganggur. Gaji turun. Lalu muncul aktor perniagaan mulai mengerjakan sumber penghasilan baru, jika sukses diikuti aktor lainnya. Ini mulai konjungtur ekonomi naik atau masuk masa pasca depresi/krisis. Masa optimisme (kesenangan dan kebesaran hati). Buktinya kredit bank naik, bunga bank naik, harga barang kasar naik, harga barang lain kasar naik, kaum industrial berlomba lagi merebut pasar. Namun, masa optimis akan menjadi krisis lagi karena sifat kapitalisme yang berorientasi profit dan persaingan pasar sehingga kembali overproduksi dan krisis lagi. Konjungtur ekonomi turun lagi.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Krisis diawali depresi sekitar 3 tahun. Indikasi krisis: (1) perniagaan banyak bangkrut, (2) garis ekonomi turun naik sedikit sekitar 3 tahun lalu turun terus, (3) banyak pengangguran, (4) dan gaji turun.</p> <p>Krisis dan depresi mulai berakhir dengan memasuki masa optimisme dengan ditandai adanya konjungtur ekonomi naik. Cirinya model perniagaan baru yang diikuti aksi ambil profit dan persaingan pasar yang nantinya kapitalisme akan memunculkan kondisi depresi dan krisis lagi yang berulang.</p>
6	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 2-3</p> <p>Kapitalisme mempunyai semangat kuat kemerdekaan individu yang salah satu</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Feodalisme diruntuhkan oleh Kapitalisme mulai tahun 1789 lewat Revolusi</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>tokohnya, Rosseau. Kapitalisme menimbulkan Revolusi Perancis 1789. Feodalisme runtuh lahir kapitalisme. Jiwa individualisme yaitu setiap individu lahir dan hidup merdeka tanpa mengganggu keamanan pihak lain. Motor kapitalisme adalah revolusi industri. Terus kemerdekaan individu melahirkan kemerdekaan penghidupan dan perilaku pikir. Ilmu alam berkembang. Lahir produk ilmu alam seperti mesin. Lalu lahirlah revolusi industri.</p>	<p>Perancis. Kapitalisme berjiwa kemerdekaan individu. Motor Kapitalisme adalah revolusi industri. Revolusi industri dimunculkan karena kemerdekaan individu untuk berpikir sehingga mengembangkan ilmu alam yang melahirkan banyak mesin dan teknologi.</p>
7	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 4 Kapitalisme yang berjiwakan individualisme juga membawa Kedaulatan Rakyat, tetapi pincang karena hanya kemerdekaan individu atau orang seorang tidak membawa kemerdekaan rakyat antar bangsa.</p>	<p>Halaman 2 Kapitalisme membawa kemerdekaan bagi individu, tetapi pincang karena tidak membawa kemerdekaan bersama rakyat.</p>
8	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 6 Mengingat kapitalisme mempunyai kekuatan pada modal, maka setiap organisasi harus diukur secara permodalan. Modal bisa diusung atas persatuan keuangan individu-individu. Muncul badan ekonomi. Pekerjaan baru. Penghasilan baru. Lalu masuk pasar, bersaing dan merebut pasar untuk mencari dan meningkatkan laba. Karenanya</p>	<p>Halaman 2 Kekuatan pengukuran keberhasilan dalam kapitalisme pada strata modal. Persaingan mendapatkan profit dan persaingan pasar meningkatkan kemunculan kartel, <i>trust</i>, dan <i>concern</i> kapitalisme.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	terbentuk kartel, <i>trust</i> , dan <i>concern</i> kapitalisme.	
9	Letak: Halaman 2, paragraf 8 Takdir Allah itu selalu merubah zaman melalui perubahan tingkatan-tingkatan zaman per ideologi. Dari zaman feodalisme yang ningrat berkuasa kemudian kapitalisme yang pemodal berkuasa lalu menuju sosialisme yang kaum buruh yang berhak berkuasa atau sejahtera.	Halaman 2 Ada perubahan ideologi pemerintahan setiap zaman. Pertama, zaman Feodalisme yang ningrat berkuasa. Kedua, zaman Kapitalisme yang pemodal berkuasa. Ketiga, zaman Sosialisme yang kaum buruh berkuasa.
10	Letak: Halaman 2, paragraf 9-14 Kapitalisme mempunyai kekuatan pada kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu menyebabkan persaingan antar pengusaha. Semangat persaingan melahirkan persaingan pergaulan hidup antara pemodal dengan kelompok buruh. Kapitalisme pun memperbaiki diri dalam pergaulan hidup. Perjuangan individu-individu kapitalisme antara kapitalis terhadap buruh menyebabkan revolusi rasionalisasi yaitu dengan modal sekecilnya berjuang memperoleh untung sebesar-besarnya. Caranya: perbaikan atau pembaruan pada akal, tenaga, teknik, dan mesin. Rasionalisasi ini menyebabkan perubahan dalam revolusi industri. Bahkan tenaga manusia pun berangsur diganti oleh mesin dan teknologi. Penggantian SDM oleh teknologi disebut revolusi	Halaman 2 Kapitalisme yang menekankan kepada kemerdekaan individu menciptakan persaingan antar kelompok. Akibatnya terjadi perbaikan pada ideologi pemerintahan kapitalisme dalam pergaulan hidup. Perbaikan kapitalisme pada: (1) Revolusi rasionalisasi, yaitu modal sekecilnya untung sebesar-besarnya. (2) Revolusi Teknik, yaitu teknologi dilayani manusia karena tenaga manusia diganti alat teknologi

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>teknik. Revolusi teknik adalah perubahan pemanfaatan tenaga untuk memproduksi dari manusia dibantu teknologi menjadi teknologi dibantu manusia. Artinya jumlah teknologi ditambah dan jumlah tenaga manusia dikurangi untuk arena produksi. Contohnya, perusahaan mobil ketika manusia dibantu teknologi satu mobil membutuhkan penyelesaian selama satu bulan. Ketika teknologi diperbanyak penggunaannya dan manusia yang membantu teknologi, maka produksi satu mobil menjadi selama lima menit saja. Karena semuanya ditangani mesin robot secara efisien.</p>	
11	<p>Letak: Halaman 3, paragraf 1-10</p> <p>Adanya Rasionalisasi dan revolusi teknik menyebabkan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Tenaga manusia menjadi penganggur. Pengangguran harus ditangani pemerintah dengan memberikan santunan. Pengangguran dari buruh ada 4, yaitu: (1) setengah pengangguran yaitu buruh yang masih bekerja, (2) penganggur yang mendapat tunjangan sederhana untuk hidup, (3) mereka yang mendapat tunjangan tapi tidak cukup untuk hidup, dan (4) penganggur yang tidak dapat</p>	<p>Halaman 3</p> <p>Kapitalisme memperbaiki diri lewat rasionalisasi dan revolusi teknik yang malah menghasilkan empat model pengangguran, yaitu: (1) setengah menganggur, (2) menganggur dengan santunan, (3) menganggur dengan santunan tapi tidak cukup hidup, dan (4) menganggur tanpa santunan. Penganggur tanpa santunan paling kuat melakukan revolusi buruh. Revolusi buruh didiamkan</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	tunjangan atau bantuan. Kelompok buruh nomor 4 lebih revolusioner. Revolusi buruh ditakuti kaum kapitalis. Karenanya, kapitalis akan berjuang meredam revolusi buruh lewat uang diam.	dengan memberikan uang diam oleh negara kapitalis.
12	Letak: Halaman 3, paragraf 11 Untuk uang diam ada batasnya dari kapitalis kepada buruh pengangguran. Karenanya batasan itu ditutupi lewat jalan lain, yaitu mengeksploitasi tanah jajahan. Seperti Belanda terhadap Indonesia. Hasil dari tanah jajahan diperuntukkan keuntungan kaum kapitalis barat dan rakyat buruh mereka atau belanja negara bagi rakyatnya.	Halaman 3 Uang diam negara kapitalis tidak cukup meredam revolusi kaum buruh akibatnya negara melakukan imperialisasi lewat penjajahan. Contohnya, Belanda menjajah Indonesia.
13	Letak: Halaman 3, paragraf 11-13 Adanya kapitalisme memunculkan imperialisme politik lalu menjajah tanah asing melahirkan imperialisme ekonomi. Fungsi tanah jajahan menurut imperialisme, yaitu: (1) mendapatkan pangan, (2) mendapatkan Sumber Daya Alamnya, dan (3) pasar.	Halaman 3 Fungsi tanah jajahan, yaitu: sebagai sumber pangan, Sumber Daya Alam, dan pasar, serta sumber kemakmuran orang-orang di negeri asal kapitalis.

Sumber: “Krisis Doenia Dan Nasib Ra’jat Indonesia Pidato

Mohammad Hatta”, Daulat Ra’jat, Nomor 37, tanggal 20 September 1932.

Tabel Artikel Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta menunjukkan bahwa pergerakan ideologi pemerintahan dari zaman ke zaman selalu berkembang. Ada tiga ideologi pemerintahan menurut Mohammad Hatta (1932, halaman 2), yaitu: (1) feodalisme, (2) kapitalisme, lalu (3) sosialisme (Hatta, 1932c). Tiga ideologi pemerintahan juga ada dalam artikel, “Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*” (1931, halaman 2) bahwa dari feodalisme ke kapitalisme dan ke sosialisme di Eropa (Hatta, 1931c).

Feodalisme merupakan ideologi pemerintahan yang menempatkan kaum raja dan ningrat serta keluarganya menjadi penguasa yang absolut (Hatta, 1932c). Menurut Joss Raadschelders (2020) dalam Yunanto (2021, halaman 5) ideologi pemerintahan feodalisme menjadi pemerintah di atas masyarakat karena keluarga raja berposisi di atas rakyat dalam segala bidang (Yunanto, 2021). Feodalisme tak bertahan lama karena rakyat tak ikut memerintah. Mohammad Hatta menunjukkan (1932, halaman 2) bahwa feodalisme runtuh mula-mula di Eropa pada tahun 1789 dalam suatu revolusi besar di Perancis yang kemudian digantikan oleh kapitalis liberalisme (Hatta, 1932c). Dalam artikel, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)” (1932, halaman 2) bahwa negara yang bertahan lama adalah negara yang rakyatnya berkuasa dan bersemangat ikut memerintah dan mengatur pemerintahan. Negara yang runtuh dan tak bertahan lama adalah negara yang rakyatnya hanya diperintah saja oleh pengurus pemerintahan (Hatta, 1932g). Keruntuhan

feodalisme juga dimuat artikel, “Kedaulatan Ra’jat Boekan *Anarchie*”:

Tabel IV. 9. Artikel Kedaulatan Ra’jat Boekan *Anarchie*

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra’jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra’jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “Kedaulatan Ra’jat Boekan <i>Anarchie</i>”. Nomor 65. Tanggal 30 Juni 1933 (Hatta, 1933c). Resume: Rakyat berhak tidak selalu menerima perintah melainkan turut mengatur kebutuhan sendiri. Kedaulatan Rakyat, yaitu satu masyarakat, dimana nasib orang banyak ditentukan oleh orang banyak atas permufakatan tak ada tindasan. Kedaulatan rakyat mempunyai orientasi kolektivisme berupa pergaulan hidup berdasar rapat mufakat. Kedaulatan rakyat berbeda dengan <i>anarchie</i> karena <i>anarchie</i> berkehendak manusia bebas tiada terbatas.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 2-3</p> <p>Kalau penghidupan segala bidang digenggam oleh ekonomi barat muncul kejahatan peraturan. Hal itu terasa sehari-hari. Kedaulatan Rakyat menerangkan kepada mereka, bahwa tak pantas yang penghidupan orang banyak dikuasai oleh satu golongan kecil yang berharta. Rakyat berhak menentukan nasibnya. Keamanan yang sebesar-besarnya didapat, jika rakyat tidak mesti menerima perintah saja, melainkan turut mengatur kebutuhan sendiri.</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Penghidupan tidak boleh dikuasai seluruhnya oleh ekonomi barat karena kapitalis barat bisa membuat kejahatan lewat peraturan. Untuk mengantisipasi kejahatan kapitalisme, Kedaulatan Rakyat harus hidup. Kedaulatan Rakyat menempatkan rakyat berdaulat dan berhak menentukan nasibnya sendiri dan berhak ikut memerintah.</p>
3	Letak: Halaman 2, paragraf 5	Halaman 2

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	Cita-cita Kedaulatan Rakyat yaitu pergaulan hidup yang asli dari mulut ke mulut. Pergaulan Kolektivisme satu kelanjutan Kedaulatan Rakyat yang belum dipengaruhi semangat <i>Geldwirtschaft</i> (harta moneter).	Cita-cita Kedaulatan Rakyat yaitu pergaulan hidup yang asli. Kolektivisme sebagai kelanjutannya yang belum dipengaruhi semangat <i>Geldwirtschaft</i> (persaingan harta moneter).
4	Letak: Halaman 2 paragraf 1, 6, 7, dan 9 Kedaulatan rakyat memberikan kemerdekaan kepada rakyat yang seluas-luasnya. Kemerdekaan juga mempunyai batasan yang ditentukan pergaulan sosial dan mufakat bersama agar tidak menimbulkan kelakuan yang di luar aturan menjadi <i>anarchie</i> . Hukum <i>psychologie</i> ini berlaku pada setiap waktu dan zaman.	Halaman 2 Kedaulatan rakyat memberikan kemerdekaan kepada rakyat yang seluas-luasnya dengan perbatasan kebebasan yang disetujui pergaulan sosial dan mufakat bersama.
5	Letak: Halaman 2 paragraf 17 <i>Anarchie</i> berkehendak pada kemerdekaan manusia yang tak terbatas, membiarkan ia bisa berbuat sesukanya. Ia berdasar kepada individualism yang selanjutnya menolak segala peraturan manusia, sebab itu mesti menimbulkan kekacauan. Kedaulatan rakyat berkehendak akan peraturan atas mufakat bersama.	Halaman 2 <i>Anarchisme</i> bisa dianut manusia berbuat sesukanya hingga menjadi kekacauan. Kedaulatan Rakyat yang berkehendak pada peraturan atas mufakat bersama hadir untuk mencegah <i>anarchisme</i> .
6	Letak: Halaman 2 paragraf 8-9 Revolusi Perancis di tahun 1789 merubah perumahan besar feodalisme, meruntuhkan	Halaman 2 Feodalisme sebagai ideologi pemerintahan kolot runtuh oleh revolusi

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	kekuasaan <i>ancient regime</i> (pemerintahan kolot) dan membawa kemerdekaan kepada individu. Karena lezatnya kemerdekaan individu sehingga timbul tindakan dan kelakuan yang di luar aturan bersama.	kapitalisme. Kapitalisme malah kelewatan menikmati lezatnya kemerdekaan sehingga menjadi <i>anarchie</i> .

Sumber: “Kedaulatan Ra’jat Boekan *Anarchie*”, Daulat Ra’jat, Nomor 65, tanggal 30 Juni 1933.

Dari Tabel Artikel Kedaulatan Ra’jat Boekan *Anarchie* menunjukkan bahwa feodalisme itu ideologi pemerintahan kuno yang nantinya runtuh (Hatta, 1933c). Feodalisme mempunyai kekurangan. Kekurangan itu pada kesewenangan kaum ningrat terhadap kaum bukan ningrat dalam negeri juga adanya penjajahan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, harus melakukan prinsip turunan dari prinsip utama daulat rakyatku bukan daulat tuanku, yaitu: (1) Pemerintahan tidak boleh di atas rakyat dan (2) Pemerintahan harus bisa diperintah dan diurus oleh rakyat.

2. Liberalisme

Ideologi pemerintahan selanjutnya yaitu liberalisme atau juga dikenal lewat ideologi ekonominya berupa kapitalisme. Menurut Mohammad Hatta dalam artikel, “Menempuh Zaman Perpisahan” (1933, halaman 1-2), kaum liberalisme percaya bahwa kemakmuran dan kemajuan pasti akan didapatkan lewat model masyarakat kapitalisme. Mereka meyakini kemakmuran suatu bangsa bisa dicapai dengan kemerdekaan individu. Persaingan merdeka menjadi

sendi kemakmuran, namun kemakmuran yang tidak sempurna (Hatta, 1933d).

Liberalisme itu identik dengan kapitalisme yang memberikan persaingan merdeka kepada individu. Mohammad Hatta menekankan dalam artikel, “Menempoeh Zaman Perpisahan” (1933) bahwa persaingan merdeka itu tiap-tiap orang bekerja menurut kecakapannya (Hatta, 1933d). Lalu, kapitalisme itu apa? Menurut Mohammad Hatta kapitalisme adalah gerakan ekonomi daripada liberalisme itu sendiri. Mohammad Hatta menyebutkan dalam artikel, “Menempoeh Zaman Perpisahan” (1933) bahwa pemerintah negeri kapitalis melakukan politik *financieel* untuk melakukan keseimbangan antara belanja negara dan pendapatan negara dalam neraca anggaran negara (Hatta, 1933d). Jadi bisa kita pahami bahwa liberalisme sebagai ideologi pemerintahan dan kapitalisme sebagai ideologi ekonominya.

Liberalisme atau kapitalisme menggantikan feodalisme dimulai tahun 1789 sejak Revolusi Perancis. Mohammad Hatta dalam artikel berjudul, “Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka *Volksraad*” (1931, halaman 2) menyebutkan penggantian feodalisme ke liberalism di Eropa, misalnya di Belanda lewat tokoh bernama Thorbecke, gaungan liberalisme atau kemerdekaan individu mulai diterima sejak tahun 1848 (Hatta, 1931c). Dari keterangan liberalisme dan kapitalisme yang diajukan oleh Mohammad Hatta diketahui bahwa pelaku atau aktor utama yaitu individu penguasa modal.

Motor daripada kapitalisme yaitu revolusi industri. Hal ini didukung oleh pernyataan Mohammad Hatta dalam artikel berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta” (1932, halaman 2), bahwa motor kapitalis adalah revolusi industri. Lalu, semangat individu yang merdeka melahirkan kemerdekaan dan perilaku pikir. Kemudian, ilmu alam berkembang. Lahir produk ilmu alam, seperti teknologi mesin. Lahirlah revolusi industri (Hatta, 1932c). Semangat kemerdekaan individu dibawa oleh ideologi pemerintahan liberalisme telah mengantarkan kapitalisme kepada kemajuan dan kemakmuran. Kemakmuran kapitalisme tidak sempurna karena dua hal kekurangan, yaitu:

- a. kebebasan hanya ada di bidang politik saja bagi masyarakat, sedangkan ekonomi dan sosial dikuasai oleh pemodal. Hal ini dapat kita temukan pada artikel Mohammad Hatta berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)” (1932, halaman 1) bahwa perbedaan Kedaulatan Rakyat di Indonesia dengan Kedaulatan Rakyat (*volk sovereyniteit*) ala Barat yaitu di Barat terletak pada kemerdekaan itu hanya di bidang politik saja, tetapi pada bidang ekonomi yang menjadi penguasa adalah pemilik modal atau kapitalis yang kemudian meninggalkan atau menindas rakyat. Berlawanan dengan itu, dalam Kedaulatan Rakyat yang diajukan Mohammad Hatta bahwa kemerdekaan bagi

semua pihak dan dalam semua bidang, baik sosial, ekonomi, maupun politik (Hatta, 1932g).

- b. Kemakmuran hanya untuk bangsa di tempat negeri Kapitalis berada, tetapi kepada bangsa lain kaum liberalis-kapitalis melakukan imperialisme. Hal ini dapat kita temukan dalam artikel Mohammad Hatta berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta” (1932, halaman 3) bahwa kaum kapitalis menjajah tanah asing melahirkan imperialisme politik dan ekonomi. Tanah jajahan diperuntukkan memakmurkan negara penjajah. Melahirkan koloniale politik atau penjajahan. Fungsi tanah jajahan menurut imperialisme, yaitu: (1) mendapatkan pangan, (2) Sumber Daya Alam, dan (3) pasar (Hatta, 1932c).

Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan terkait liberalisme, yaitu: (1) ideologi pemerintahan pengganti feodalisme, yaitu liberalism; (2) ideologi ekonomi liberalism, yaitu kapitalisme; (3) aktor liberalis-kapitalis yaitu kaum pemodal; (4) motor kapitalisme yaitu revolusi industry; (5) kebebasan hanya pada bidang politik, sedangkan sosial dan ekonomi dikuasai pemodal; (6) kemakmuran hanya untuk bangsa pemodal, sedangkan bangsa asing diberlakukan imperialisme.

Menutupi kekurangan daripada liberalisme diadakan prinsip turunan. Prinsip turunan daripada prinsip utama pemerintahan berbasis keadilan dan kebenaran, yaitu:

1. Pemerintahan tidak memberlakukan kebebasan kepada satu bidang saja, tetapi kemerdekaan kepada semua bidang. Hal ini dapat kita temukan pada artike berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan)”.
2. Pemerintahan tidak memberlakukan imperialisme kepada bangsa lain. Hal ini kita temukan dalam artikel berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta”.

3. Sosialisme

Mohammad Hatta percaya bahwa ada takdir Allah yang menentukan bahwa kehidupan berputar. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Begitu pula ada ideologi yang berlaku kemudian pudar ada pula yang baru menggantikan terus digantikan lagi ideologi lainnya. Dalam artikelnya berjudul, “Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta” tertanggal 20 September 1932 di halaman 2 menunjukkan bahwa Takdir Allah itu telah menetapkan setiap zaman ada perubahan. Zaman mengikuti atau berkaitan dengan perubahan ideologi. Dari zaman feodalisme yang kaum bangsawan berkuasa kemudian meningkat ke zaman kapitalisme yang pemodal berkuasa lalu menuju jaman sosialisme yang kaum proletar menjadi penguasanya (Hatta, 1932c).

Menurut KBBI (2024) proletar yaitu orang-orang yang masuk dalam golongan proletariat (Bahasa, 2024d) kemudian kaum proletariat yaitu kaum yang masuk dalam strata rendah yang berisi misalnya kaum pekerja atau buruh (Bahasa, 2024e). Ada dua artikel Mohammad Hatta yang menyebutkan terkait marhen atau kelas rendah, yaitu, “Nasib Kaoem Dagang Ketjil di Indonesia” dan “Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia” seperti di bawah ini:

Tabel IV. 10. Artikel Nasib Kaoem Dagang Ketjil Di Indonesia Dan Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Wilayah Penelitian Artikel 1</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “Nasib Kaoem Dagang Ketjil di Indonesia”. Nomor 66. Tanggal 10 Juli 1933 (Hatta, 1933e).</p> <p>Resume:</p> <p>Perekonomian di Indonesia terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) kelas atas berupa orang-orang atau perusahaan bermodal besar, (2) kelas menengah berupa orang-orang atau perusahaan yang menyalurkan produk dari pemodal besar kepada konsumen, (3) kelas proletariat berupa orang-orang yang menjual jasa kepada perusahaan pemodal besar, dan (4) pedagang kecil yang di luar jalur produksi kapitalis dan berposisi sebagai usaha ekonomi kecil ketimuran yang asli.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 1 paragraf 1-2</p> <p>Kaum dagang kecil bisa lahir karena masyarakat ketimuran. Masyarakat ketimuran Indonesia rusak karena pengaruh kolonial</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Kolonial menghasilkan <i>politiestaat</i>. Indonesia masuk ke ekonomi internasional karena</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p><i>kapitaal</i> yang melahirkan <i>Politiestaat</i>. Perekonomian dikuasai kolonial kapital. Indonesia ke dalam ekonomi internasional oleh seretan kapital asing bukan karena dorongan masyarakat sendiri seperti di Eropa.</p>	<p>diseret kolonial kapital.</p>
3	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 3</p> <p>Bangsa kita tidak mempunyai alat pertahanan dalam perjuangan melawan perekonomian modern dari barat sehingga nasib bangsa Indonesia digenggam oleh bangsa asing, kaum <i>groot-kapitaal</i> dan kaum <i>midden-stand</i>.</p> <p>Struktur pergaulan hidup ada tiga, yaitu: (1) kaum modal besar (<i>groot-kapitaal</i>) dari bangsa barat, (2) kaum menengah (<i>midden-stand</i>) bangsa Tionghoa, Arab, dan Bombai, dan (3) kaum bawah (marhen, seperti buruh dan tani).</p>	<p>Halaman 1</p> <p>Kaum bawah berasal dari kaum marhen, buruh, dan petani.</p>
4	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 1</p> <p>Keadaan <i>tusschenhandel</i> (dagang perantara) masih mendapat penghidupan dalam perdagangan kecil. Pedagang kecil Indonesia berbeda dengan kelontong Tionghoa. Kelontong Tionghoa dibantu oleh kaum kapitalis atau <i>middenstand</i> bangsanya. Kelontong Indonesia berdiri sendiri tidak mempunyai tulang belakang. Kaum dagang kecil ditinggal oleh Saudagar</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Kaum dagang kecil berdiri sendiri tanpa dukungan kaum menengah dan kelas atas. Kaum dagang kecil termasuk kelas bawah.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	menengah Indonesia yang asyik memikirkan keadaan sendiri. Saudagar menengah Indonesia asyik berjuang hendak memperoleh tempat sendiri dalam kalangan <i>middenstand</i> asing itu sehingga nasib kaum dagang kecil yang di bawah itu tak teringat olehnya.	
5	Letak: Halaman 2, paragraf 2 Kalau di Barat, golongan itu si kaum dagang kecil masuk ke dalam kelas buruh. <i>Nur Arbeiter</i> , yang tak punya apa-apa selain dari tenaganya dijual kepada kaum majikan. Tetapi di sini, yuridis dan ekonomis kaum dagang kecil bisa berdiri sendiri dan berkuasa sendiri atas badan dan tenaganya.	Halaman 2 Kaum dagang kecil hamper setara kaum buruh.
6	Letak: Halaman 2, paragraf 4-7 Kapitalisme mempunyai semangat perekonomian berdasar kepada nafsu mencari untung. Terdapat golongan manusia yang bertentangan. Pertama, kaum majikan yang mempunyai alat perusahaan dan mengambil pimpinan perekonomian. Kelompok kedua, dari kaum pekerja, <i>Nur Arbeiter</i> . Kelompok ketiga, kaum <i>middenstand</i> , yang mempunyai fungsi pekerjaan sendiri dalam masyarakat kapitalisme. Mereka, dapat bertahan karena ia memudahkan mempertalikan produsen dan	Halaman 2 Ada empat kelas, yaitu: (1) pemodal besar, (2) distributor antara produsen pemodal besar kepada konsumen, (3) kaum proletariat yang menjual tenaga kepada pemodal besar, dan (4) kaum dagang kecil yang tidak masuk dalam jalur produksi pemodal besar. Kelompok dagang kecil lebih bawah daripada kaum proletariat karena mereka terpisah dari jalur produksi dan distribusi

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	konsumen. Kelompok keempat yaitu kelas dagang kecil yang mendapatkan kehidupan dari menaikkan harga jualan bagi konsumen. Kelas dagang kecil tak mempunyai di antara <i>middenstand</i> dan proletariat.	usaha kapitalis.
7	Letak: Halaman 2, paragraf 8 Masyarakat kita adalah buah daripada pertempuran antara (<i>Naturalwirtschaft</i>) ekonomi sendiri dengan kapitalisme.	Halaman 2 Masyarakat ekonomi Indonesia buah dari perjuangan berpisah dari kapitalisme.
8	Letak: Halaman 2, paragraf 13 Masyarakat baru berdasar keadilan dan kebenaran, tersusun atas <i>collectivisme</i> , usaha bersama untuk keperluan bersama.	Halaman 2 Usaha ekonomi bersama untuk keperluan bersama berdasar kepada keadilan dan kebenaran bernama Kolektivisme.
9	Letak: Halaman 3, paragraf 1 Kapitalis bangsa kita dan kapitalis bangsa asing dalam perlombaan menurunkan harga “revolusi harga”.	Halaman 3 Beda kapitalis bangsa kita dengan bangsa asing yaitu bangsa kita ikut berjuang menurunkan harga.
10	Letak: Halaman 3, paragraf 4 Membunuh kuman kapitalisme dan menanam cita-cita persamaan. Susunan yang cocok dengan penghidupan ialah badan <i>cooperatie</i> ekonomi untuk membela keperluan umum. Bukan <i>cooperatie</i> yang bersemangat N. V. (persero), individualisme, dan untung sepihak.	Halaman 3 Ekonomi yang sesuai dengan penghidupan yaitu koperasi yang ekonominya membela keperluan umum. Berlawanan dengan <i>cooperation</i> yang bersemangat individualisme dan profit belaka.
i	Wilayah Penelitian Artikel 2	

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia". Nomor 45. Tanggal 10 Desember 1932 (Hatta, 1932f).</p> <p>Resume:</p> <p>Sifat Indonesia Merdeka, yaitu unitarisme atau kesatuan. Adanya persatuan bahasa, persatuan suku bangsa, persatuan kelas ningrat dan marhen, persatuan strata ekonomi (atas, menengah, dan bawah), dan persatuan kelas majikan dan buruh dan kelas bawah lainnya. Persatuan ekonomi lewat koperasi untuk ekonomi bersama. Ekonomi bersama membuat pasar yang menjualkan hasil rakyat serta menempatkan harga yang terjangkau bagi rakyat. Ini menjadi tugas pemerintah dalam perekonomian untuk membahagiakan rakyat dan tidak menyiakan rakyat. Membahagiakan rakyat, misalnya dalam menjangkaukan harga dan menjualkan hasil usaha rakyat. Tidak menyiakan rakyat, misalnya undang-undang dan peraturan/regulasi sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran yang hidup di hati rakyat.</p>	
ii	<p>Letak: Halaman 1-2, paragraf 1-6</p> <p>Persatuan Indonesia harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Merdeka bukan Hindia Belanda yang merdeka dalam naungan penjajah Belanda. Oleh karena itu, konsepnya harus unitarisme bukan pemerintahan pulau dan bukan di bawah Belanda. Persatuan Indonesia yaitu persatuan bahasa, persatuan suku bangsa, dan persatuan semua kelas.</p>	<p>Halaman 1-2</p> <p>Indonesia merdeka bukan di bawah negara asing. Indonesia merdeka bersifat kesatuan dari kesatuan semua kelas hingga suku bahasa.</p>
iii	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 7-11</p> <p>Kelas ekonomi di Indonesia ada</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Kelas ekonomi di</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	tiga, yaitu kelas atas kapitalis dari ras kulit putih, kelas menengah dari ras Tionghoa dan Arab (non kulit putih), dan kelas Marhen atau bawah.	Indonesia ada tiga, yaitu kelas atas kapitalis dari ras kulit putih, kelas menengah dari ras Tionghoa dan Arab (non kulit putih), dan kelas Marhen atau bawah.
iv	Letak: Halaman 2, paragraf 12 Ada dari kita yang sebagai kelas saudagar dari pribumi. Dari kelas saudagar pribumi bisa untuk menurunkan harga.	Halaman 2 Kelas bawah juga ada yang berasal dari saudagar pribumi.
v	Letak: Halaman 2, paragraf 15 Ada kodrat ideologi politik berupa konjungsi naik dan turun. Kapitalisme bisa melemah atau menguat. Begitupun dengan ideologi lainnya.	Halaman 2 Setiap ideologi pemerintahan bisa naik bisa turun.
Vi	Letak: Halaman 3, paragraf 3 Kewajiban pemerintah adalah mendatangkan bahagia bagi rakyat, yaitu (1) menurunkan harga di pasar dan (2) menjualkan hasil produksi kaum marhen (buruh, tani, nelayan, dan pedagang kecil).	Halaman 3 Contoh membahagiakan rakyat yaitu harga terjangkau.
vii	Letak: Halaman 3, paragraf 4 Fungsi saudagar dan pasar yang terikat Indonesia adalah menguatkan dan bekerjasama dengan koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk membahagiakan rakyat. Contohnya menjualkan hasil rakyat dan menurunkan harga.	Halaman 3 Koperasi adalah wadah usaha bersama untuk membahagiakan rakyat lewat harga terjangkau dan menjualkan hasil rakyat.

Sumber: "Nasib Kaoem Dagang Ketjil di Indonesia", Daulat Ra'jat, Nomor 66, tanggal 10 Juli 1933.

“Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia”, Daulat Ra’jat,
Nomor 45, tanggal 10 Desember 1932.

Tabel Artikel Nasib Kaoem Dagang Ketjil Di Indonesia Dan Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia menunjukkan bahwa artikel berjudul, “Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia” (1932, halaman 2-3), bahwa di Indonesia ada tiga kelas, yaitu (1) kelas atas yang berisi orang-orang kapitalis Eropa atau orang kulit putih, (2) kelas menengah yang berisi orang non kulit putih seperti Arab, Tionghoa, dan India, dan (3) kelas bawah ada golongan marhen, saudagar pribumi, buruh pribumi, petani, dan nelayan (Hatta, 1932f). Dalam kelas marhen kelas dagang kecil lebih rendah daripada kelas buruh karena terpisah jalurnya dari kegiatan produksi. Hal ini Nampak pada artikel, “Nasib Kaoem Dagang Ketjil di Indonesia” (1933, halaman 1-2), bahwa dalam kaum marhen ada pedagang pribumi kecil yang lebih bawah daripada kaum proletariat karena terpisah dari jalur kapitalis (Hatta, 1933e).

Mengenai kegiatan produksi dan arah keuntungan dari sosialisme dapat kita lihat dalam artikel, “Ekonomi Ra’jat” di bawah ini:

Tabel IV. 11. Artikel Ekonomi Ra’jat

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra’jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra’jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “Ekonomi Ra’jat”. Nomor 79. Tanggal 20 November 1933 (Hatta, 1933g).</p> <p>Resume:</p> <p>Dalam ideologi perekonomian apapun tetap ada kelas ekonomi produsen, distributor, dan konsumen. Semuanya terjalin lewat kegiatan perekonomian yaitu perniagaan. Untuk memperkuat perekonomian rakyat lewat empat cara, yaitu: (1) mengadakan koperasi produsen, (2) koperasi distributor, (3) koperasi konsumen, dan (4) koperasi permodalan yang dikelola untuk mempercepat putaran uang meski modalnya kecil.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 1</p> <p>Zaman perekonomian sederhana hanya ada dua kelas yaitu: (1) produsen dan (2) konsumen. Jarak hubung kedua kelas itu dekat. Saat perekonomian sudah maju, maka kelas distributor muncul melalui mekanisme perekonomian bernama perniagaan karena hubungan kedua kelas dari produsen dan konsumen sudah terpisah jauh dan bisa didekatkan oleh perniagaan dari proses distribusi. Adanya perniagaan tersebut menunjukkan perekonomian maju semakin banyak seluk</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Kegiatan ekonomi sederhana ada dua kelas, yaitu (1) produsen dan (2) konsumen.</p> <p>Kegiatan ekonomi modern menambah kelas karena jarak hubung produsen dan konsumen jauh sehingga ada tiga kelas, yaitu (1) produsen, (2) distributor, dan (3)</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	beluknya, cabang penghasilannya, dan tingkat perniagaannya.	konsumen.
3	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 2</p> <p>Di masyarakat berideologi perekonomian kapitalis maupun ekonomi sosialis tetap ada persamaan yaitu adanya kegiatan atau pekerjaan (fungsi) produksi dan distribusi. Bedanya adalah pada pencapaian keuntungan. Pada kapitalisme keuntungan mengarah kepada pemodal atau individu, sedangkan pada sosialisme keuntungan mengarah kepada lebih banyak orang, terutama kelas proletariat.</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Kesamaan kapitalis dan sosialis adalah adanya kegiatan produksi. Bedanya, keuntungan pada usaha kapitalisme mengarah kepada kuasa pemodal, sedangkan pada sosialisme keuntungan mengarah kepada kaum proletariat atau marhen.</p>
4	<p>Letak: Halaman 2, paragraf 8-11</p> <p>Masalah pada rakyat kita banyak terdapat produsen kecil, tanpa modal, tak punya akses pasar di kota dan luar negeri, dan lemah menetapkan harga yang menguntungkan rakyat. Masalah rakyat konsumen tergantung harga jual kelas atas dan tergantung kepada proses konsumsi berdasar piutang atau kredit. Solusinya bukan sekedar gerakan seperti anti riba, tetapi lewat memperbaiki atau menata susunan produksi dan konsumsi rakyat. Caranya lewat koperasi produsen, koperasi konsumen, dan permodalan lewat koperasi.</p>	<p>Halaman 2</p> <p>Menata susunan produksi dan konsumsi rakyat. Caranya lewat koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi permodalan.</p>
5	<p>Letak: Halaman 3, paragraf 1-2</p> <p>Koperasi produksi yaitu pada tingkat produksi ekonomi rakyat harus berdaya saing lewat persatuan</p>	<p>Halaman 3</p> <p>Koperasi mempunyai tiga bidang dalam kegiatan ekonomi,</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>produsen dengan pedagang besar, terus berhubungan dengan kaum konsumen, terus berhubungan dengan pedagang menengah dan kecil di tempat konsumen.</p> <p>Koperasi konsumen yaitu badan untuk mengakses produsen dan pasar besar serta tali distribusi untuk mendapatkan harga hasil produksi yang lebih terjangkau.</p> <p>Koperasi bidang permodalan yaitu mengelola uang yang sedikit kumpulannya untuk perputaran yang banyak putarannya bagi rakyat.</p>	<p>yaitu: koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi permodalan, dan koperasi yang mendekatkan konsumen dengan produsen seperti koperasi distribusi.</p>

Sumber: “Ekonomi Ra’jat”, Daulat Ra’jat, Nomor 79, tanggal 20 November 1933.

Dari Tabel Ekonomi Ra’jat, kita mengetahui bahwa sosialisme mempunyai kegiatan ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Kegiatan ekonomi ini juga ada pada liberalisme. Namun bedanya, terletak pada arah keuntungan. Liberalisme menggunakan kapitalisme untuk melakukan kegiatan ekonomi yang arah keuntungannya untuk aktor pemodal, sedangkan sosialisme mengerahkan kegiatan ekonomi untuk keuntungan bagi kaum kelas bawah atau marhen. Karenanya, liberalisme mulai digeser atau disaingi oleh sosialisme di Eropa karena porsi keuntungan lebih banyak kepada masyarakat yang lebih luas. Mengenai ekonomi Sosialisme dapat kita lihat pada artikel berjudul, “*Gilden-Socialisme*”:

Tabel IV. 12. Artikel *Gilden-Socialisme*

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p style="text-align: center;">Wilayah Penelitian</p> <p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, "<i>Gilden-Socialisme</i>". Nomor 87. Tanggal 10 Februari 1934 (Hatta, 1934).</p> <p>Resume:</p> <p><i>Gilden-Socialisme</i> adalah formulasi gabungan tradisi dan modern untuk usaha ekonomi menguasai alat produksi atas nama kaum proletariat yang keuntungannya untuk kaum proletariat yang jumlah masyarakatnya lebih banyak daripada kaum pemodal.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 25-26</p> <p>Propaganda menjadi salah satu sumber pengetahuan. <i>Gilden-Socialisme</i> yaitu susunan masyarakat buruh atau tukang. Maksud <i>Gilden Socialisme</i> ialah supaya kaum buruh mempunyai kontrol dalam industri dan mempunyai <i>self-government</i> sehingga punya hak mengatur sendiri dalam industri itu. <i>Gilden</i> adalah definisi abad pertengahan dan <i>socialisme</i> adalah definisi modern. Pihak ideologi ekonomi yang merujuknya ada komunisme, korporatif sosialisme, federatif sosialisme, atau pun kristen sosialisme. Semuanya merujuk kepada pergaulan hidup sebagai suatu badan produsen atau menghasilkan. Pihak yang mempunyai kuasa atas alat</p>	<p>Halaman 25-26</p> <p><i>Gilden-Sosialisme</i> yang berarti <i>self-government</i> atas kekuatan kaum proletariat. Pelaku ekonomi dalam sosialisme adalah komunisme atau korporatif sosialisme atau federatif sosialisme atau kristen sosialisme. Melalui itu, sosialisme menjadi suatu badan penguasa alat produksi untuk hasilnya bagi kaum proletariat.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	produksi adalah pihak marhen untuk hasilnya bagi semua pihak marhen.	
3	Letak: Halaman 25-26 Cita-cita <i>Gilden-Socialisme</i> yaitu lebih ke usaha bersama atas nama buruh atau yang kemudian dipegang oleh negara atas nama buruh.	Halaman 25-26 Cita-cita <i>Gilden-Socialisme</i> yaitu lebih ke usaha bersama atas nama buruh atau yang kemudian dipegang oleh negara atas nama buruh.

Sumber: “*Gilden-Socialisme*”, Daulat Ra’jat, Nomor 87, tanggal 10 Februari 1934

Dari Tabel *Gilden-Socialisme*, kita mengetahui bahwa Mohammad Hatta menyebutkan ideologi pemerintahan sosialisme juga sama dengan *Gilden-Socialisme*. *Gilden-Socialisme* menunjukkan ideologi ekonomi daripada sosialisme adalah komunisme atau kristen sosialisme atau korporatif sosialisme (Hatta, 1934).

Namun demikian, sosialisme masih mempunyai kekurangan, yaitu terfokusnya kekuasaan dan kepemimpinan kepada satu kelompok proletariat sehingga kelompok lain tidak terayomi. Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, dapat diambil prinsip turunan daripada prinsip utama berkeadilan dan berkebenaran, yaitu:

1. Pemerintah harus memberikan kuasa kepada kaum bawah, kaum menengah, dan kaum atas untuk berbagi menguasai kegiatan ekonomi dari skala produksi, distribusi, permodalan hingga konsumsi. Prinsip ini ada

pada artikel berjudul, “*Gilden-Socialisme*” dan “Ekonomi Ra’jat”.

2. Pemerintah harus memberikan keuntungan ekonomi bagi kaum proletariat/marhen, kaum pemodal pribumi, kaum ningrat, dan kaum menengah, dan kaum atas lainnya yang menjadi rakyat Indonesia. Prinsip ini kita temukan pada artikel berjudul, “Ekonomi Ra’jat”.

E. Kedaulatan Rakyat dan Koperasi

Dari ketiga ideologi pemerintahan berupa feodalisme, liberalisme, dan sosialisme masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada feodalisme, yaitu perjuangan kemakmuran diperuntukan bagi kemahsyuran kerajaan. Kelebihan pada liberalisme, yaitu kemakmuran diperuntukkan bagi dalam negeri lewat kebebasan individu dan kebebasan pikir individu. Kelebihan pada sosialisme, yaitu kemakmuran diperuntukkan bagi mayoritas kaum proletar dalam artian jangkauan kemakmuran mencapai kebersamaan yang lebih luas daripada jangkauan feodalisme dan liberalisme.

Meskipun mempunyai kelebihan, masing-masing ideologi pemerintahan tersebut mempunyai kelemahan berupa *anarchie*. Menurut Mohammad Hatta dalam artikel berjudul, “Kedaulatan Ra’jat Boekan *Anarchie*” menyebutkan (1933, halaman 2), bahwa *anarchie* yaitu wujud tindakan manusia yang merdeka tak terbatas untuk berbuat sesukanya yang menimbulkan kekacauan (Hatta, 1933c). Tindakan sesukanya atau *anarchie* mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, namun muncul ditimpakan kepada manusia

yang berada di luar kelompoknya. Misalnya, (1) pada feodalisme terjadi *anarchie* dari kaum ningrat terhadap kaum budak dalam negeri dan *anarchie* kerajaan berupa penjajahan terhadap negeri luarnya, (2) *anarchie* kaum kapitalis atau pemodal terhadap buruh dan *anarchie* suatu negara atau perusahaan multinasional terhadap luar negeri di tanah jajahan, dan (3) *anarchie* penguasa dari kaum proletar terhadap non-proletariat, seperti kepada pedagang kecil dan tuan tanah dalam negeri.

Anarchie menjadi permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing ideologi pemerintahan melalui berbagai kekuatan per bidang baik ekonomi maupun politik. *Anarchie* muncul dikarenakan lezatnya tampuk kekuasaan yang dimilikinya.

Menurut Mohammad Hatta pada halaman 2 artikel berjudul, “Kedaulatan Ra’jat Boekan *Anarchie*” (1933, halaman 2) menunjukkan kelakuan *anarchie* bisa dicapai ketika suatu ideologi pemerintahan berhasil berjuang mencapai kekuasaan dan merasakan lezatnya kemerdekaan. Mereka bisa berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok di luar pihaknya berupa *anarchie* (Hatta, 1933c).

Untuk tingkatan *anarchie* yang dilakukan oleh feodalisme dan liberalisme ada pada dalam negeri dan ke luar negeri. *Anarchie* yang dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah *anarchie* dari feodalisme dan liberalisme yang pada tingkatan ke luar negeri. *Anarchie* dari feodalisme dan liberalisme kepada luar negeri berupa penjajahan yaitu kolonialisme atau imperialisme. Penjajahan memunculkan struktur organisasi pemerintahan negeri terjajah

berupa *Politiestaat* dan “*Rechts*”-*Staat*. Dua model struktur organisasi pemerintahan berupa *Politiestaat* dan “*Rechts*”-*Staat* muncul karena adanya penjajahan dari feodalisme dan liberalisme. Kemudian, struktur organisasi pemerintahan yang merdeka tanpa campur tangan *anarchie* dari bangsa asing yaitu negara *Rechtstaat*.

1. *Politiestaat*

Struktur organisasi pemerintahan *Politiestaat* menurut Mohammad Hatta dalam artikel, “Djalan Sempit” (1933) berarti pemerintahan tangan besi. Adapun artikel tersebut seperti tabel di bawah ini:

Tabel IV. 13. Artikel Jalan Sempit

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra’jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra’jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “Djalan Sempit”. Nomor 70. Tanggal 20 Agustus 1933 (Hatta, 1933b). Resume: Negeri yang mempunyai struktur organisasi pemerintahan berupa <i>Politiestaat</i> mempunyai kegiatan pemerintahan berdaya kolonial. Kondisi negeri menjadi masa sulit.	
2	Letak: Halaman 1, paragraf 5 <i>Koloniale</i> politik dari struktur organisasi pemerintahan <i>Politiestaat</i> berdasar tangan besi.	Halaman 1 <i>Politiestaat</i> yaitu struktur organisasi pemerintahannya berdasar tangan besi.

Sumber: “Djalan Sempit”, Daulat Ra’jat, Nomor 70, tanggal 20 Agustus 1933.

Tabel Djalan Sempit menunjukkan bahwa *Politiestaat* merupakan kondisi suatu negeri yang struktur organisasi pemerintahan menciptakan kesusahan hidup bagi rakyat karena pemerintah bertindak dengan dasar tangan besi (Hatta, 1933b). Dengan demikian, pemerintah bertindak amat menjajah karena atas perintah negeri asing yang menjajah. Pemerintah di suatu negeri menciptakan penjajahan, jika struktur organisasi pemerintahan di dalam negeri dipegang dengan model kekerasan atas perintah asing yang menjajah. Menurut Yunanto (2021), pemerintah menjadi aktor yang mewujudkan kemakmuran atau penjajahan atau kesulitan hidup seiring dengan sedikit banyaknya kebijaksanaan di hati manusia yang ada dalam pemerintahan (Yunanto, 2021).

Pemerintahan *Politiestaat* menjadi pemerintahan absolut di atas rakyat yang amat berbahaya bagi kemanusiaan dan bagi kelanjutan bangsa. Mereka tidak mengizinkan orang pribumi untuk mengisi organisasi pemerintahan di setiap struktur yang ada, baik pusat maupun daerah. Semua organisasi pemerintahan diisi oleh orang-orang asing. Hal ini disebutkan dalam artikel, “Pengaroeih *Koloniaal Kapitaal* Di Indonesia” (1931, halaman 1), bahwa pemerintahan *Politiestaat* orang-orangnya diangkat oleh bangsa asing. Tujuannya untuk kolonialisme. Indonesia dulu dikuasai pemerintah kerajaan Belanda lewat *cultuur stelsel* lalu bergilir kepada kaum kapitalis partikelir (Hatta, 1931b). Tentang *Politiestaat* juga ada dalam artikel, “*Koloniale Politiek: Dari Politiestaat ke “Rechts”-Staat dan Kembali Lagi ke Politiestaat*” seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV. 14. Artikel *Koloniale Politiek*: Dari *Politiestaat* ke “*Rechts*”-*Staat* dan Kembali Lagi Ke *Politiestaat*

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “<i>Koloniale Politiek</i>: Dari <i>Politiestaat</i> ke “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i> dan Kembali Lagi ke <i>Politiestaat</i>”. Nomor 1. Tanggal 20 September 1931 (Hatta, 1931d).</p> <p>Resume:</p> <p>Indonesia mengalami tiga model struktur organisasi pemerintahan, yaitu <i>Politiestaat</i>, “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i>, dan <i>Rechstaat</i>. <i>Politiestaat</i> adalah penjajahan lewat perkosa senjata, kekerasan, dan hukum siksa. “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i> juga terjadi pada masa penjajahan. Bedanya sudah mulai ada pendasaran pemerintahan terhadap hukum dan perkosa tidak sekuat <i>Politiestaat</i>. <i>Rechtstaat</i> pada masa Indonesia merdeka dengan berdasar hukum yang adil dan benar. Hukum berasal dari sanubari rakyat. Ada Dewan Rakyat yang dipilih lewat pemilu. Ada pengawasan undang-undang dan pelaksanaannya. Ada demokrasi.</p>	
2	<p>Letak: halaman 1, paragraf 5 <i>Politiestaat</i> mempunyai pembuat dan pelaksana hukum dalam satu otoritas. Untuk negara <i>Rechstaat</i>, maka <i>gezag</i> atau otoritas atau pelaksana hukum berbeda dengan yang membuat hukum (ranah politik).</p>	<p>Halaman 1 <i>Politiestaat</i> mempunyai pembuat dan pelaksana hukum dalam satu otoritas.</p>
3	<p>Letak: Halaman 1, paragraf 6 Ada 3 struktur organisasi pemerintahan: <i>Politiestaat</i>, “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i>, dan <i>Rechtstaat</i>. “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i></p>	<p>Halaman 1 Ada 3 struktur organisasi pemerintahan <i>Politiestaat</i>, “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i>, dan <i>Rechtstaat</i>. “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i></p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	ada tanda pisahnya yang berbeda dengan <i>Rechtstaat</i> . Hindia Belanda ada di masa “ <i>Rechts</i> ”- <i>Staat</i> sejak tahun 1854.	ada tanda pisahnya yang berbeda dengan <i>Rechtstaat</i> . Hindia Belanda ada di masa “ <i>Rechts</i> ”- <i>Staat</i> sejak tahun 1854.
4	Letak: halaman 2, paragraf 1-2 <i>Rechstaat</i> yaitu memuat: (1) kekuasaan privat dan publik bersendi hukum, (2) hukum dirasa adil dan benar oleh rakyat, (3) berazas demokrasi, (4) ada Dewan Rakyat yang dipilih rakyat, dan (5) Dewan Rakyat berfungsi menimbang semua undang-undang yang mengatur kehidupan rakyat. “ <i>Rechts</i> ”- <i>Staat</i> mempunyai: (1) hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran di hati rakyat dan (2) hukum dari penguasa (penjajah).	Halaman 2 <i>Rechstaat</i> tanpa tanda “-“ memuat: (1) kekuasaan privat dan publik bersendi hukum, (2) hukum dirasa adil dan benar oleh rakyat, (3) berazas demokrasi, (4) ada Dewan Rakyat yang dipilih rakyat, dan (5) Dewan Rakyat berfungsi menimbang semua undang-undang yang mengatur kehidupan rakyat.
5	Letak: Halaman 2, paragraf 5 Indonesia dijajah oleh Belanda: (1) awalnya dengan penundukan lewat perkosa, (2) <i>cultuur stelsel</i> yang memusnahkan kehidupan rakyat, dan (3) autokrasi. Karenanya, Indonesia menjadi negara bagian Belanda berbentuk <i>Politiestaat</i> . <i>Politiestaat</i> akan bisa berubah dengan adanya intervensi ideologi pemerintahan lainnya. Misalnya, revolusi	Halaman 2 Indonesia dijajah oleh Belanda: (1) awalnya dengan penundukan lewat perkosa, (2) <i>cultuur stelsel</i> yang memusnahkan kehidupan rakyat, dan (3) autokrasi. Indonesia pernah berbentuk <i>Politiestaat</i> . <i>Politiestaat</i> akan berubah dengan adanya intervensi ideologi pemerintahan lainnya.

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	liberal di tahun 1848 yang mengganti autokrasi ke demokrasi liberal.	
6	Letak: Halaman 2, paragraf 7 <i>Politiestaat</i> tidak bersandar hukum. Jika “ <i>Rechts</i> ”- <i>Staat</i> sudah bersandar hukum, meski kehendak penguasa atau penjajah bukan rasa adil dan benar di hati rakyat.	Halaman 2 <i>Politiestaat</i> tidak bersandar hukum. Jika <i>Recht-Staat</i> sudah bersandar hukum, meski tidak adil dan benar di hati rakyat.
7	Letak: Halaman 2, paragraf 9 Perkosa yaitu sebuah pekerjaan yang menundukkan orang banyak dengan tiada disetujui oleh orang banyak tersebut. Contohnya, perkosa senjata, kekerasan, hukum, dan penindasan.	Halaman 2 Perkosa yaitu sebuah pekerjaan yang menundukkan orang banyak dengan tiada disetujui oleh orang banyak tersebut. Contohnya, perkosa senjata, kekerasan, hukum, dan penindasan.
8	Letak: Halaman 2, paragraf 9 Dalam <i>Rechtstaat</i> atau negara hukum juga ada diktator dan perkosa. Namun, sifat masanya tidak mutlak karena ada pihak lain yang mempunyai kesempatan yang sama bersaing untuk berbuat baik dalam berkuasa di tingkat negara.	Halaman 2 Dalam <i>Rechtstaat</i> juga ada diktator dan perkosa namun tidak langgeng atau ada pesaingnya.

Sumber: “*Koloniale Politiek: Dari Politiestaat ke “Rechts”-Staat dan Kembali Lagi ke Politiestaat*”, Daulat Ra’jat, Nomor 1, tanggal 20 September 1931.

Dari Tabel *Koloniale Politiek: Dari Politiestaat ke "Rechts"-Staat dan Kembali Lagi ke Politiestaat*, bahwa Indonesia mengalami fase struktur organisasi pemerintahan yang berbeda-beda pada masanya. Perbedaan ditilik dari pihak siapa yang berkuasa atau menyetir pemerintahan di dalam negeri Indonesia yang belum merdeka dan ketika merdeka. Struktur organisasi pemerintahan ada tiga, yaitu: (1) *Politiestaat*, (2) "*Rechts*"-*Staat*, dan (3) *Rechtstaat*.

Politiestaat adalah struktur organisasi pemerintahan penjajah yang menaklukkan Indonesia dengan cara penjajahan. Penjajahannya lewat perkosa senjata, kekerasan, hukum, dan penindasan. Dasar hukum pemerintahan penjajah ini semuanya berdasarkan hukum yang jahat. Rakyat terjajah benar-benar dalam kondisi terancam nyawanya. Menurut Mohammad Hatta (1931) bahwa *Politiestaat* dapat berakhir dengan adanya campur tangan asing yang berimbas menolong rakyat di tempat terjajah. Misalnya, adanya revolusi liberal di Belanda tahun 1848. Tahun 1848 menjadi titik akhir bergantinya struktur organisasi pemerintahan *Politiestaat* ke "*Rechts*"-*Staat* di Indonesia (Hatta, 1931d).

2. "*Rechts*"-*Staat*

"*Rechts*"-*Staat* merupakan struktur organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh negeri penjajah terhadap wilayah kolonial, seperti Hindia Belanda. Beda dengan *Politiestaat*, bahwa "*Rechts*"-*Staat* penggunaan senjata sudah mulai berkurang dan bahkan penggunaan struktur organisasi pemerintahan mulai menggunakan dasar hukum yang memanusiakan, meskipun hukum bersandar

bukan pada keadilan dan kebenaran yang tumbuh di hati rakyat (Hatta, 1931d).

Di Indonesia, pengaruh “*Rechts*”-*Staat* dimulai tahun 1848 ketika liberalisme sudah diterima di Belanda menggantikan feodalisme lewat salah satu figurnya yang bernama Thorbecke (Hatta, 1931c). Meskipun Indonesia sudah masuk ke “*Rechts*”-*Staat*, tetap kondisi Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda yang juga disebut sebagai negara dalam negara atau *tweede kamer*. Hal ini nampak pada artikel di bawah ini:

Tabel IV. 15. Artikel *Non-Cooperation*: 1: *Non-Cooperation*-PNI

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra’jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra’jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “<i>Non-Cooperation</i>: 1: <i>Non-Cooperation</i>-PNI”. Nomor 47. Tanggal 30 Desember 1932 (Hatta, 1932d).</p> <p>Resume:</p> <p>Perjuangan rakyat merdeka dalam rangka membentuk pemerintahan sendiri dengan cara <i>Non-cooperation</i>. <i>Non-cooperation</i> bisa duduk satu meja dengan lawan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat dengan sifat oposisi absolut. Ciri <i>Non-Cooperation</i>: (1) untuk mempunyai Dewan Rakyat, (2) pemerintahan sendiri, dan (3) negara sendiri. Berbeda dengan “<i>Rechts</i>”-<i>Staat</i> bercirikan: <i>Tweede Kamer</i> atau dewan perwakilan negara lain, pemerintahan dominion, dan negara dalam negara.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 1</p> <p>Mohammad Hatta disuruh menerima <i>Tweede Kamer</i>. Beliau menolak. <i>Non-</i></p>	<p>Halaman 1</p> <p><i>Tweede Kamer</i> adalah pemerintahan yang mempunyai parlemen di</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Cooperation</i> untuk sesuai azasnya tidak masuk dalam <i>Tweede Kamer</i> . <i>Tweede Kamer</i> mempunyai parlemen di bawah negara penjajah.	bawah negara penjajah.
3	Letak: Halaman 1-2 <i>Non-Cooperation</i> berarti tidak bekerja bersama-sama dengan pihak negara penjajah. Berdiskusi dan bersidang dengan pihak negara penjajah boleh saja untuk berjuang menolak imperialisme. <i>Non-Cooperation</i> adalah senjata pergerakan melawan imperialism dan beroposisi penuh.	Halaman 1 <i>Non-cooperation</i> adalah senjata pergerakan melawan imperialism dan beroposisi penuh.
4	Letak: Halaman 4, paragraf 8 <i>Staat</i> dalam <i>staat</i> atau kerajaan dalam kerajaan atau <i>tweede kamer</i> contohnya, Irlandia dalam kerajaan besar Britania Raya.	Halaman 4 <i>Tweede kamer</i> adalah negara dalam negara.

Sumber: “*Non-Cooperation: 1: Non-Cooperation-PNI*”, Daulat Ra’jat, Nomor 47, tanggal 30 Desember 1932.

Tabel Artikel *Non-Cooperation: 1: Non-Cooperation-PNI* menunjukkan “*Rechts*”-*Staat* yang dua katanya dipisah dengan garis “-” bukan sebagai negara hukum yang sebenarnya, tetapi negara hukum semu yang masih di bawah kekuasaan negara penjajah. Menurut Mohammad Hatta (1932, halaman 1) “*Rechts*”-*Staat* disebut dengan negeri masa imperialisme. Jadi Belanda terhadap Indonesia dan Inggris terhadap Irlandia masa 1930an atau

Negara sebelum merdeka disebut sebagai negara imperialis dan negeri yang dijajah disebut sebagai *tweede kamer* (Hatta, 1932d). Kaum kapitalis dari negara penjajah amat berkuasa. Perusahaan-perusahaan yang ada di tanah jajahan berfungsi untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang hasilnya cocok untuk pasar ekspor dan menambah kas negara. Mohammad Hatta (1931, halaman 1) menyebut perusahaan dari imperialisme tersebut sebagai perusahaan partikelir (Hatta, 1931b). Oleh karena itu, orang-orang dalam struktur organisasi pemerintahan di tanah jajahan pun diisi banyak orang asing, sedangkan orang pribumi amat sedikit dan pada posisi yang tidak strategis. Beda daripada *Politiestaat* dengan “*Rechts*”-*Staat* yaitu model pelibatan orang pribumi dalam struktur organisasi pemerintahan. “*Rechts*”-*Staat* melibatkan orang Bumiputera dalam pemerintahannya dan juga mendidik sebagian orang dari bangsa negeri terjajah. Hal ini dapat kita temui dalam artikel berjudul, “*Associatie-Politiek* Lagi?”:

Tabel IV. 16. Artikel *Associatie-Politiek* Lagi?

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “<i>Associatie-Politiek</i> Lagi?” Nomor 76. Tanggal 20 Oktober 1933 (Hatta, 1933a).</p> <p>Resume:</p> <p>Sebuah pemerintahan yang dibentuk oleh negara lain, maka negara yang ada belum merdeka sepenuhnya. Contoh, negara Hindia Belanda. Hindia Belanda mempunyai assosiasi politik antara negara tua dengan negara muda sebagai pengekor penjajah. Pemerintah yang merdeka adalah yang terlepas dari</p>	

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	penjajah dan yang terbentuk dengan kekuatan gabungan (asosiasi politik) bumiputera yaitu orang yang mengakui tanah air tanpa perbedaan.	
2	<p>Letak: Halaman 226-227</p> <p><i>Politiestaat</i> berisi <i>cultuur stelsel</i>. Ekonomi jajahan masuk ke dalam kekuasaan finansial yang keras hati.</p> <p><i>“Rechts”-Staat</i> berisi <i>koloniale politiek</i> seperti <i>etische koers</i> atau politik balas budi yang diajukan oleh Brooshooft dan Van Deventer. Supaya jajahan tidak melulu untuk negara penjajah, tetapi juga untuk negara terjajah sendiri. Politik balas budi menganjurkan cita-cita <i>associatie</i> (persatuan) antara Belanda dan Indonesià sehingga Indonesia dididik sampai cakap mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap menjadi bagian Belanda.</p> <p><i>Associatie Politiek</i> lain yaitu bukan persatuan Belanda dan Hindia, melainkan antara penduduk asli tidak memandang kulit dan warna, asal dan nafsu hidup, melainkan memandang Tanah Air saja yang mengakui Noesa Hindia sebagai tanah airnya. Itu adalah bumiputra bukan orang indo. Karena indo berpihak kepada penjajah Belanda dan sering</p>	<p>Halaman 226-227</p> <p><i>“Rechts”-Staat</i> berisi <i>koloniale politiek</i> bersifat politik balas budi yang diajukan oleh Brooshooft dan Van Deventer. Supaya jajahan tidak melulu untuk negara penjajah, tetapi juga untuk negara terjajah sendiri. Politik balas budi menganjurkan cita-cita <i>associatie</i> (persatuan) antara Belanda dan Indonesià sehingga Indonesia dididik sampai cakap mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap menjadi bagian Belanda.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	menyangka mereka itu orang Belanda. Indo yaitu orang kombinasi Belanda dengan orang bumiputera.	

Sumber: “*Associatie-Politiek* Lagi?” Daulat Ra’jat, Nomor 76, tanggal 20 Oktober 1933.

Tabel *Associatie-Politiek* Lagi? menunjukkan “*Rechts*”-*Staat* berkehendak membentuk struktur organisasi pemerintahan yang dibentuk orang asing untuk kepentingan negara penjajah sekaligus memberikan politik balas budi. Beberapa orang-orang pribumi dilibatkan dan didik dalam format Pendidikan yang dinamakan sebagai Politik Balas Budi (Hatta, 1933a).

Kita mengetahui bahwa struktur organisasi pemerintahan yang ada dalam suatu wilayah terjajah terdapat dua hal, yaitu *Politiestaat* dan “*Rechts*”-*Staat*. Kemudian, negara yang sudah merdeka disebut sebagai *Rechtstaat* tanpa dua kata dipisah oleh tanda “-“.

3. *Rechtstaat*

Struktur organisasi pemerintahan ketiga yang bernama negara hukum atau *Rechtstaat*. *Rechtstaat* merupakan negara yang sudah merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri. Negara *Rechtstaat* mempunyai sandaran pada konstitusi untuk mengawal berjalannya pemerintahan. *Rechstaat* tanpa diperkosa pihak asing dan sudah merdeka. Mereka yang sebagai *Rechstaat* bukan sebagai negara dalam negara. *Rechtstaat* sudah lebih

maju daripada *Politiestaat* dan “*Rechts*”-*Staat*. Mohammad Hatta menyatakan dalam artikel berjudul, “Pemoeda Dalam Krisis” (1933, halaman 235) negara *Rechtstaat* berbeda dengan negara terjajah karena sudah merdeka (Hatta, 1933f). Adapun isi daripada artikel, “Pemoeda dalam Krisis” seperti di bawah ini:

Tabel IV. 17. Artikel Pemoeda Dalam Krisis

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Lokasi terhadap Perseorangan. Tokoh bernama Mohammad Hatta. Karya berupa artikel. Penerbitnya adalah Kaum Daulat Ra'jat. Nama Terbitan yaitu Daulat Ra'jat untuk 10 hari sekali. Kantor Redaksi di Gang Lontar IX/42, Batavia-Centrum. Karya berjudul, “Pemoeda Dalam Krisis”. Nomor 77. Tanggal 30 Oktober 1933 (Hatta, 1933f).</p> <p>Resume:</p> <p>Pemerintah harus menjadi pemimpin yang mempunyai intelektual untuk berorientasi kepada pemajuan dan perbaikan nasib rakyat. Pemerintah bisa diisi oleh pemuda yang harus memanfaatkan masukan luar dan internal untuk memajukan kehidupan rakyat.</p>	
2	<p>Letak: Halaman 234, paragraf 4</p> <p>Rakyat yang mendapat pendidikan dan pelajaran, maka matanya terbuka melihat keadaannya dan keberaniannya timbul untuk haknya. Rakyat yang tahu berpikir tentu bersahaja kepada pemerintah sendiri.</p>	<p>Halaman 234</p> <p>Rakyat yang mendapat pendidikan dan pelajaran, maka matanya terbuka melihat keadaannya dan keberaniannya timbul untuk haknya. Rakyat yang tahu berpikir tentu bersahaja kepada pemerintah sendiri.</p>
3	<p>Letak: Halaman 234, paragraf 5</p> <p>Pemerintah harus memberikan contoh heroisme dan pengorbanan diri sehingga rakyat matanya terbuka dan</p>	<p>Halaman 234</p> <p>Pemerintah harus memberikan contoh heroisme dan pengorbanan diri sehingga rakyat matanya terbuka dan dapat meniru.</p>

No.	Data Penelitian	Hasil Penelitian
	dapat meniru.	
4	Letak: Halaman 235, paragraf 12-13 Hindia Belanda atau tanah jajahan dalam <i>Politiestaat</i> tidak sama dengan Indonesia yang <i>Rechtstaat</i> meski satu lokasi. Karena beda struktur pemerintahan. <i>Politiestaat</i> menyatakan kedudukan dalam penjajahan yang mana masyarakat Indonesia tidak terpelihara dan tidak mempunyai alat modern untuk mencapai kemajuan.	Halaman 235 Hindia Belanda atau tanah jajahan dalam <i>Politiestaat</i> tidak sama dengan Indonesia <i>Rechtstaat</i> meski satu lokasi karena beda struktur pemerintahan.
5	Letak: Halaman 236, paragraf 4 Pemerintahan modern Indonesia akan terus menempuh padang kemajuan serta akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan perbaikan nasib.	Halaman 236 Pemerintahan modern Indonesia akan terus menempuh padang kemajuan serta akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan perbaikan nasib.

Sumber: “Pemoeda Dalam Krisis”, Daulat Ra’jat, Nomor 77,
tanggal 30 Oktober 1933.

Tabel Pemoeda Dalam Krisis menjelaskan negara yang mempunyai organisasi pemerintahan bernama *Rechtstaat* bukan negara terjajah, tetapi negara yang merdeka karena meskipun satu lokasi jika sudah merdeka mempunyai pemerintahan yang berbeda (Hatta, 1933f). *Rechtstaat* mempunyai hukum untuk mengatur masyarakat dan privat, mempunyai hukum yang sesuai dengan rasa

adil dan benar di hati rakyat, dan mempunyai perangkat pemerintahan sendiri, terutama Dewan Rakyat (Hatta, 1931d).

Dari ketiga struktur organisasi pemerintahan dari *Politiestaat* ke “*Rechts*”-*Staat* hingga *Rechtstaat*, menurut Mohamamd Hatta, yaitu mempunyai prinsip utama indigenis dan konstitusional dengan turunan prinsipnya berupa:

- a. Mempunyai hukum dan perundang-undangan yang lahirnya dengan rasa keadilan dan kebenaran yang tumbuh di hati sanubari rakyat
- b. Mempunyai perangkat pemerintahan dari dewan rakyat hingga eksekutif

Dua prinsip turunan ada dalam artikel, “*Koloniale Politiek*: Dari *Politiestaat* ke “*Rechts*”-*Staat* dan Kembali Lagi ke *Politiestaat*”. Adapun manfaatnya yaitu pemerintahan dapat mewujudkan perbaikan dan pemajuan nasib rakyat. Manfaat ini ada dalam artikel, “Pemoeda Dalam Krisis”.

4. Kedaulatan Rakyat Dalam *Rechtstaat*

Ideologi pemerintahan menurut Mohammad Hatta ada feodalisme, liberalisme, dan sosialisme. Ketiganya mempunyai kekurangan yang disebabkan oleh *anarchie* daripada terfokusnya status kepemimpinan dan kekuasaan kepada satu kelas. Feodalisme terfokus kepada kaum ningrat. Liberalisme terfokus kepada kaum pemodal. Dan, Sosialisme terfokus kepada kaum proletariat. Mohammad Hatta tidak ingin *anarchie* ini terjadi. Oleh karena itu, beliau membuat ideologi pemerintahan Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan Rakyat adalah ideologi pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dan pemerintah sebagai pemimpin. Pemerintah sebagai pemimpin karena menjalankan perwakilan dari rakyat. Jadi penguasa tetap pada porsi rakyat dan pemimpin tetap pada porsi pemerintah. Jadi penguasa dan pemimpin tidak dijadikan dalam satu kelas.

Hal ini dapat kita ketahui pada konsep Daulat Rakyatku bukan Daulat Tuanku. Daulat Rakyatku dan Daulat Tuanku adalah dua ideologi pemerintahan yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Contoh Daulat Tuanku adalah patuhnya pemerintah atau rakyat kepada raja dengan kalimat ucapan, “Daulat Tuanku”. Menurut Mohammad Hatta, Daulat Tuanku adalah *ancient regime* yang sejarahnya menekan Daulat Rakyatku. Karenanya Daulat Rakyatku yang harus dikembangkan dan diperkuat. Jika Daulat Tuanku yang dikembangkan dan diperkuat, maka itu akan menjadi feodalisme, liberalisme, atau sosialisme yang melakukan bagian daripada aspek *anarchie*. Karena pada liberalisme, feodalisme, atau sosialisme, jika berkuasa dan memimpin akan menjadi Daulat Tuanku.

Tolakan Mohammad Hatta terhadap ideologi Daulat Tuanku disebutkan dalam artikel berjudul, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra’jat” yang diterbitkan oleh Daulat Ra’jat pada nomor 12 tanggal 10 Januari 1932 (1932, halaman 2-3), bahwa Indonesia sejak dahulu sudah punya demokrasi asli, yaitu Daulat Tuanku dan Daulat Rakyatku. Daulat Rakyatku sejak dahulu tertindih oleh Daulat Tuanku. Daulat Tuanku merujuk kepada penguasa yang memimpin. Contohnya, kaum bangsawan. Kedaulatan Rakyat

cukup mengambil Daulat Rakyatku bukan Daulat Tuanku. Kedaulatan Rakyat dibangun pada Perumahan Indonesia Merdeka berbasis pergaulan hidup rakyat (Hatta, 1932a).

Rakyat sebagai penguasa kemudian memilih pemimpin berupa Dewan Rakyat lalu Dewan Rakyat memilih pemimpin eksekutif. Jadi rakyat tetapi di atas pemerintah. agar rakyat tidak ditindas oleh pemerintah yang kemudian beralih kepada Daulat Tuanku. Artikel, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra'jat” Mohammad Hatta (1932, halaman 2-3) menyebutkan Daulat Rakyatku membentuk Dewan Rakyat dari desa bersusun-susun sampai ke pusat bergabung (Hatta, 1932a). Jadi pemerintah harus punya slogan, “Daulat Rakyatku”.

Slogan ini didukung oleh Mohammad Hatta (1932) dalam artikel berjudul, “*Non-Cooperation: 1: Non-Cooperation-PNI*” pada Daulat Ra'jat Edisi Nomor 47 tanggal 30 Desember 1932, bahwa rakyat mempunyai Dewan Rakyat, pemerintahan sendiri, dan negara sendiri yang merdeka (Hatta, 1932d).

Kedaulatan Rakyat berjalan di negara yang merdeka dan akan membawa kedamaian. Kedamaian diwujudkan dalam persatuan semua kelas dan pembagian porsi pemimpin terpisah dengan penguasa. Kelas dari feodalisme, liberalisme, dan sosialisme disatukan oleh Kedaulatan Rakyat untuk kemakmuran semuanya. Kedaulatan Rakyat menyatukan semua kelas karena dalam ketiga isme tersebut juga mempunyai rakyat yang harus diayomi lewat persatuan. Menurut Mohammad Hatta (1932) dalam artikel berjudul, “Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia” yang

diterbitkan Daulat Ra'jat Edisi Nomor 45 tanggal 10 Desember 1932 menyebutkan bahwa Persatuan Indonesia berwujud unitarisme yang dimulai oleh persatuan bahasa, persatuan suku bangsa, dan persatuan kelas, seperti bangsawan dan marhen (Hatta, 1932f). Melalui persatuan kelas, maka pemakmuran rakyat terwujud.

Adapun ideologi ekonomi dalam Kedaulatan Rakyat yaitu Kolektivisme. Kolektivisme yaitu usaha ekonomi bersama untuk keperluan bersama berdasar kepada keadilan dan kebenaran. Kunci daripada kolektivisme yaitu berbagi rejeki atau oportunitas. Semua kelas saling berbagi menguasai kegiatan ekonomi dari skala produksi, distribusi, permodalan hingga konsumsi.

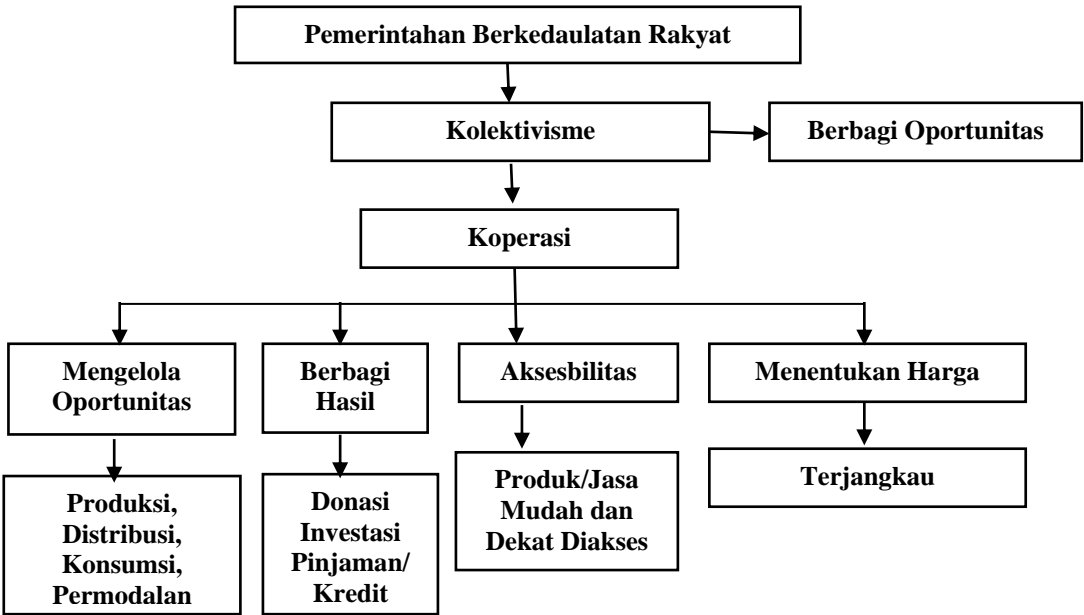
Menurut Mohammad Hatta (1933, halaman 2-3) dalam artikel berjudul, "Nasib Kaoem Dagang Ketjil di Indonesia" Daulat Ra'jat Edisi nomor 66 tanggal 10 Juli 1933 menyebutkan bahwa usaha ekonomi bersama untuk keperluan bersama berdasar kepada keadilan dan kebenaran bernama kolektivisme. Adapun motor ekonomi dari kolektivisme yaitu koperasi. Koperasi yaitu gerakan atau motor kolektivisme yang kegiatan ekonominya membela keperluan umum dan berlawanan dengan semangat untung belaka (Hatta, 1933e).

Dalam artikel yang lain (1932, halaman 3) berjudul, "Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia" Mohammad Hatta menunjukkan bahwa koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi untuk membahagiakan rakyat (Hatta, 1932f). Pemerintah harus membentuk koperasi sebagai arena kerjasama antara pemerintah dan rakyat serta rakyat dengan rakyat.

Macam koperasi yang dibentuk pada area produksi, distribusi, konsumsi, dan permodalan. Dalam artikel berjudul, “Ekonomi Ra’jat” Daulat Ra’jat Edisi Nomor 79, tanggal 20 November 1933 (1933, halaman 2-3) menyebutkan bahwa koperasi terdiri dari koperasi semua lini ekonomi dari hulu hingga hilir. Ada koperasi terkait produksi, distribusi, konsumsi, dagang, dan permodalan. Koperasi produksi yaitu, pada tingkat produksi, ekonomi rakyat harus berdaya saing lewat persatuan produsen juga bisa bergabung dengan pedagang besar. Pada tingkatan koperasi terkait konsumsi, rakyat terus berhubungan dengan kaum konsumen, terus berhubungan dengan pedagang menengah dan kecil di tempat konsumen, serta distributor dan produsen. Kemudian, koperasi terkait permodalan yaitu mengelola uang yang sedikit kumpulannya untuk perputaran yang banyak yang putarannya bagi anggota (Hatta, 1933g).

Koperasi harus menyentuh semua lini kegiatan ekonomi. Dari hulu sampai dengan hilir. Dari arena produksi hingga konsumsi dan permodalan. Koperasi mempunyai membawa misi kolektivisme, yaitu kerjasama saling berbagi oportunitas kecakapan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah. Dari misi tersebut, maka koperasi menjadi motor ekonomi saling berbagi oportunitas yang berasal dari kecakapan masing-masing rakyat. Mengenai bagan alur Kedaulatan Rakyat sampai dengan koperasi yang menjadi motor ekonomi berbagi oportunitas seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar IV. 1. Bagan Koperasi Sebagai Motor Ekonomi Kedaulatan Rakyat



Sumber: Hasil Penelusuran Peneliti Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa kolektivisme adalah turunan dari pada Kedaulatan Rakyat. Kolektivisme sebagai ideologi ekonomi yang menekankan berbagi oportunitas atau berbagi rejeki. Oportunitas bisa berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya ekonomi lainnya. Oportunitas kemudian dikelola oleh koperasi. Koperasi sebagai turunan daripada kolektivisme. Koperasi juga sebagai motor ekonomi. Karenanya koperasi mempunyai ciri, yaitu:

- a. Mengelola oportunitas dari arena produksi, distribusi, konsumsi, dan permodalan.

- b. Berbagi hasil dengan tahapan tertinggi donasi, tahapan menengah investasi, dan tahapan terendah berbagi pinjaman/kredit. Berbagi hasil sebaiknya dikelola oleh koperasi arena permodalan.
- c. Menciptakan aksesibilitas yang mudah dan dekat pada setiap arena
- d. Menentukan harga

Koperasi harus mampu menentukan harga agar pergaulan hidup tetap mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap kebutuhan rakyat. Koperasi juga harus berbagi hasil. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan oportunitas harus membawa misi berbagi rejeki. Setiap arena ekonomi, koperasi harus menyalurkan pembagian hasil. Pembagian hasil paling ideal adalah donasi. Posisi menengah adalah investasi. Dan, posisi terendah adalah berbagi penyaluran kredit/pinjaman. Pembagian hasil pengelolaan oportunitas daripada arena produksi hingga konsumsi sebaiknya dipegang oleh koperasi permodalan.

Koperasi permodalan membagikan hasil dari pengelolaan oportunitas melingkupi bagi donasi, investasi, dan pinjaman/kredit. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa model Koperasi Simpan Pinjam (KSP) saat ini yang mengejar kredit perbankan berada pada level terendah dalam misi kolektivisme koperasi Mohammad Hatta. Koperasi juga harus mampu membawa misi aksesibilitas berupa mendekatkan dan memudahkan akses produk/jasa dari arena produksi, distribusi, konsumsi, dan permodalan kepada rakyat yang ingin memanfaatkannya.

Koperasi dalam Kedaulatan Rakyat tidak sekedar menyatukan usaha ekonomi anggota-anggota, tetapi juga menyangkut usaha kemerdekaan pikir untuk menumbuhkan budi pekerti. Karena rakyat yang berkuasa harus berpekerti atau berilmu pengetahuan, seperti yang dijadikan kekuatan oleh kaum liberalisme, yaitu rasionalisasi dalam ilmu pengetahuan.

Dengan adanya koperasi, berbagi oportunitas akan mewujudkan model pemerintahan yang berbagi kemudahan, keadilan, dan kebenaran bagi berjalannya proses pemakmuran rakyat. Karena rakyat yang berkuasa, maka pemerintah memberikan upeti bagi rakyatnya. Peraturan atau perbuatan pemerintah atau menurut Yunanto (2021, halaman 12) berarti *governing* untuk perbuatan pemerintah (Yunanto, 2021) harus mengikuti rakyat yang berkuasa agar rakyat tidak terhina dan tidak tersiakan. Dengan pemerintah menempatkan diri sebagai pemimpin dan rakyat sebagai penguasa, maka negara akan menjadi jauh dari negara gagal.

Governing bisa berupa perundang-undangan atau peraturan yang mempunyai sanksi atau benefit. *Governing* menurut Mohammad Hatta harus tidak menyia-nyiakan rakyat. Dengan begitu, ideologi Kedaulatan Rakyat dapat mencapai Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mohammad Hatta dalam artikel berjudul, “*Non-Coöperatie Boekan Non-Actie*” terkait *governing* (1932, halaman 2), bahwa perbuatan pemerintah harus disusun dengan pendekatan tidak menyia-nyiakan rakyat (Hatta, 1932h). Kita dapat mengambil

prinsip turunan daripada prinsip utama keadilan dan kebenaran, yaitu:

1. Ideologi ekonomi daripada Kedaulatan Rakyat adalah kolektivisme. Kolektivisme yaitu usaha ekonomi bersama untuk keperluan bersama dalam rangka berbagi oportunity berdasar kepada keadilan dan kebenaran. Prinsip ini ada pada artikel berjudul, “Nasib Kaoem Dagang Ketjil di Indonesia” Daulat Ra’jat Edisi nomor 66 tanggal 10 Juli 1933.
2. Motor ekonomi dalam Ideologi Pemerintahan Kedaulatan Rakyat bernama koperasi. Koperasi yaitu motor ekonomi untuk membahagiakan rakyat. Prinsip ini ada pada artikel berjudul, “Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia”. Koperasi mempunyai ciri, yaitu:
 - a. Mengelola setiap oportunity dalam arena produksi, distribusi, konsumsi, dan permodalan
 - b. Berbagi hasil dengan tahapan tertinggi donasi, tahapan menengah investasi, dan tahapan terendah berbagi pinjaman/kredit. Berbagi hasil sebaiknya dikelola oleh koperasi arena permodalan.
 - c. Menciptakan aksesibilitas yang mudah dan dekat pada setiap arena.
 - d. Menentukan harga.

Adapun manfaatnya, yaitu:

- a. memisahkan porsi penguasa dan pemimpin. Porsi penguasa untuk rakyat dan porsi pemimpin untuk

pemerintah. Slogan pemerintah, yaitu “Daulat Rakyatku”. Prinsip ini ada pada artikel berjudul, “Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra'jat”.

- b. mewujudkan masyarakat yang semua kelasnya bersatu dan berdamai. Manfaat ini ada pada artikel berjudul, “Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kita dapat menyimpulkan prinsip utama, prinsip turunan, dan manfaat adanya pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran untuk kemakmuran sebagai berikut:

1. Prinsip utama pertama berupa pemerintahan berkeadilan dan berkebenaran. Adapun prinsip turunannya, yaitu:
 - a. Kemerdekaan kepada semua bidang ekonomi, politik, dan sosial,
 - b. Kemerdekaan bagi dalam negeri dan luar negeri atau tanpa penjajahan antar bangsa,
 - c. Semua kelas berhak berkegiatan di skala produksi, distribusi, konsumsi, dan permodalan,
 - d. Semua kelas berhak memperoleh keuntungan atau berbagi rejeki/oportunitas,
 - e. Menjalankan kegiatan usaha secara kolektif, dan
 - f. Menjalankan kegiatan koperasi dengan ciri: (1) mengelola oportunitas pada arena produksi, distribusi, konsumsi, dan permodalan; (2) berbagi hasil melalui donasi, investasi, dan kredit; (3) aksesibilitas; dan (4) mampu menentukan harga.

Adapun manfaatnya, yaitu:

- a. Menuju kemakmuran bersama,
- b. Berbagi porsi rakyat sebagai penguasa dan pemerintah sebagai pemimpin, dan

- c. Semua kelas bersatu dan berdamai.
- 2. Prinsip utama kedua, yaitu pemerintahan berdaulat rakyatku bukan daulat tuanku. Adapun prinsip turunannya, yaitu:
 - a. Pemerintahan yang tak menindas rakyat,
 - b. Pemerintahan yang membela rakyat,
 - c. Rakyat di atas legislatif dan legislatif di atas eksekutif, dan
 - d. Pemerintah harus bisa diperintah rakyat.
 Adapun manfaatnya, yaitu:
 - a. Penguatan ekonomi rakyat,
 - b. Mempunyai pemerintahan sendiri, dan
 - c. Mempunyai pemerintahan pusat dan daerah.
- 3. Prinsip utama ketiga, yaitu pemerintahan yang indigenus dan konstitusional. Adapun prinsip turunannya, yaitu adanya peraturan dan perundangan yang sesuai keadilan dan kebenaran yang tumbuh dari hati sanubari rakyat. Manfaatnya, yaitu:
 - a. Adanya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, dan
 - b. Perbaikan dan Pemajuan Nasib Rakyat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti kepada pemerintah, yaitu agar pemerintahan mempunyai prinsip utama berupa:

- a. Pemerintahan yang berbasis keadilan dan kebenaran dengan cara merevitalisasi undang-undang tentang koperasi agar koperasi mempunyai ciri: (1) mengelola oportunitas pada arena produksi,

- distribusi, konsumsi, dan permodalan; (2) berbagi hasil melalui donasi, investasi, dan kredit; (3) aksesibilitas; dan (4) mampu menentukan harga.
- b. Pemerintahan yang berdaulat rakyatku bukan daulat tuanku dengan cara membuat: (1) undang-undang tentang legislatif yang berisi rakyat di atas legislatif dan tata cara rakyat menghentikan serta mengganti anggota legislatif dan (2) undang-undang tentang eksekutif yang berada di bawah legislatif.
 - c. Pemerintahan yang *indigenous* dan konstitusional dengan cara membumikan slogan Sila Kelima Pancasila dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembuatan pemerintahan dari pusat hingga daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Kelemahan penelitian ini ialah:

1. Masih terfokus kepada jalur munculnya koperasi dalam Kedaulatan Rakyat, penelitian selanjutnya diharapkan bisa menyentuh bidang lainnya, seperti keuangan, politik, sosial, digital, dan lainnya.
2. Buku dan *softfile* Daulat Ra'jat dalam kondisi memerlukan kerja keras untuk membacanya. Peneliti mengharapkan Daulat Ra'jat dapat diterbitkan lagi dalam bentuk yang lebih bervariasi agar lebih mudah dibaca.

Pengalaman berharga yang didapatkan peneliti ialah:

1. Peneliti mempunyai ketakjuban bahwa inti dari perjalanan sejarah bangsa dalam mencapai kemakmuran adalah pemerintahan.
2. Peneliti banyak dibantu oleh *website* Khastara untuk membaca dan mengumpulkan Daulat Ra'jat secara *online*. Khastara menjadi salah satu alat indigenisasi dan Kedaulatan Digital nusantara.
3. Peneliti merasakan perjalanan sejarah rasa persatuan bangsa, persatuan rakyat, dan perjuangan memiliki pemerintahan sendiri yang diperjuangkan Mohammad Hatta dan kawan-kawannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N., Agung, L., & Dyah, C. (2019). Hatta's Thoughts Of Democracy, Social Justice, Human Rights And Democratic Economy. *International Journal of Education and Social Science Research*, 2(3), 154–166. https://ijessr.com/uploads2019/ijessr_02_152.pdf. Diunduh 14 Juli 2024.
- Asih, I. D. (2005). Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali Ke Fenomena.” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(2), 75–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i2.164>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Asriana, R. L., Abdulkarim, A., & Komalasari, K. (2018). Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Civicus*, 18(12), 30–38. <https://doi.org/10.17509/civicus.v18i2.5183>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Aulia, E., Isra, S., & Yuslim. (2024). The Conception of People's Sovereignty in Indonesia: Mohammad Hatta's Thought Approach. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 146–163. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.221>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Azizah, I., Wahyuni, A., & Purnomo, B. (2021). Analisis Karakter Cinta Tanah Air Melalui Novel Berjudul “Hatta: Aku Datang Karena Sejarah.” *EduSosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi*, 1(1), 75–83. <https://doi.org/10.22437/jeso.v1i1.15489>. Diunduh 12 Juli

2024.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2024). *Rekonstitusi*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/rekonstitusi>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Bahasa, B. P. dan P. (2024a). *Fenomena*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/fenomena>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Bahasa, B. P. dan P. (2024b). *Konsep*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/konsep>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Bahasa, B. P. dan P. (2024c). *Perspektif*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/perspektif>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Bahasa, B. P. dan P. (2024d). *Proletar*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/proletar>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Bahasa, B. P. dan P. (2024e). *Proletariat*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/proletariat>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Bahasa, B. P. dan P. (2024f). *Teori*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/teori>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Djokosutono. (1982). *Ilmu Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Effendy, E., Aisyah, N., Manurung, R. S., & Nasution, R. (2023). Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 5723–5729.

- <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/14609/11337>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Faizin, T. (2015). Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi dan Perspektif Pragmatis). *Jurnal Al-Fikrah*, 4(1), 100–126. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/321>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Fuady, A. S. (2019). Islam Dan Pendidikan: Studi Pemikiran Mohammad Hatta. *At-Tuhfah : Jurnal Keislaman*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v8i1.161>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator*, 9(1), 163–180. <https://media.neliti.com/media/publications/154253-ID-pendekatan-fenomenologi-pengantar-prakti.pdf>. Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1931a). Kata Pendahoeloean Boeat “DAULAT RA’JAT”: 20 September 1931. *Daulat Ra’jat*, 1–2. <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/502761/1>. Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1931b). Pengaroeh Koloniaal Kapitaal Di Indonesia: 20 November 1931. *Daulat Ra’jat*, 1–4. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1931_11_20_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Daulat_Rajat_1931_11_20_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.

- Hatta, M. (1931c). Sedikit Pemandangan Tentang Pidato G. G. Baroe Di Moeka Volksraad: 30 Oktober 1931. *Daulat Ra'jat*, 1–3.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1931_10_30_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1931_10_30_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1931d, September). Koloniale Politiek: Dari Politiestaat ke “Rechts”-Staat dan Kembali Lagi ke Politiestaat: 20 September 1931. *Daulat Ra'jat*, 2–3.
<https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/502761/1>.
Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1931e, December). Tjatoer Politik Dikeliling Medja Boendar: 30 December 1931. *Daulat Ra'jat*, 5–7.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1931_12_30_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1931_12_30_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1932a). Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Ra'jat: 10 Januari 1932. *Daulat Ra'jat*, 2–3.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_01_10_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1932_01_10_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1932b). Faham Persatoean Di Dalam Strategi Dan Taktik Perdjoangan: 30 Januari 1932. *Daulat Ra'jat*, 1–3.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_01_30_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1932_01_30_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.

- Hatta, M. (1932c). Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia Pidato Mohammad Hatta: 20 September 1932. *Daulat Ra'jat*, 1–4. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_09_20_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1932_09_20_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1932d). Non-Cooperation: 1: Non-Cooperation-PNI: 30 Desember 1932. *Daulat Ra'jat*. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_12_30_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1932_12_30_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1932e). Pemandangan Loear Negeri: Djepang: 29 Februari 1932. *Daulat Ra'jat*, 5–7. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_02_29_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1932_02_29_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1932f). Soal Ekonomi Dalam Persatoean Indonesia: 10 Desember 1932. *Daulat Ra'jat*. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_12_10_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1932_12_10_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1932g, September). Krisis Doenia Dan Nasib Ra'jat Indonesia: Pidato Mohammad Hatta (Samboengan): 30 September 1932. *Daulat Ra'jat*, 1–2. [https://opac.perpusnas.go.id/DigitalContentImgList.aspx?fn=Daulat_Rajat_1932_09_30_001.zip&ws=Terbitan Berkala](https://opac.perpusnas.go.id/DigitalContentImgList.aspx?fn=Daulat_Rajat_1932_09_30_001.zip&ws=Terbitan_Berkala). Diunduh 3 Juni 2024.

- Hatta, M. (1932h, November). Non-Cooperatie Boekan Non-Actie: 10 November 1932. *Daulat Ra'jat*, 3–4. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_11_10_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1932_11_10_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1933a). Associatie-Politiek Lagi?: 20 Oktober 1933. *Daulat Ra'jat*, 226–227. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1933_10_20_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1933_10_20_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1933b). Djalan Sempit: 20 Agustus 1933. *Daulat Ra'jat*, 177–179. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1933_08_20_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1933_08_20_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1933c). Kedaulatan Ra'jat Boekan Anarchie: 30 Juni 1933. *Daulat Ra'jat*, 1–3. <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/502761>. Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1933d). Menempoeh Zaman Perpisahan: 20 Juni 1933. *Daulat Ra'jat*, 1–2. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1933_06_20_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1933_06_20_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1933e). Nasib Kaoem Dagang Ketjil Di Indonesia: 10 Juli 1933. *Daulat Ra'jat*, 145–147.

- <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/502761>.
Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1933f). Pemoeda Dalam Krisis: 30 Oktober 1933. *Daulat Ra'jat*, 234–236.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1933_10_30_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1933_10_30_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1933g, November). Ekonomi Ra'jat: 20 November 1933. *Daulat Ra'jat*, 249–251.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1933_11_20_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1933_11_20_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (1934). Gilden-Socialisme: 10 Februari 1934. *Daulat Ra'jat*, 25–26.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1934_02_10_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan_Berkala/Daulat_Rajat_1934_02_10_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.
- Hatta, M. (2002). *Daulat Ra'jat: Buku 1 Tahun 1931-1932* (1st ed.). Yayasan Hatta. Jakarta.
- Higgins, B. (1958). Hatta and Co-operatives: The Middle Way for Indonesia? *Sage Journals*, 318(1), 49–57.
<https://doi.org/10.1177/000271625831800108>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Huntington, Crozier, & Watanuki. (1975). *The Crisis Of Democracy: Report On The Governability Of Democracies To The Trilateral Commission*. New York University Press, New

York.

Indonesia, U. I. (2018). *Universitas Islam Indonesia: 21 November 2018*. Facebook.

https://web.facebook.com/Universitas.Islam.Indonesia/posts/adakah-diantara-anda-yang-bertanya-tanya-kenapa-gedung-perpustakaan-pusat-dan-mu/2073055186084782/?locale=id_ID&_rdc=1&_rdr.

Diunduh 24 September 2024.

Istiningsih, G., & Dharma, D. S. A. (2023). Indigenisasi Kawruh Ki Ageng Suryomentaram dalam Pengembangan Proyek Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 191–208. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i2.6568>. Diunduh 14 Juli 2024.

Jalil, M. (2021). The Essence Of Muhammad Hatta's Democracy: Relevance To The Development Of Regional Autonomy. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(2), 417–430. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4678932>. Diunduh 14 Juli 2024.

Kahin, G. M. (1980). In Memoriam: Mohammad Hatta, (1902-1980). *JSTOR*, 30, 112–119. <https://www.jstor.org/stable/3350828>. Diunduh 14 Juli 2024.

Malek, J. A. (2024). *Mohammad Hatta Built Smart Nation*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta.

Maryono. (2015). Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, Penulis, dan Karya-Karyanya: Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik. *Berkala*

- Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, XI(2), 24–35.
<https://doi.org/10.22146/bip.10033>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Nurlidiawati. (2014). Sejarah Perkembangan Perpustakaan Di indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 2(1), 18–27. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/137/102>. Diunduh 14 Juli 2024.
- Oswaldo, I. G. (2022). *Apa yang Akan Terjadi Jika Tak Mampu Bayar Utang Bank?* DetikFinance. <https://finance.detik.com/moneter/d-6381956/apa-yang-akan-terjadi-jika-tak-mampu-bayar-utang-bank>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (2020). <https://perpusnas.go.id/profil/struktur-organisasi/bentuk-skema-struktural>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Pulungan, M. S. (2019). Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi Dalam Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta. *Arena Hukum*, 12(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.2>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Ra'jat, K. D. (1932a). Daulat Ra'jat: 10 Agustus 1932. *Daulat Ra'jat*, 1–8. [https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_08_10_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Daulat_Rajat_1932_08_10_001.pdf). Diunduh 3 Juni 2024.

- Ra'jat, K. D. (1932b). Daulat Ra'jat: 30 Juli 1932. *Daulat Ra'jat*, 1–8.
[https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan Berkala/Daulat_Rajat_1932_07_30_001.pdf](https://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/dokumen_isi3/Terbitan%20Berkala/Daulat_Rajat_1932_07_30_001.pdf). Diunduh 4 Juni 2024.
- Rejeki, M. N. S. (2010). Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi: Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 41–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v7i1.195>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Safri, H. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (D. Ilham (Ed.); 1st ed.). Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. Palopo.
<https://perpustakaan.stietotalwin.ac.id/pdf/10.pdf>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Sahdan, G. (2020). Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan : Perspektif Governmentality. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 41–57. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.80>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Sangaji, R. C., & Sugiyanto, S. (2021). Phenomena Village Market Development Policies Through Technology-Based Market School Programs. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(4), 235–243.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/download/3674/1769>. Diunduh 4 Juli 2024.

- Smith, A. (2007). An Inquiry Into Nature And Causes Of The Wealth Of Nations. In S. M. Soares (Ed.), *metalibri* (4th ed.). MetaLibri Digital Library. <https://doi.org/10.1111/2057-1615.12058>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Soeprapto, S. (2013). Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 23(2), 99–116. <https://media.neliti.com/media/publications/79721-ID-konsep-muhammad-hatta-tentang-implementa.pdf>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Sugiyanto. (2024). Melacak Komunikasi Pemberdayaan Versus Sri Sultan HB IX Dalam Sejarah Selokan Mataram. *Yogyakarta*.
- Sugiyanto, & Musoli. (2020). Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol di Pulau Jawa (Studi Kasus di Jawa Barat). In E. M. Dukut (Ed.), *Dampak Jalan Tol terhadap Pulau Jawa* (1st ed., Vol. 1). Universitas Katolik Soegijapranata. [http://repo.apmd.ac.id/1139/1/Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Edit..pdf](http://repo.apmd.ac.id/1139/1/Dampak%20Sosial%20Dan%20Ekonomi%20Pembangunan%20Jalan%20Tol%20Edit..pdf). Diunduh 4 Juli 2024.
- Sugiyanto, S., Surwiyanta, A., Prasetyanto, H., & Musoli, M. (2022). Hotellogy-A New Branch of Philosophy of Science. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 13(2), 466–476. [https://doi.org/10.14505/jemt.v13.2\(58\).16](https://doi.org/10.14505/jemt.v13.2(58).16). Diunduh 4 Juli 2024.
- Sugiyanto, Tiurmida, N., & Triono, T. A. (2022). A Study of Green Independent Villages in Economic Aspects in the Special

- Region of Yogyakarta. *International Journal of Social Science (IJSS)*, 2(4), 1819–1830. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4144>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta, CV* (13th ed., Issue April). CV. Alfabeta. Bandung.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal PKS*, 17(2), 131–146. <http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1473/849>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Teori, Konsep, Variabel, Proposisi, Dan Hubungan Antar Variabel*. (2023). Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area. <https://map.uma.ac.id/2023/12/teori-konsep-variabel-proposisi-dan-hubungan-antar-variabel/>. Diunduh 10 Desember 2024.
- Tiurmida, N., Triono, T. A., Sulistiana, U., & Sugiyanto. (2022). Strategies to Educate Traditional Market Traders Based on Information Technology in Beringharjo Market, Yogyakarta City. *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori Dan Implementasi*, 13(2), 150–163. <https://doi.org/10.18196/jbti.v13i2.16289>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Tosepu, Y. A. (2020). Teori dan Konsep. *Molucca Medica*, 11(April), 13–45. https://www.academia.edu/41455293/KONSEP_DAN_TEORI. Diunduh 4 Juli 2024.

- Triesadi, B. A. H., & Islami, V. (2017). Prosedur Lelang Hak Tanggungan Di Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Jakarta Pusat. *Cakrawala*, XVII(1), 1–13. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1760/1331>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). https://peraturan.bpk.go.id/Download/92288/UUD45_SatuNaskah.pdf. Diunduh 4 Juni 2024.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (2007). https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_No._43_Tahun_2007_tentang_Perpustakaan_.pdf. Diunduh 4 Juli 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pub. L. No. 4 (1996). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46093/uu-no-4-tahun-1996>. Diunduh 4 Juli 2024.
- Utomo, I. N., & Kamal, N. (2020). Konsep Nasionalisme Dalam Majalah Daulat Ra'jat 1931-1934. *JASMERAH: Journal of Education and Historical Studies*, 2(1), 20–28. https://doi.org/10.24114/jasmerah_journal.v2i1.17736. Diunduh 4 Juli 2024.
- Yunanto, S. E. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 2(1), 1–19.



<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>. Diunduh 4 Juli 2024.

Yunanto, S. E. (2023). *Memahami Pemerintahan*. Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta.

Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian

		SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN <small>Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: www.stip.apmd.ac.id</small> AKREDITASI-B SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017
Nomor	: 317/S-2/III/2024	
Lampiran	: 1 bendel	
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian	
 Kepada Yth, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No.11 Jakarta 10110		
 Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA TENTANG TEORI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI dengan Dosen Pembimbing : Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :		
Nama	: Syaiful Bahri	
Nomor Mahasiswa	: 23610009	
Jenjang	: Magister	
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan	
Tahun Akademik	: 2024/2025	
Waktu Penelitian	: 4 bulan	
 Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.		
 Yogyakarta, 18 Maret 2024 Direktur  Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM. NIP. 170 230 210		

10 Juli 2024

Nomor : B.8093/2/HMP.02.04/VII.2024
Perihal : Persetujuan Permohonan Penelitian

Yth. : Direktur Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 317/S-2/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa atas nama:

Nama : Syaiful Bahri, S.Sos.
NIM : 23610009
Prodi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kontak : syaiful1998@gmail.com

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengambilan data Tesis yang berjudul **"Pemikiran Mohammad Hatta tentang Teori Pemerintahan dalam Prespektif Ekonomi"** di Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 15 Juli s.d. 15 Agustus 2024 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Evi Ratnasari, di nomor HP. 0857-1959-1400.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Utama

Joko Santoso

Tembusan:

1. Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
3. Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Pustaka

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, <https://mip.apmd.ac.id>
AKREDITASI BAIK SEKALI SK. No. 4953/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023

SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 499-A/S2/IX/2024

Yang bertanda tangan di mbawah ini:

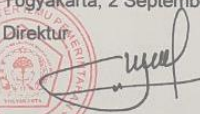
Nama : Dr. Sugiyanto, S.Sos, M.M
NIY : 170 230 210
Jabatan : Direktur Program Magister


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dosen dibawah ini :

Nama : Syaiful Bahri, S.Sos.
NIM : 23610009

Berdasarkan Surat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor: B.8093/2/HMP.02.04/VI/2024, telah menyelesaikan Penelitian Tesis yang berjudul "Pemikiran Mohammad Hatta tentang Teori Pemerintahan dalam Prespektif Ekonomi".

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Yogyakarta, 2 September 2024
Direktur

Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.Si.



3. TANDA TERIMA CEK PLAGIASI



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpustgmd@gmail.com telp/WA 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : SYAIFUL BAHRI
Judul Makalah: PEMERINTAHAN BERBASIS Keadilan dan Kebenaran
UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT (Studi Pemikiran
Mohammad Hatta)
Tanggal pemeriksaan: 08 Januari 2025
Persentase plagiasi: 1%



Petugas: Checked By:

Okie Fajaruddin Patma

